

**INVESTIGASI MODERASI VARIABEL *FRAUD PREVENTION* TERHADAP  
HUBUNGAN ANTARA *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*,  
*ACCOUNTING ETHICS* DAN *INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS*  
TERHADAP *FINANCIAL REPORTING QUALITY***

Tesis  
Untuk memenuhi sebagai persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S2

Program Magister Akuntansi



Disusun Oleh:  
EGI GUMALA SARI  
21402400018

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
TAHUN 2026**

TESIS

**INVESTIGASI MODERASI VARIABEL *FRAUD PREVENTION* TERHADAP  
HUBUNGAN ANTARA *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*,  
*ACCOUNTING ETHICS* DAN *INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS*  
TERHADAP *FINANCIAL REPORTING QUALITY***

Disusun Oleh:  
Egi Gumala Sari  
21402400018

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Tesis Program Magister Akuntansi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, Februari 2026

Pembimbing,

Prof. Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si, Ak, CA, CRP  
NIK. 211406018

**INVESTIGASI MODERASI VARIABEL *FRAUD PREVENTION* TERHADAP  
HUBUNGAN ANTARA *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*,  
*ACCOUNTING ETHICS* DAN *INTERNAL CONTROL EFFECTIVENESS*  
TERHADAP *FINANCIAL REPORTING QUALITY***

Disusun Oleh:  
Egi Gumala Sari  
21402400018

Telah dipertahankan di depan  
penguji Pada tanggal 25 Februari 2026

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Pembimbing,

**Prof. Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si, Ak, CA, CRP**

Penguji 1

Penguji 2

Dr. Lisa Kartikasari, SE, MSi, Akt, CA      Dr. E. Drs. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Ak,

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu  
persyaratan Untuk memperoleh Gelar Magister  
Akuntansi Tanggal 26 Februari 2026

**Prof. Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si, Ak, CA, CRP**  
Ketua Program Studi Magister Akuntansi

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan proposal tesis ini dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Proposal tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian Sarjana Strata (S2) Magister Akuntansi pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Adapun judul yang diajukan penulis adalah *Investigasi Moderasi Variabel Fraud Prevention Terhadap Hubungan Antara Islamic Corporate Governance, Accounting Ethics Dan Internal Control Effectiveness Terhadap Financial Reporting Quality*

Penyusunan proposal tesis ini tidak dapat berjalan tanpa bantuan semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan proposal tesis. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Edy Suprianto, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen pembimbing yang telah memberikan banyak masukan.
4. Bapak dan Ibu Dosen pengajar serta staf Magister Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada kedua Orang Tua & Mertua Tercinta beserta keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Akuntansi dengan baik.
6. Limpahan rasa syukur dan terimakasih kepada suami tercinta Dr. Yusuf Faisal, SE.I., M.Ak., M.E. yang setia mendampingi penulis dengan penuh semangat, kesabaran dan memberikan dukungan sehingga penulis bisa dapat menyelesaikan Program Magister Akuntansi begitu juga dengan anak – anak tercinta Ananda Khanza Fadhilatunnisa, Ahmad Athaillah Al Muhasibi Az Zukhruf, Muhammad Ibrahim Furqon Az Zukhruf yang terus mendokan dan memberi semangat dalam menjalani kehidupan ini.
7. Teman-teman seperjuangan dari Program Studi Magister Akuntansi Tahun 2024 yang selalu memberikan dukungan dan berbagi pengetahuan kepada penulis selama kegiatan perkuliahan sampai dengan saat ini.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk melengkapi tulisan ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Februari 2026  
Penulis,

(EGI GUMALA SARI)



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian .....	6
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis .....	15
2.2. Variabel Penelitian .....	17
2.3. Penelitian Terdahulu .....	35
2.4. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>48</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	48
3.2. Populasi dan Sampel .....	48
3.3. Sumber dan Jenis Data .....	49
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	50
3.5. Variabel dan Pengukuran/indikator Variabel .....	51
3.6. Alat Analisis.....	57
3.7. Cara menentukan jenis variabel Moderasi .....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>66</b>
4.1. Deskripsi Sampel .....	66
4.2. Analisis dan Pembahasan.....	104
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>155</b>
5.1. Simpulan .....	155
5.2. Implikasi Teoritis .....	156
5.3. Implikasi Kebijakan .....	157
5.4. Keterbatasan Penelitian.....	159
5.4. Agenda Penelitian Mendatang .....	160

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 3. 1	Skor Penilaian Kuesioner.....	53
Tabel 3. 2	Operasional Variabel Penelitian .....	56
Tabel 3. 3	Skor Korelasi Antar Variabel .....	64
Tabel 4. 1	Sebaran Institusi dan Responden Penelitian .....	69
Tabel 4. 2	Jenis Kelamin .....	72
Tabel 4. 3	Usia Responden .....	74
Tabel 4. 4	Pendidikan Responden .....	75
Tabel 4. 5	Lama Bekerja Responden .....	77
Tabel 4. 6	Level Jabatan Responden .....	79
Tabel 4. 7	Analisis Statistik Deskriptif .....	82
Tabel 4. 8	Deskriptif Islamic Corporate Governance .....	86
Tabel 4. 9	Deskriptif Accounting Ethics .....	90
Tabel 4. 10	Deskriptif Internal Control Effectiveness .....	94
Tabel 4. 11	Deskriptif Fraud Prevention .....	97
Tabel 4. 12	Deskriptif Financial Reporting Quality .....	102
Tabel 4. 13	Uji Normalitas dengan Skewness.....	107
Tabel 4. 14	Nilai Loading Factor .....	109
Tabel 4. 15	Average Variance Extracted (AVE) .....	110
Tabel 4. 16	Uji Realibilitas.....	111
Tabel 4. 17	Rsquare.....	115
Tabel 4. 18	Model Fit .....	117
Tabel 4. 19	Pengujian Hipotesis Path Coefficient .....	119

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Teori.....	18
Gambar 2. 2 Kerangka Konsep Penelitian.....	39
Gambar 4. 1 Garis Kontinum Variabel Islamic Corporate Governance.....	89
Gambar 4. 2 Garis Kontinum Variabel Accounting Ethics.....	93
Gambar 4. 3 Garis Kontinum Variabel Internal Control Effectiveness.....	97
Gambar 4. 4 Garis Kontinum Variabel Fraud Prevention.....	101
Gambar 4. 5 Garis Kontinum Variabel Financial Reporting Quality.....	106
Gambar 4. 6 Outer Model Testing.....	108
Gambar 4. 7 Iner Model Testing.....	114



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh *Islamic Corporate Governance, Accounting Ethics, Internal Control Effectiveness* dan *Fraud Prevention* terhadap *Financial Reporting Quality*, serta *Fraud Prevention* memoderasi *Islamic Corporate Governance, Accounting Ethics* dan *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif menggunakan data primer. Populasi dan dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dari 197 lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan, asuransi, dan multifinance syariah. Pengolahan data menggunakan software *Partial Least Square (PLS)* dengan *Moderated Regression Analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance* dan *Accounting Ethics* secara signifikan meningkatkan *Financial Reporting Quality*. Sebaliknya, *Internal Control Effectiveness* dan *Fraud Prevention* ditemukan memiliki pengaruh yang terbatas terhadap *financial reporting quality*. Selain itu, *Fraud Prevention* terbukti berperan sebagai *pure moderator* yang secara signifikan memperkuat hubungan tersebut. Temuan penelitian ini memberikan gambaran kepada *stakeholders* bahwa penerapan *Islamic Corporate Governance* dan *Accounting Ethics* merupakan faktor kunci dalam mendorong terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Selain itu, hasil ini juga memberikan indikasi mengenai pentingnya penguatan mekanisme *Fraud Prevention* di perusahaan, karena terbukti mampu mengoptimalkan peran tata kelola dan etika dalam memitigasi risiko rendahnya *Financial Reporting Quality*. Hal ini menegaskan bahwa tanpa dukungan sistem pencegahan kecurangan yang kuat, dampak dari etika akuntansi dan tata kelola syariah terhadap kualitas informasi tidak akan mencapai hasil yang maksimal.

Kata kunci : *Islamic Corporate Governance, Accounting Ethics, Internal Control Effectiveness, Financial Reporting Quality, Fraud Prevention*.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Penyajian pelaporan keuangan mencakup laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif (laporan laba rugi), laporan arus kas dan catatan atas pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan tidak terbatas pada isi dari laporan keuangan (*financial statement*), namun cakupan pelaporan keuangan (*financial reporting*) adalah lebih luas dibandingkan laporan keuangan. Tujuan penyajian pelaporan keuangan adalah untuk pengambilan keputusan bagi entitas. Dalam hal pengambilan keputusan, tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan jaminan kualitas informasi dan laporan keuangan (Firmansyah and Damayanti, 2021).

Laporan keuangan yang berkualitas baik tercermin dari apakah laporan keuangan yang disusun memuat informasi yang benar dan jujur. Sebuah laporan keuangan berkualitas tinggi jika memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan (Rahmadieni and Qizam, 2019). (Hasanah and Yanto, 2021) mengemukakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki peran yang sangat penting bagi pengguna internal dan eksternal sehingga menuntut penyajian laporan keuangan yang baik dan benar. Hal ini agar terhindar dari asimetri informasi (Ismunawan and Andayani, 2021). Namun, yang sebaliknya terjadi adalah tidak semua entitas bisnis menyajikan laporan keuangan secara benar dan sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya (Alfiyyah et al., 2022; Asiam, 2020). Beberapa peneliti telah melakukan tinjauan umum terhadap berbagai fakta seputar kualitas laporan keuangan (Aisyah, 2022; Maherni, 2022; Prastika and Trisnarningsih, 2023) yang dipengaruhi oleh *Islamic Corporate Governance*, *accounting ethics*, *internal control effectiveness* dan *fraud prevention*.

Praktik *Islamic Corporate Governance* juga menjadi hal penting di dalam Perusahaan. Hal ini diperkuat dengan di terbitkannya Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI) oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi entitas untuk menerapkan praktik *Good Corporate Governance*. (PUG-ESI 2023).

Prinsip-prinsip governansi korporat konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance*. Transparansi merujuk pada *shiddiq*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*, *responsibility* merujuk pada *amanah*, *tablig*, dan *fathanah*, *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan *Amanah* (Arif and Djasuli, 2022). Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip governansi korporat konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic corporate governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Islamic corporate governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan governansi korporat konvensional. Perbedaan *Islamic corporate governance* dan konvensional terletak pada *shariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Penelitian Ajibade et al., (2022) dan Kuraesin and Yadiati, (2021) menunjukkan bahwa tata Kelola perusahaan secara signifikan memengaruhi representasi pelaporan keuangan. Berbeda halnya dengan penelitian Hida et al., (2024) yang menemukan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan *Islamic corporate governance* diakomodasi dalam regulasi undang-undang republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Memenuhi amanah undang-undang tersebut, Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2009 telah menerbitkan peraturan bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dan berlaku secara efektif per tanggal 1 Januari 2010. Implementasi ICG dalam PBI No. 11/3/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah dituangkan melalui pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organ tata kelola dewan pengawas syariah sebagai dewan penasehat dan pengawas syariah, pengaturan pemenuhan prinsip syariah dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan. Bahkan pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Inkonsistensi hasil terkait pengaruh *Islamic corporate governance*, *accounting ethics* dan *internal control effectiveness* terhadap *financial*

*reporting quality* dari penelitian-penelitian sebelumnya dimungkinkan adanya variabel yang mempengaruhi hubungan antara *accounting ethics* dan *Islamic corporate governance* terhadap *financial reporting quality*.

Selain permasalahan *corporate governance*, *accounting ethics* merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi *financial reporting quality*. *accounting ethics* merupakan suatu sikap atau perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang secara sadar mematuhi ketentuan atau norma yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi (Rosyida, 2017; Susilawati et al., 2022)/ Di Indonesia muncul isu terjadinya beberapa pelanggaran *accounting ethics* oleh akuntan publik Margerety, (2022), akuntan syariah penelitian dari Junaedi et al., (2014), akuntan internal maupun akuntan pemerintah yang dikemukakan oleh Latifah, (2019).

Pelanggaran etika dalam periode terbaru dapat seperti yang terjadi pada: 1) Kasus Wanaartha Life (2023) dimana Akuntan publik diduga gagal mendeteksi dan melaporkan manipulasi laporan keuangan yang melibatkan penyembunyian kewajiban polis sebesar Rp 12,1 triliun. OJK dan Kementerian Keuangan memberikan sanksi berat, termasuk pencabutan izin akuntan publik Nunu Nurdiyaman dan pembekuan izin KAP Crowe Indonesia (Katadata). 2) Kasus Garuda Indonesia (2019): Walaupun terjadi pada tahun 2019, dampak dan isu terkait pelanggaran etika oleh akuntan publik dalam kasus Garuda Indonesia masih relevan hingga saat ini. Akuntan publik dari KAP yang menangani laporan keuangan Garuda terlibat dalam memvalidasi laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, di mana pendapatan yang belum terealisasi dicatat sebagai pendapatan tahun berjalan. Akibatnya, OJK memberikan sanksi kepada akuntan publik dan perusahaan tersebut mendapat sorotan negatif (Katadata). 3) Kasus Hanson International (2020): Akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan PT Hanson International Tbk juga terlibat dalam isu pelanggaran etika. Laporan keuangan yang seharusnya mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya malah dimanipulasi, sehingga menyesatkan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Kasus ini berakhir dengan pengadilan terhadap

direktur utama perusahaan dan menimbulkan kerugian besar bagi para investor (Bisnis.com).

Permasalahan *accounting ethics* tidak hanya terjadi pada akuntan konvensional, bahkan akuntan syariah juga mengalami permasalahan pada penerapan etika kerja. Sebagaimana pada Kasus Dana Investasi Syariah di Arab Saudi (2022): Sebuah kasus yang melibatkan salah satu perusahaan investasi syariah di Arab Saudi terungkap pada tahun 2022, di mana ditemukan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung data yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Akuntan yang bertugas tidak melaporkan penggunaan dana yang dialokasikan ke sektor non-syariah, yang kemudian menyebabkan kerugian besar bagi investor yang mengharapkan pengelolaan sesuai syariah. Kasus ini menyoroti kurangnya transparansi dan kepatuhan terhadap etika dalam industri keuangan syariah (Bisnis.com).

Sehingga pengembangan dan kesadaran etik/moral memainkan peran kunci dalam semua area profesi akuntansi Septiari et al., (2023). Untuk itu, etika adalah salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik (Ibrahim and Kamri, 2017). Penelitian Koufie et al., (2024); Nkuranga and Tarus, (2023); Osunwole et al., (2020) menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika dan kualitas pelaporan keuangan. Berbeda halnya dengan penelitian Andari et al., (2022) menunjukkan bahwa etika tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan, sama halnya dengan penelitian Sinaranata et al., (2019) bahwa etika tidak berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Penelitian Im and Nam, (2019) ini menemukan bahwa tingkat etika manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan dalam konteks konservatisme akuntansi. Meskipun etika dipromosikan, hasil menunjukkan tidak ada perbedaan besar dalam pelaporan antara perusahaan yang terlibat dalam kecurangan dan yang tidak.

*Internal control effectiveness* sangat penting dalam konteks *corporate governance* dan *financial reporting quality*, terutama dalam lingkungan syariah. Dalam era globalisasi dan kompleksitas bisnis yang semakin meningkat, perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi integritas dan

akurasi laporan keuangan. Pengendalian internal yang efektif berfungsi sebagai mekanisme penting untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi risiko tersebut, sehingga membantu perusahaan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Namun, banyak perusahaan, terutama yang beroperasi dalam kerangka *Islamic Corporate Governance*, masih menghadapi tantangan dalam menerapkan pengendalian internal yang efektif. Ketidakpatuhan terhadap kebijakan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pelatihan karyawan sering kali mengakibatkan sistem pengendalian yang tidak optimal. Selain itu, interaksi antara etika akuntansi dan pengendalian internal perlu dipahami lebih dalam untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara *internal control effectiveness*, *Islamic Corporate Governance*, dan *accounting ethics*, serta peran moderasi dari *fraud prevention*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi dan akademisi dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dan integritas perusahaan dalam konteks syariah.

Pencegahan kecurangan laporan keuangan (*Fraud Prevention*) harus berjalan bersamaan dalam suatu organisasi. Pencegahan kecurangan laporan keuangan dalam akuntansi ini masih erat hubungannya dengan kualitas laporan keuangan. Suatu laporan keuangan diharapkan disajikan secara wajar dan jujur atas dampak dari transaksi, peristiwa lain dan kondisi yang ada dalam perusahaan. Jika laporan keuangan sudah menyajikan kondisi sebenarnya dan informasinya dapat diandalkan, ini mengindikasikan kualitas yang baik dalam laporan keuangan karena tingginya kualitas laporan keuangan akan menunjukkan rendahnya kecurangan yang terjadi pada perusahaan. *Fraud prevention* berfungsi untuk meminimalkan kesalahan atau manipulasi dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan keandalan dan validitas informasi yang disajikan. Penelitian (Budiman et al., 2022) menemukan bahwa *fraud prevention* berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap *financial reporting quality*. Begitu juga dengan penelitian (Umar et al., 2019) memperoleh hasil bahwa *fraud prevention* berpengaruh positif terhadap

*financial reporting quality* dan juga menunjukkan bahwa *fraud prevention* mempunyai dampak yang lebih besar terhadap *financial reporting quality*.

Dalam penelitian ini, penambahan variabel *fraud prevention* sebagai variabel moderasi dilakukan sebagai bentuk pengembangan model yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor yang memengaruhi *financial reporting quality*. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya meneliti pengaruh langsung dari *accounting ethics*, *internal control effectiveness*, dan *Islamic corporate governance* terhadap *financial reporting quality*. Namun demikian, dalam praktiknya, *financial reporting quality* tidak hanya bergantung pada nilai-nilai etika dan sistem pengendalian yang efektif, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana organisasi memiliki mekanisme *fraud prevention* yang berjalan dengan baik. Dalam konteks ini, *fraud prevention* diposisikan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh variabel-variabel independen terhadap *financial reporting quality*. Penambahan variabel ini juga didasarkan pada landasan *Shariah Enterprise Theory* yang menekankan pentingnya akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat. *Fraud prevention* dalam perspektif syariah bukan hanya upaya teknis untuk menghindari penyimpangan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan amanah yang harus dijaga untuk menghindari *fasad* (kerusakan) dalam pelaporan. Oleh karena itu, keberadaan *fraud prevention* sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memperkuat hubungan teoritis yang telah ada, sekaligus menjadi kontribusi dalam memperkaya model penelitian akuntansi syariah secara empiris dan konseptual.

Perbedaan utama dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah penggunaan variabel *fraud prevention* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga memiliki kebaruan, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan memasukkan *Fraud Prevention* sebagai variabel moderating, yang belum banyak diteliti dalam konteks hubungan antara *Islamic Corporate Governance*, *Accounting Ethics*, dan *Internal Control Effectiveness* terhadap *financial reporting quality*. Studi ini bertujuan untuk memberikan

pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana *fraud prevention* dapat memperkuat dampak ketiga variabel tersebut terhadap *financial reporting quality*.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan dengan menggunakan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai pengganti *Good Corporate Governance* (GCG). ICG memperkenalkan pendekatan tata kelola perusahaan yang tidak hanya berlandaskan prinsip umum GCG, tetapi juga mengikuti nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam (*Sharia*). Ini memberikan perspektif baru dalam studi tentang *financial reporting quality* terutama untuk perusahaan berbasis syariah, yang masih jarang diteliti. Adapun pertimbangan peneliti mengambil Lokasi penelitian di Lembaga keuangan Syariah dikarenakan Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang unik, seperti larangan *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi). Hal ini memberikan konteks yang berbeda dalam memahami *Accounting Ethics* dan praktik bisnis dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah menjadi tempat yang sangat relevan dikarenakan menerapkan etika dan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya, termasuk pelaporan keuangan. Bahkan Lembaga keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh *Islamic Worldview* yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta akuntabilitas kepada Allah, masyarakat, dan pemegang saham. Hal ini memberikan kesempatan untuk menguji teori tersebut dalam praktik nyata. Pertimbangan peneliti berikutnya yakni lembaga keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi bagian penting dalam sistem keuangan global, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim besar. Meneliti lembaga ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat tentang tren ekonomi dan keuangan yang berkembang.

Berdasarkan motivasi di atas, peneliti akan melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah dengan mengambil judul Investigasi moderasi variabel *Fraud Prevention* terhadap hubungan antara *Islamic Corporate Governance*, *Accounting Ethics* dan *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality*?
2. Apakah *Accounting Ethics* berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality*?
3. Apakah *Internal Control Effectiveness* berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality*?
4. Apakah *Fraud Prevention* berpengaruh terhadap *Financial Reporting Quality*?
5. Apakah *Fraud Prevention* memoderasi pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality*?
6. Apakah *Fraud Prevention* memoderasi pengaruh *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality*?
7. Apakah *Fraud Prevention* memoderasi pengaruh *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality*.
2. Pengaruh *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality*.
3. Pengaruh *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*
4. Pengaruh *Fraud Prevention* terhadap *Financial Reporting Quality*
5. Peran *Fraud Prevention* dalam memoderasi pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality*.
6. Peran *Fraud Prevention* dalam memoderasi pengaruh *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality*.
7. Peran *Fraud Prevention* dalam memoderasi pengaruh *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### 1. Aspek Teoritis

- 1) Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai hubungan antara *Islamic Corporate Governance*, *Accounting Ethics*, dan *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*. Penelitian ini akan memperkaya literatur yang ada dengan mengidentifikasi dan menganalisis peran variabel moderasi *fraud prevention* dalam konteks perusahaan syariah, sehingga memberikan perspektif baru bagi studi-studi sebelumnya.
- 2) Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan diskusi lebih lanjut terutama pada variabel *Islamic Corporate Governance*.

##### 2. Aspek Praktis

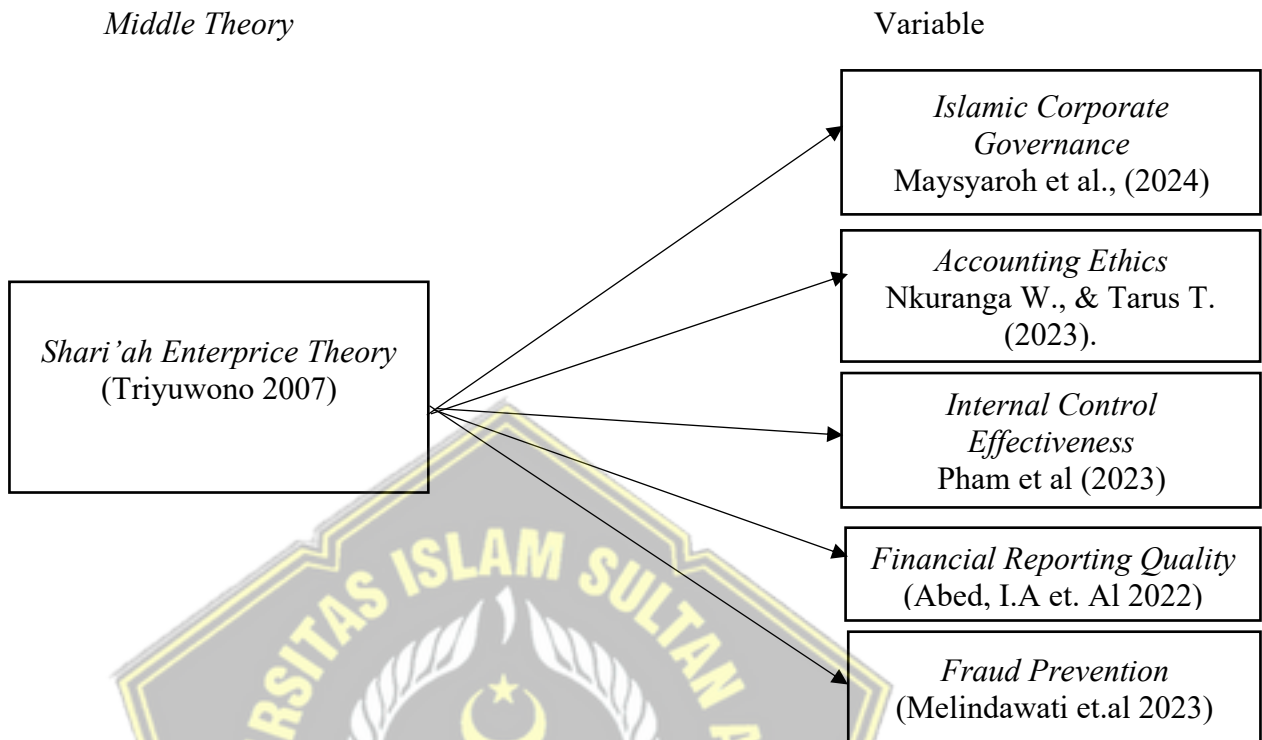
- (1) Sebagai dasar bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan standar etika bagi karyawan tanpa terkecuali pimpinan yang sesuai dengan al qur'an dan hadits, Kebijakan yang berkenaan dengan pengaturan organisasi dan peningkatan kualitas dalam proses pemeriksaan keuangan.
- (2) Bagi praktisi di bidang auditing sebagai sumbangan pemikiran dan acuan pemecahan masalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan akuntansi pada lembaga keuangan syariah.
- (3) Penelitian ini diharapkan akan bisa memberikan masukan bagi lembaga keuangan syariah berkaitan dengan etika yang perlu dimiliki oleh *Top Management* dan *Midle Management* yang bekerja di dalam lembaga keuangan Syariah

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Sebelum membahas teori lebih lanjut, diperlukan kerangka teori sebagai pemahaman awal. Kerangka teori merupakan landasan konseptual yang memberikan arah dan batasan dalam sebuah penelitian. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan teori-teori yang relevan, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang sedang dikaji. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam menyusun kerangka teori adalah *middle theory* atau teori tingkat menengah, yaitu teori yang berada di antara konsep yang sangat abstrak dan teori yang spesifik. *Middle theory* membantu menjelaskan fenomena tertentu dengan cara yang lebih kontekstual dan aplikatif, sehingga memberikan panduan yang relevan dalam penelitian (Merton, 1968). Dengan mengacu pada literatur atau teori yang sudah ada, termasuk *middle theory*, kerangka teori tidak hanya menegaskan dasar ilmiah penelitian tetapi juga memperjelas fokus masalah serta menyediakan pedoman dalam menganalisis data. Dengan demikian, kerangka ini berperan sebagai jembatan antara konsep abstrak, teori operasional, dan pengujian empiris, sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan lebih komprehensif dan bermakna. Teori-teori tersebut terdiri dari beberapa konsep yang saling berhubungan dan dapat digambarkan dalam suatu model. Seperti digambarkan pada gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.1 Kerangka Teori



### 2.1.1. *Shariah Enterprise Theory*

*Shariah enterprise theory* merupakan sebuah teori yang mengajarkan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala merupakan pemilik utama sedangkan manusia hanyalah sebagai pengelola yang diberikan hak oleh pemilik utama yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaitu secara vertikal, dan sesama manusia dan alam semesta yaitu secara horizontal. Selain itu manusia diwajibkan untuk berlaku adil dan mewujudkan keadilan itu sendiri baik terhadap sesama manusia, alam, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala selaku pemilik dunia dan akhirat.

*Shariah Enterprise Theory* merupakan teori yang dikemukakan oleh (Roekhudin et al., 2015), menurutnya tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah mengacu pada akuntabilitas instrumental yang memiliki nilai spiritual secara vertikal dan horizontal yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan manusia serta memberikan informasi dalam bentuk akuntansi. Dalam teori ini juga menggambarkan bentuk pertanggung jawaban sebuah perusahaan (lembaga

keuangan syariah) terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* secara vertikal, dan kepada karyawan, nasabah, dan masyarakat secara horizontal.

Pertanggungjawaban kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam hal ini diartikan sebagai pengoptimalan pemanfaatan sumber daya namun dengan mempertimbangkan aturan-aturan Islam. Kemudian pertanggungjawaban kepada sesama manusia merupakan memberikan kesejahteraan bagi pihak-pihak yang tidak berkontribusi dalam perusahaan (lembaga keuangan syariah) atau menjalin hubungan dengan baik antara pihak yang berkontribusi maupun yang tidak berkontribusi. Yang terakhir merupakan pertanggungjawaban kepada alam, di mana perusahaan (lembaga keuangan syariah) harus menjaga lingkungan agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan.

## **2.2. Variabel Penelitian**

### **2.2.1. *Islamic Corporate Governance***

Islam mempunyai konsep yang jauh lebih lengkap dan lebih komprehensif serta *akhlaqul karimah* dan ketaqwaan pada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. Sejak awal peradaban Islam berkembang, di dalam budaya Islam juga telah tertanam tata kelola perusahaan yang baik. Masyarakat muslim mempunyai pandangan dan nilai berbeda terkait tata kelola perusahaan. Keyakinan yang kuat mengenai akuntabilitas (pertanggungjawaban) kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di dunia maupun di hari akhir, memiliki implikasi yang kuat dalam setiap kehidupan Muslim dan mengatur cakupan yang lebih luas mengenai kewajiban tata kelola perusahaan bila dibandingkan untuk prinsip konvensional. Hal ini dikarenakan ukuran kesuksesan dan kesejahteraan umat muslim berkaitan dengan kewajiban etis, moral dan spiritual berlandaskan keyakinan yang kuat terhadap akuntabilitas (pertanggungjawaban) kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sebagai otoritas tertinggi.

Mansour and Bhatti, (2018) mendefinisikan tata kelola Islami (ICG) merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip Islam. Kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasarkan pada moral dan nilai-nilai syariah.

Tujuan ICG adalah untuk menegakkan kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai *maqasid al-Syariah*. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip ICG dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

*Islamic Corporate Governance* merupakan turunan konsep dari *corporate governance* dan mempunyai tujuan yang sama dengan CG konvensional. Tetapi yang membedakan adalah bahwa *Islamic corporate governance* dilandasi dengan hukum-hukum Islam. Menurut OECD governansi korporat merupakan sarana bagi perusahaan untuk membangun integritas bisnis dan kepercayaan pasar. Hal tersebut sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk dapat mengakses modal ekuitas yang digunakan untuk investasi jangka panjang. Charles dan Chariri menyatakan bahwa *Islamic Corporate Governance* terkait dengan keberadaan Dewan Pengawas Syariah dan komposisi keahlian, dalam proses pengawasan di bank syariah, DPS memiliki peranan penting dikarenakan adanya kewenangan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada pihak manajemen terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan perusahaan. (Kusumawati and Audina, 2020).

Keunggulan utama governansi korporat dalam perspektif Islam yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbasis yang menjamin perlakuan jujur, adil terhadap semua pihak juga menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Governansi korporat dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah maka governansi korporat akan memotivasi transaksi bisnis yang jujur, adil, dan akuntabel. (Prabowo, 2019)

Bank Indonesia menjelaskan bahwa dalam mendorong praktik perbankan syariah yang kuat dan sehat secara finansial dan senantiasa mengacu kepada

prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah diharapkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ICG berupa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kebebasan dan kewajaran juga kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan syariah. Penerapan *Islamic governance* merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah. Penerapannya merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa bank syariah harus dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan para *stakeholder* bank syariah. Implementasi ICG dalam perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan *shariah compliance*.

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad *Shallahu Wa'alaihi Wassalam* tersebut sangat identik dengan spirit GCG yang dikembangkan saat ini. Dalam ajaran Islam, point-point tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip: *'adalah* (keadilan), *tawazun* (keseimbangan), *mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syaria'h), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), *qira'ah* dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan). Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran CG (*Corporate Governance*) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik di dunia. Prinsip-prinsip itu diharapkan dapat menjaga pengelolaan institusi ekonomi dan keuangan syariah secara profesional dan menjaga interaksi ekonomi, bisnis dan sosial berjalan sesuai dengan aturan permainan dan *best practice* yang berlaku.

Prinsip-prinsip governansi korporat konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip governansi korporat islam. Transparansi merujuk pada *shiddiq*, akuntabilitas merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*, *responsibility* merujuk pada *amanah*, *tablig*, dan *fathanah*, *fairness* merujuk pada *shiddiq* dan *amanah*. Hal yang perlu digaris bawahi adalah meskipun prinsip-prinsip *Corporate Governance*

konvensional tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Corporate Governance* bukan berarti keduanya adalah hal yang sama. Karena dasar hukum yang digunakan berbeda maka pelaksanaan dan aplikasinya pun akan berbeda. Berdasarkan perbandingan prinsip-prinsip tersebut, prinsip-prinsip yang digunakan dalam *Islamic Corporate Governance* lebih lengkap apabila dibandingkan dengan *Corporate Governance* konvensional. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam Islam meliputi:

(1) *Transparansi (Shiddiq)*

Transparansi atau keterbukaan berarti keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. (Nasution, 2019) mengatakan bahwa transparansi juga dapat dikatakan sebagai suatu komitmen untuk mengungkapkan secara *shiddiq*, *shiddiq* berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam *corporate governance* secara Islam. Beberapa dasar hukum tentang sifat *shiddiq* ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar”. (QS AI- Tawbah (9) Ayat: 119).

Selain itu, dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

“Hendaklah kalian jujur (benar) karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan ke dalam surga. Seseorang yang selalu berusaha untuk jujur akan dicatat oleh Allah sebagai orang jujur. Dan jauhilah oleh kamu sekalian dusta (kidzib), karena dusta itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Dan kejahatan akan mengantarkan ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berdusta akan dicatat oleh Allah sebagai pendusta” (H.R. Bukhari No. 6094).

Keutamaan sikap jujur dalam bisnis, dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak konsumen. Kepercayaan yang terus kita rawat dapat menjadi kunci sukses dalam sebuah bisnis. Buah dari kejujuran dapat membawa pada kemajuan bisnis. Dengan bersikap jujur kita akan mendapatkan keberkahan yang datang dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. *Corporate governance* dalam Islam menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat *shiddiq* ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, *fair*, tidak ada penipuan serta kedzaliman

## (2) Akuntabilitas (*Amanah*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen harus membuat *job description* yang jelas kepada semua karyawan dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dari sini perusahaan akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggungjawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan. *Corporate Governance* harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

Jika *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab antara pemegang saham dewan komisaris serta direksi. Dengan adanya kejelasan maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturaan kepentingan peran). Amanah Sebagai perilaku yang dapat dipercaya, tidak ingkar janji namun bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan berimplikasi pada investasi, pembiayaan, dan *image* atau reputasi yang baik. Dasar hukum sifat *amanah* yang digunakan dalam *corporate governance* secara Islam adalah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

*Artinya: “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya” (QS Al-Mu’minun (23), Ayat 8)*

### (3) Responsibility/ Tablig

Pertanggungjawaban keuangan perusahaan juga perlu disampaikan dalam bentuk pengungkapan yang jujur dan wajar atas kondisi keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dan *stakeholder* dapat mengambil keputusan yang tepat. Pelaporan keuangan yang benar dan akurat, juga akan menghasilkan keakuratan dalam pembayaran zakat. Karena dari setiap keuntungan yang diperoleh muslim dalam kegiatan bisnisnya, setidaknya ada 2,5% yang menjadi hak kaum fakir miskin. Masalah zakat menjadi penting dalam perspektif Islam karena merupakan ciri diimplementasikannya *Good Corporate Governance*. Pengelolaan perusahaan yang baik tidak hanya bertujuan untuk memakmurkan manajemen dan pemegang saham, tetapi juga masyarakat di sekitar perusahaan tersebut khususnya kaum fakir dan miskin.

*Tablig* berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Hal ini tercantum dalam QS Ali Imran (3) Ayat 110 yang berbunyi:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

*Artinya: “kamu (umat islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”.*

Dengan sikap *tabligh* diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak pada kebenaran. Dalam konteks *corporate governance* secara umum, *tabligh* dapat dikaitkan dengan prinsip *responsibility*.

#### (4) Independensi/ *Huriyah*

Independensi adalah sikap yang beranggapan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan dan memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Pada perbankan syariah harus terbebas dari dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan. Dalam setiap pengambilan keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Prinsip independensi yang dikemukakan oleh KNKG adalah prinsip dimana perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lainnya. Jadi, yang dimaksud adalah tidak adanya pengaruh dari orang lain atau orang dalam perusahaan yang didasarkan pada keinginan pribadi untuk mempengaruhi manajemen perusahaan. Independensi terkait dengan konsisten atau sifat *istiqomah* yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko, sesuai pada Al-Qur'an Surat Fushshilat Ayat 30 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا  
وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Tuhan Kami adalah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka Malaikat-akan turun kepada mereka (dengan berkata), "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan kepadamu"

Al-Qur'an Surat az-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”,

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ

“dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.

#### (5) Fairness/ Tawazun

Prinsip keadilan dalam bersikap. Mekanisme keuangan syari'ah harus mampu mewujudkan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dalam mekanisme keuangan pada bank syari'ah diharapkan dapat menghilangkan dampak *negative spread* atau keuntungan minus. Mekanisme keuangan bank syari'ah juga tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Adil dalam memberikan informasi dengan cara tidak menutupi kelemahan produknya. Pada dasarnya semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas baik di dunia maupun di akhirat. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) Ayat 8 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”

#### (6) Shariah Compliance

Kepatuhan shari'ah secara operasional adalah kepatuhan kepada Fatwa Dewan Shari'ah Nasional (DSN) karena Fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan shari'ah yang harus ditaati dalam perbankan shari'ah. Adapun *shariah compliance* adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip shari'ah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip shari'ah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan shari'ah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam prinsip utama bank syariah tercermin dalam produk-produk yang dihasilkannya bebas bunga dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di bank syariah. Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank syariah terhadap seluruh ketentuan Bank Indonesia. kepatuhan syariah adalah syarat yang mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Secara tegas dinyatakan bahwa kepatuhan syariah adalah *raison deter* bagi institusi tersebut. Kepatuhan syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah.

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah. Kepatuhan syariah tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. Kepatuhan syariah dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.

Bank syariah telah memenuhi kepatuhan pada prinsip-prinsip syari'ah (*shariah compliance*) apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maisir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan *amanah* yang dipercayakan nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan *shadaqah* dengan *amanah*.

### **2.2.2. Accounting Ethics**

*Accounting ethics* adalah serangkaian prinsip moral yang mengarahkan tindakan dan keputusan profesional dalam dunia akuntansi. Sebagai profesi yang berhubungan dengan pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan, akuntansi memiliki peran penting dalam menjaga transparansi dan integritas laporan keuangan. *Accounting Ethics* mencakup berbagai pedoman yang mengatur akuntan agar bertindak dengan kejujuran, objektivitas, dan tanggung jawab sosial, serta menghindari konflik kepentingan dalam setiap langkah pekerjaan mereka (*International Federation of Accountants* [IFAC], 2018). Dalam konteks ini, etika bukan hanya soal mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga tentang menjaga standar moral yang tinggi dalam setiap keputusan yang diambil.

*Accounting Ethics* dipandu oleh beberapa prinsip dasar yang harus diikuti oleh setiap akuntan. Menurut IFAC (2018), prinsip pertama adalah integritas, yang mengharuskan akuntan untuk selalu bertindak dengan kejujuran dan ketulusan dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Prinsip objektivitas menekankan bahwa akuntan harus menghindari segala bentuk bias atau pengaruh yang bisa merusak independensi mereka dalam pengambilan keputusan. Selain itu, kompetensi profesional juga menjadi aspek penting, di mana akuntan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta untuk selalu mengembangkan kompetensinya guna menghindari kesalahan yang bisa merugikan pihak lain. Prinsip kerahasiaan menuntut akuntan untuk menjaga informasi yang diperoleh dalam tugas profesional mereka, kecuali jika pengungkapan tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum atau diizinkan oleh pihak yang berkepentingan (Zhang, 2024)

Kode etik adalah pedoman yang diberikan oleh organisasi profesi akuntansi, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), untuk membimbing anggotanya dalam menjalankan tugas profesional mereka. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan akuntan untuk bertindak sesuai dengan standar moral yang tinggi, menjaga independensi, serta mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam pelaporan keuangan. Di Indonesia, kode etik akuntan yang diterbitkan oleh IAI sangat berpengaruh dalam menjaga integritas profesi akuntansi di tengah tantangan yang ada. Kode etik ini bukan hanya berlaku bagi para akuntan yang berpraktik sebagai auditor, tetapi juga bagi mereka yang bekerja di bidang akuntansi manajerial dan pajak (Ikatan Akuntan Indonesia [IAI], 2011).

Dalam praktiknya, profesional akuntansi sering dihadapkan pada berbagai tantangan etika. Salah satu tantangan terbesar adalah tekanan untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih menguntungkan meskipun kondisi keuangan sebenarnya mungkin tidak mendukung. Dalam beberapa kasus, akuntan yang bekerja untuk perusahaan besar atau klien dengan tujuan tertentu bisa terpengaruh oleh tekanan untuk mengubah laporan keuangan agar lebih menarik bagi investor atau kreditor. Selain itu, konflik kepentingan dapat muncul ketika akuntan harus menghadapi dilema antara kepentingan pribadi dan profesional. Misalnya, seorang akuntan yang juga memiliki hubungan bisnis dengan klien yang diaudit mungkin sulit menjaga objektivitasnya (Boynton et al., 2005). Tantangan lainnya adalah kerahasiaan, di mana akuntan harus membuat keputusan yang hati-hati tentang pengungkapan informasi yang mungkin berguna untuk pihak ketiga, namun bisa melanggar prinsip kerahasiaan yang mereka jaga.

Etika dalam akuntansi juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Ketika akuntan berperilaku etis dan bertanggung jawab, hal ini dapat meningkatkan citra perusahaan dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, seperti investor dan regulator. Praktik akuntansi yang etis dapat mengurangi risiko hukum, serta memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar dan regulasi yang berlaku, seperti yang ditetapkan dalam Sarbanes-Oxley Act di Amerika Serikat atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar

Modal di Indonesia. Selain itu, etika yang baik dalam akuntansi juga dapat mencegah praktik-praktik kecurangan dan manipulasi laporan keuangan, yang dapat merugikan banyak pihak dan merusak reputasi perusahaan (Dechow et al., 1995).

Dimensi *Accounting Ethics* terdiri dari *Accounting Integrity*, *Accounting Objectivity* dan *Professional competence and due care* (Nkuranga and Tarus, 2023)

Adapun penjelasan dimensi *Accounting Ethics* adalah sebagai berikut:

1. Integritas akuntansi merujuk pada kepatuhan terhadap prinsip dan standar etika dalam pelaporan keuangan, yang mencakup kejujuran, akurasi, dan keterbukaan informasi keuangan (Skousen et al., 2009). Pentingnya integritas akuntansi terletak pada kemampuannya untuk memberikan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan relevan, yang memudahkan pengambilan keputusan, mendorong akuntabilitas, dan melindungi dari praktik-praktik kecurangan (Cunningham et al., 2019)
2. Objektivitas akuntansi merujuk pada prinsip bahwa laporan dan pernyataan keuangan harus disusun dengan cara yang netral dan tidak memihak, berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi dan objektif. Prinsip ini memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh bank-bank komersial mencerminkan dengan akurat realitas ekonomi dari transaksi dan operasi mereka, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat (Anthony and Govindarajan, 2007)
3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian adalah dua elemen penting yang harus dimiliki oleh akuntan dalam menjalankan tugas mereka. Kompetensi profesional merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan oleh akuntan untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan efektif dan tepat. Sementara itu, kehati-hatian mengacu pada ketelitian dan perhatian ekstra yang diberikan oleh akuntan dalam setiap tugas yang dikerjakan. Kedua faktor ini sangat berperan dalam memastikan akuntan dapat menjaga kualitas pelaporan keuangan dan mengelola risiko secara efektif, yang pada akhirnya mendukung integritas laporan keuangan dan stabilitas sektor perbankan. Kompetensi profesional yang tinggi dan kehati-hatian yang baik juga menjadi

landasan dalam menciptakan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan transparan dalam dunia perbankan (Skousen et al., 2009).

*Accounting ethics* merupakan fondasi yang sangat penting dalam menjalankan profesi akuntansi. Prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, dan kerahasiaan harus dijaga dengan baik oleh setiap akuntan untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dilakukan dengan benar dan dapat dipercaya. Tantangan etika yang sering dihadapi oleh akuntan, seperti tekanan untuk menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan konflik kepentingan, memerlukan perhatian dan pemahaman yang mendalam mengenai kode etik dan teori etika yang relevan. Dengan mengikuti pedoman etika yang ada, para profesional akuntansi tidak hanya menjaga reputasi dan keberlanjutan perusahaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang transparan dan akuntabel.

### **2.2.3. Internal Control Effectiveness**

Kerangka kerja COSO menjelaskan struktur dan *Internal Control Effectiveness*. Pada tahun 2013, COSO mengembangkan kerangka ini untuk menilai seberapa efektif sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan oleh manajemen. Kerangka ini mencakup tiga kategori tujuan, yaitu Tujuan Operasional, Tujuan Pelaporan, dan Tujuan Kepatuhan. Salah satu cara untuk menilai *Internal Control* (INC) adalah dengan mengukur sejauh mana pengendalian internal diperlukan untuk mencapai ketiga tujuan tersebut, sesuai dengan pandangan COSO. Berdasarkan kerangka COSO, Myllymäki dan Jokipii (2011) mengartikan INC sebagai upaya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa perusahaan menggunakan sumber daya dengan efektif, mematuhi peraturan yang berlaku, dan menyajikan informasi keuangan yang akurat serta dapat dipercaya. Sementara itu, Mulyani dan Arum (2016) menyatakan bahwa INC adalah kemampuan Dewan Manajer untuk mencapai tujuan perusahaan, memahami operasional bisnis, dan mematuhi hukum serta peraturan yang ada.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengukuran INC sering dilakukan dengan memeriksa faktor-faktor kelemahan dalam pengendalian internal

pada perusahaan yang mengungkapkan kewajiban material terkait pengendalian internal atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Seksi 302 dan 404 dari Undang-Undang Sarbanes-Oxley (Altamuro and Beatty, 2010; Rubino and Vitolla, 2014). Selain itu, pengukuran INC juga lebih menekankan pada kesadaran manajemen bisnis tentang pencapaian tujuan pengendalian internal sesuai dengan pandangan COSO, yang semakin banyak dibahas dalam penelitian-penelitian oleh (Lartey et al., 2020). Berdasarkan pandangan tersebut, skala INC dalam penelitian mereka merupakan konstruksi tingkat kedua yang melibatkan tiga konstruksi tingkat pertama: efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Pham et al., 2023).

#### **2.2.4. *Financial Reporting Quality***

Laporan keuangan dapat berkualitas karena adanya sistem akuntansi dan kompetensi staf akuntansi yang berjalan baik. Penyusunan laporan keuangan harus didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan

*Financial Reporting Quality* sebuah perusahaan tergantung dari seberapa besar informasi yang disajikan perusahaan bisa berguna bagi pengguna dan bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangan yang ada berdasarkan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar dan tujuan akuntansi. Baik buruknya kualitas laporan keuangan dapat dilihat dari sehat atau tidak sehatnya perusahaan tersebut. Perusahaan yang sehat akan memiliki laporan keuangan yang berkualitas baik tanpa adanya penyimpangan. Laporan keuangan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Bahri, 2016: 71).

Suwardjono, (2016: 28) menjelaskan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi atau ringkasan dari transaksi keuangan pada suatu perusahaan. Kualitas pelaporan keuangan berkaitan erat dengan kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada tahun berjalan. Pelaporan keuangan dikatakan tinggi atau berkualitas jika laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk laba perusahaan di masa yang akan datang. Kualitas pelaporan keuangan dilihat dari data yang dicatat sehingga membentuk laporan keuangan, setiap aliran transaksi dilakukan pencatatan. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan dicatat dengan komponen laporan keuangan dan standar akuntansi yang benar.

Hans (2016: 71) berpendapat bahwa *Financial Reporting Quality* dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kualitas laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh suatu entitas pelaporan.

Menurut Abed, I.A.; Hussin, N.;Haddad, H.; Almubaydeen, T.H.; Ali,M.A (2022) indikator *Financial Reporting Quality* dapat dilihat dari :

1. Relevan, agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai.
2. Handal, agar bermanfaat informasi juga harus andal (*Reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

3. Dapat dipahami, kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi dan kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
4. Dapat dibandingkan, pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif.

#### **2.2.5. Fraud Prevention**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari pencegahan adalah suatu proses atau upaya untuk menolak atau menahan sesuatu agar tidak terjadi. Pencegahan dilakukan untuk menolak atau menahan sesuatu agar tidak terjadi, biasanya sesuatu tersebut adalah hal yang dapat merugikan sehingga harus dicegah. Sedangkan *Institute of Internal Auditors* (IIA) menyebutkan bahwa kecurangan meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Tindakan tersebut dapat dilakukan untuk keuntungan ataupun kerugian organisasi dan oleh orang-orang di luar maupun di dalam organisasi. Dengan demikian, pencegahan kecurangan adalah suatu upaya atau usaha untuk menghalangi tindakan ilegal yang melawan hukum atau perbuatan curang yang dilakukan pegawai yang berdampak merugikan bagi organisasi. Pencegahan dilakukan agar kecurangan dalam perusahaan tidak terjadi, sehingga tujuan dan sasaran organisasi akan tercapai dan membuat reputasi organisasi menjadi lebih baik.

*Fraud prevention* merupakan segala upaya untuk menangkal pelaku potensial, mempersempit ruang gerak, dan mengidentifikasi kegiatan yang beresiko tinggi terjadinya kecurangan (*fraud*). *Fraud prevention* merupakan aktivitas memerangi *fraud* dengan biaya yang murah. *Fraud Prevention* bisa dianalogikan dengan penyakit, yaitu lebih baik dicegah daripada diobati. Jika menunggu terjadinya *fraud* baru ditangani itu artinya sudah ada kerugian yang terjadi dan telah

dinikmati oleh pihak tertentu, bandingkan bila kita berhasil mencegahnya tentu kerugian belum semuanya beralih ke pelaku *fraud* (Fitrawansyah, 2014:16)

*Association of Certified Fraud Examinations* (ACFE) dalam Amrizal (2004) mengategorikan kecurangan dalam tiga jenis yaitu: (a). Kecurangan Laporan Keuangan diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material. Kecurangan ini dapat berupa *financial* maupun *non-financial*. Kecurangan ini merupakan tindakan yang dilakukan eksekutif dalam organisasi untuk menutupi kondisi laporan keuangan dengan cara melakukan manipulasi dalam penyajian laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan. (b). Penyalahgunaan Aset Penyalahgunaan aset digolongkan menjadi kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya. Kecurangan kas meliputi pencurian kas dan pengeluaran-pengeluaran secara curang sedangkan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya meliputi pencurian dan pemakaian persediaan atau aset lainnya untuk kepentingan pribadi. Kecurangan ini merupakan kecurangan yang paling mudah untuk dideteksi karena sifatnya yang dapat diukur atau dihitung. (c). Korupsi, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan. Kecurangan ini merupakan jenis kecurangan yang paling sulit untuk dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain.

Menurut Wahyuni (2018) *Fraud Prevention* adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecurangan seperti berbohong, menjiplak, mencuri, manipulasi dan menipu orang lain dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok dengan cara melawan hukum yang berlaku. Adapun menurut Mersa et al (2021) menjelaskan bahwa *Fraud Prevention* merupakan bentuk upaya menahan dan menolak segala bentuk perbuatan curang yang dapat merugikan diri sendiri atau perusahaan. Menurut Lestari & Ayu (2021) *Fraud Prevention* adalah usaha untuk mengurangi pemicu timbulnya kecurangan (*fraud*) dan mempersempit peluang timbulnya kesempatan untuk melakukan kecurangan.

*Fraud prevention* sangat diperlukan di setiap perusahaan untuk menghindari kerugian yang berlebih dan dapat menimbulkan rusaknya nama baik institusi ataupun individu, selain itu jika kejadian kecurangan tidak segera diungkap maka

akan memberikan peluang kepada pelaku untuk melakukan kecurangan yang lain (Sudarmanto and Utami, 2021). Adapun menurut Triwahyuni & Prasetyo (2021) *Fraud Prevention* adalah salah satu upaya untuk mencegah pelaku melakukan kecurangan dan mengurangi ruang gerak serta melakukan pemantauan kegiatan-kegiatan yang memiliki resiko besar terjadinya kecurangan (*fraud*).

Dimensi *Fraud Prevention* terdiri dari penetapan kebijakan anti-*fraud*, prosedur pencegahan standar, teknik pengendalian, kepekaan terhadap *fraud* (Lestari and Ayu, 2021). Adapun penjelasan dimensi *Fraud Prevention* adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan anti-*fraud* merupakan kebijakan unit organisasi harus memuat *a high ethical tone* dan harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah tindakan-tindakan *fraud* dan kejahatan ekonomi lainnya (BPKP, 2008).
2. Prosedur pencegahan standar yang pada dasarnya komitmen manajemen dan kebijakan suatu instansi/organisasi merupakan kunci utama dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Namun harus dilengkapi dengan prosedur penanganan pencegahan secara tertulis dan ditetapkan sebagai media pendukung.
3. Pengendalian merupakan sistem yang dirancang dan dilaksanakan kurang baik akan menjadi sumber atau peluang terjadinya kecurangan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan.
4. Dimensi selanjutnya kepekaan terhadap *fraud* yang dapat dicegah apabila organisasi atau instansi memiliki staf yang berpengalaman dan mempunyai "SILA" (*Suspicious, Inquisitive, Logical, Analytical Mind*), sehingga peka terhadap sinyal-sinyal *fraud* (Lestari and Ayu, 2021).

Menurut Donald R. Cressey (1953) dalam Arens, (2008) dalam Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya *fraud* yaitu :

- a. Tekanan, dapat dialami oleh seseorang karena adanya gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain sehingga mengakibatkan seseorang tersebut melakukan kecurangan.
- b. Kesempatan, dapat terjadi karena adanya kelemahan dalam pengendalian internal, kurangnya pengawasan dari manajemen, dan penyalahgunaan

kekuasaan.

- c. Rasionalisasi, merupakan elemen penting dalam kecurangan karena pelaku kecurangan mencari alasan pembenaran atas tindakannya.

Dapat disimpulkan bahwa *Fraud Prevention* adalah suatu upaya untuk mencegah pelaku melakukan kecurangan dan mempersempit peluang pelaku untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan lainnya yang akan merugikan pihak instansi atau individu serta merusak reputasi pihak internal ataupun eksternal. Dengan adanya *Fraud Prevention* dapat meminimalisir kecurangan dan memberikan sinyal-sinyal ketika terjadinya *fraud* yang menyebabkan kerugian terhadap instansi ataupun pribadi.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu banyak yang mengemukakan bahwa studi yang membahas tentang topik penelitian ini. Tinjauan Pustaka yang dijadikan referensi penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
<i>Islamic Corporate Governance terhadap Financial Reporting Quality</i>			
1	Raharjo, Dewayanto (2024)	<i>Corporate Governance, Kualitas Pelaporan Keuangan</i>	mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan,
2	Gardi et al., (2023)	<i>Corporate Governance, Financial Reporting Quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adopsi IFRS memainkan peran mediasi positif dalam hubungan antara tata kelola perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan.</li> </ul>
3	Ajibade et al., (2022)	<i>Corporate Governance, Financial Reporting Quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temuan studi mengungkapkan bahwa adopsi IFRS dan tata kelola Perusahaan secara signifikan memengaruhi representasi pelaporan keuangan Bank Pembangunan Nigeria.</li> <li>Adopsi IFRS dan tata kelola perusahaan secara signifikan memengaruhi representasi dari kualitas pelaporan keuangan di bank pembangunan Nigeria.</li> </ul>
4	Houcine et al., (2022)	<i>Corporate Governance, Financial Reporting Quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>hubungan antara FRQ dan efisiensi investasi meningkat dengan tata kelola perusahaan yang lebih baik dan dengan penerapan IFRS.</li> </ul>
5	Kuraesin and Yadiati, (2021)	<i>Good Corporate Governance, Kualitas Pelaporan Keuangan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Good Corporate Governance</i> Berpengaruh Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan</li> </ul>
6	Nguyen et al., (2021)	<i>Financial Reporting Quality, Corporate Governance</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan keuangan berkualitas tinggi dapat mengurangi risiko khusus perusahaan. hubungan positif antara ukuran dewan dan risiko spesifik perusahaan.</li> </ul>

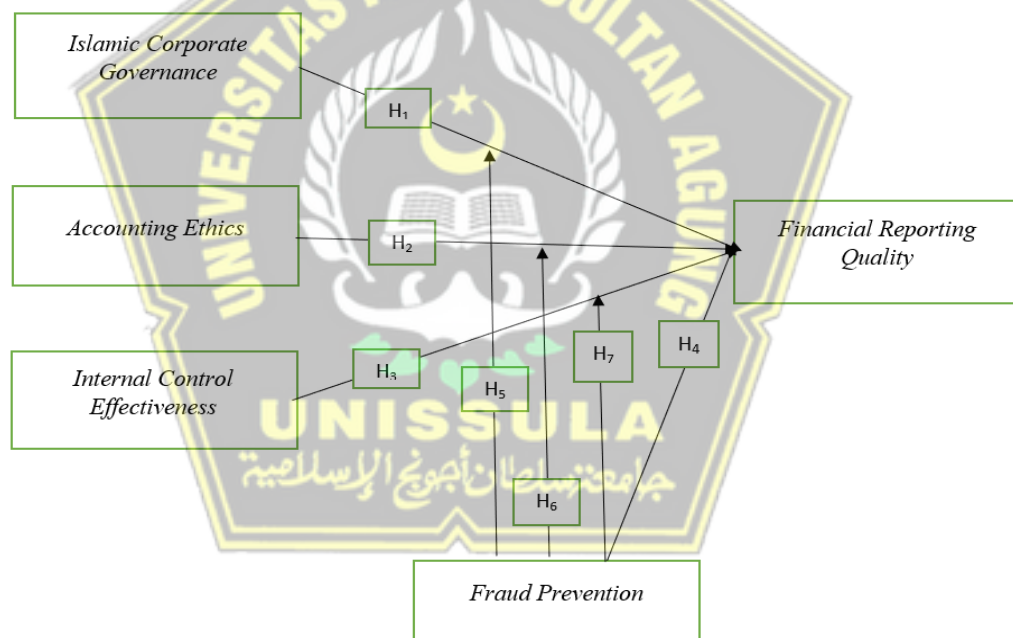
No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
7	Wati et al., (2020)	<i>Corporate Governance, Financial Reporting Quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengaruh koneksi politik dapat berkontribusi pada lemahnya tata kelola perusahaan dan berkontribusi pada rendahnya kualitas pelaporan keuangan.</li> </ul>
<i>Accounting Ethics terhadap Financial Reporting Quality</i>			
8	Koufie et al., (2024)	<i>Ethical accounting practices, Financial reporting quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>terdapat hubungan positif yang signifikan antara praktik akuntansi etis dan kualitas pelaporan keuangan</li> </ul>
9	Nkuranga and Tarus, (2023)	<i>Accounting Ethics, Quality Financial Reporting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap kualitas pelaporan keuangan</li> </ul>
10	Osunwole et al., (2020)	<i>Accounting Ethics, Quality of Financial Reports</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika Akuntansi Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan</li> </ul>
11	Yanti (2019)	Etika Kepemimpinan, Kualitas Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>etika kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan</li> </ul>
12	Mubaraq et al., (2019)	<i>Ethical accounting practices, Financial reporting quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika Akuntansi memiliki hubungan signifikan yang positif dengan kualitas pelaporan keuangan</li> </ul>
13	Osayantinaifu wa et al., (2018)	<i>Ethical accounting practices, Financial reporting quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etika akuntansi memiliki hubungan yang signifikan dengan kualitas pelaporan keuangan.</li> </ul>
<i>Internal control effectiveness terhadap kualitas pelaporan keuangan</i>			
14	Pham et al., (2023)	<i>Internal control effectiveness, financial reporting quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>efektivitas pengendalian internal, memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan</li> </ul>
15	Dashtbayaz et al., (2019).	<i>Internal control, Financial Reporting Quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kelemahan dalam pengendalian internal memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kualitas laporan keuangan</li> </ul>
16	Hidayah, (2019).	<i>Internal Control Implementation, Financial Reporting Quality</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penerapan pengendalian internal memengaruhi kualitas laporan keuangan</li> </ul>
17	Rinie et al., (2019)	Pengendalian Internal, Kualitas Pelaporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan</li> </ul>
<i>Fraud prevention terhadap Financial Reporting Quality</i>			
18	Budiman et al., (2022)	<i>Fraud prevention, Quality of Financial Statement</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan kecurangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan keuangan</li> </ul>
19	Christinawati and Setiyawati, (2022)	<i>Good Corporate Governance, Fraud Prevention, Quality of Financial Report</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prinsip <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> dan juga kualitas laporan keuangan.</li> <li>Pencegahan <i>Fraud</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</li> </ul>
20	Umar et al., (2019)	<i>Fraud Prevention, Quality of local government financial report</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan kecurangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.</li> <li>pencegahan kecurangan memiliki dampak yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan lokal.</li> </ul>
21	Rahmatika, (2016)	<i>Level of Fraud, Quality of Financial Reporting</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat kecurangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.</li> </ul>

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
22	Noholo, (2021)	Pencegahan <i>Fraud</i> , Kualitas Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan <i>Fraud</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah</li> </ul>

## 2.4. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka Pemikiran merupakan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Accounting Ethics* (AE), *Internal control effectiveness* (ICE) terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) dengan *Fraud prevention* (FP) sebagai variabel moderating. Dari masing-masing variabel memiliki pengaruh yang penting dan dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.2

### Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan :

ICG = *Islamic Corporate Governance* ; AE = *Accounting Ethics* ; INC = *Internal Control Effectiveness*; FRQ = *Financial Reporting Quality*; FP = *Fraud Prevention*

## 2.4.2. Pengembangan Hipotesis

Dengan adanya hasil dari penelitian terdahulu maka peneliti akan mengajukan beberapa hipotesis. Penelitian ini memiliki beberapa hipotesis dari beberapa variabel yang diteliti yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Accounting Ethics* (AE), *Internal control effectiveness* (INC), *Fraud prevention* (FP), dan *Financial Reporting Quality* (FRQ).

### 2.4.2.1. Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality*

Di dalam *shariah enterprise theory*, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi menjadi dua, yaitu tanggungjawab entitas secara vertikal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yaitu tunduk kepada ketetapan syariah. Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Apabila entitas patuh dan melakukan segala sesuatu yang diterima, diproses dan didistribusikan secara halal, maka disebut akuntabilitas kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* secara primer. Dan akuntabilitas kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* secara sekunder, apabila entitas melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan dengan bebas riba secara materi (Anwari and Dzikrulloh, 2023).

*Corporate Governance* mempunyai peran yang penting hampir di semua lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah. Aspek kesesuaian dengan syariah merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Untuk itu, *financial reporting quality* pada lembaga keuangan syariah juga harus sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku, dimana peran dewan pengawas syariah merupakan salah satu point yang sangat penting bagi terjadinya praktik di lembaga keuangan syariah. Bila dewan pengawas syariah benar-benar menjalankan wewenang dan kewajibannya (peran) bisa dipastikan bahwa *financial reporting* yang terjadi adalah *financial report* yang berkualitas dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rini, 2014) tentang Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran Dewan Pengawas Syariah, dan *internal control*

*effectiveness* Atas *financial reporting* Terhadap *financial reporting quality*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran Komite Audit, peran Dewan Pengawas Syariah dan Efektifitas Pengendalian Internal atas *financial reporting* berpengaruh secara simultan terhadap *financial reporting quality*. *Financial reporting quality* Di Badan Usaha Milik Negara dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance* (Kuraesin and Yadiati, 2021). Penelitian (Kaawaase et al., 2021) di Institusi Keuangan Negara Uganda dan (Ajibade et al., 2022) pada Bank Pembangunan Nigeria juga menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan secara signifikan mempengaruhi *financial reporting quality*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mendapatkan hipotesa sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>** Terdapat pengaruh positif *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality*

#### **2.4.2.2. Pengaruh *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality***

*Accounting ethics* memainkan peran krusial dalam meningkatkan *financial reporting quality*, terutama dalam sektor perbankan komersial yang menuntut transparansi, keandalan, dan akuntabilitas. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik akuntansi yang etis memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Huang, Lin, dan Yan (2020) menemukan bahwa integritas akuntansi meningkatkan transparansi dan keandalan pelaporan keuangan di bank-bank di Tiongkok. Hasil serupa diperoleh oleh Abdullah, Razak, dan Sulaiman (2019) di Malaysia, serta Mabil (2019) di Sudan Selatan, yang menyatakan bahwa integritas, sebagai bagian dari *Accounting ethics*, berkontribusi positif terhadap *financial reporting quality*. Dimensi lain dari *Accounting ethics* seperti objektivitas, konservatisme, dan verifikasiabilitas juga terbukti memperkuat kualitas laporan, sebagaimana ditunjukkan oleh Elsayed dan Ismail (2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Osunwole et al. (2020) semakin menguatkan hubungan ini, dengan membuktikan bahwa *Accounting ethics* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial reporting quality*. Senada dengan itu, Nkuranga dan Tarus (2023) membuktikan bahwa praktik akuntansi yang etis meningkatkan kualitas pelaporan di bank-bank komersial di Rwanda, sementara Mubaraq et al. (2019) juga menemukan pengaruh serupa di perusahaan manufaktur di Nigeria.

Terbaru, Koufie et al. (2024) menyimpulkan adanya hubungan positif dan signifikan antara praktik *Accounting ethics* dan *financial reporting quality*.

Temuan-temuan ini selaras dengan *Shariah Enterprise Theory (SET)* yang menekankan pentingnya nilai-nilai etis, seperti kejujuran (*siddiq*), amanah, dan tanggung jawab sosial, dalam praktik bisnis dan pelaporan keuangan. Dalam perspektif SET, *financial reporting quality* tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik modal, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat dan Tuhan sebagai pemilik hakikat dari sumber daya. Oleh karena itu, *Accounting ethics* menjadi fondasi moral dalam penyusunan *financial reporting* yang berkualitas, karena memastikan bahwa laporan tersebut disusun secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara syariah maupun profesional. Berdasarkan paparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>2</sub>** Terdapat pengaruh positif *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality*

#### **2.4.2.3. Pengaruh *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality***

*Internal control effectiveness* merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan *financial reporting quality*. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif mampu mengurangi ketidakpastian informasi, mencegah tindakan oportunistik, serta meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan. Doyle et al. (2007) dan Lari Dashtbayaz et al. (2019) menyatakan bahwa kelemahan dalam *Internal control* berhubungan langsung dengan rendahnya *financial reporting quality*. Elbannan (2009) juga menekankan bahwa perusahaan dengan *Internal control* yang tidak efektif cenderung memiliki laporan keuangan yang tidak akurat dan tidak dapat diandalkan. Temuan ini diperkuat oleh Clinton et al. (2014) yang menunjukkan bahwa kelemahan material dalam *Internal control* berkontribusi terhadap rendahnya ketepatan prediksi analisis dan tingginya dispersi estimasi.

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa regulasi dan penerapan sistem *Internal control* yang ketat mampu membatasi perilaku oportunistik manajemen

serta meningkatkan akurasi pelaporan. Oh et al. (2014) membuktikan bahwa penguatan regulasi *Internal control* di Korea dapat menekan akrual diskresioner dan meningkatkan *financial reporting quality*. Senada dengan itu, Krishnan et al. (2020) menyimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan *Internal control* dalam Sarbanes-Oxley Act (SOX) berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *financial reporting quality* perusahaan di Amerika Serikat. Lebih lanjut, Phornlaphatrachakorn (2019) menegaskan bahwa *Internal control effectiveness* merupakan salah satu determinan utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan bebas dari manipulasi. Sementara itu, Agbenyo et al. (2018) menyoroti pentingnya komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan sistem *Internal control* demi terciptanya *financial reporting* yang berkualitas.

Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory (SET)*, *Internal control effectiveness* bukan sekadar instrumen teknis untuk mengurangi asimetri informasi, tetapi juga merupakan manifestasi tanggung jawab amanah (*trusteeship*) yang diemban oleh manajemen terhadap pemilik sumber daya, masyarakat, dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sistem *Internal control* yang efektif mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, yang menjadi inti dalam mewujudkan *financial reporting* yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga bernilai etis dan spiritual. Oleh karena itu, *Internal control* dalam konteks SET dipandang sebagai upaya penguatan *hisbah* atau mekanisme pengawasan internal untuk menjamin bahwa *financial reporting* tidak merugikan hak-hak *stakeholder*, serta sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *internal control effectiveness* memainkan peran signifikan dalam mendukung *financial reporting quality*, baik dari sisi profesionalisme manajemen maupun dalam perspektif moral-spiritual menurut *Shariah Enterprise Theory*. Berdasarkan tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>3</sub>** Terdapat pengaruh positif *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*

#### 2.4.2.4 Pengaruh *Fraud Prevention* terhadap *Financial Reporting Quality*

Upaya pencegahan kecurangan (*fraud prevention*) merupakan langkah krusial dalam menjaga integritas informasi keuangan sebuah organisasi. Secara teoretis, sistem pencegahan yang kuat akan meminimalisir peluang terjadinya manipulasi data, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Hubungan positif ini didukung oleh penelitian Budiman et al. (2022) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Senada dengan hal tersebut, Noholo (2021) juga menemukan bahwa *fraud prevention* memberikan dampak positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya pada sektor pemerintahan.

Selain sistem kontrol internal, penerapan prinsip tata kelola yang baik juga menjadi pilar utama dalam menekan risiko kecurangan. Christinawati dan Setiyawati (2022) menjelaskan bahwa prinsip *good corporate governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan, tidak hanya terhadap pencegahan fraud itu sendiri, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini diperkuat oleh temuan Umar et al. (2019) yang menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan memiliki dampak yang signifikan dan bahkan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap kualitas laporan keuangan di tingkat pemerintah lokal.

Sebaliknya, kegagalan dalam mencegah kecurangan akan berimplikasi buruk terhadap kredibilitas pelaporan. Tingkat kecurangan yang tinggi cenderung merusak transparansi dan akurasi informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Hal ini sejalan dengan penelitian Rahmatika (2016) yang mengungkapkan bahwa tingkat kecurangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, semakin efektif mekanisme pencegahan yang diterapkan, maka risiko distorsi informasi akibat kecurangan dapat ditekan, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Ditinjau dari perspektif *Shariah Enterprise Theory* (SET), pencegahan kecurangan bukan sekadar kewajiban manajerial, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* (*vertical accountability*)

dan kepada manusia serta alam (*horizontal accountability*). SET menekankan bahwa entitas harus mendistribusikan amanah dan kemaslahatan secara adil kepada seluruh pemangku kepentingan. Dengan menerapkan *fraud prevention* yang efektif, entitas memastikan bahwa laporan keuangan bebas dari unsur kebatilan dan manipulasi, sehingga kualitas informasi yang dihasilkan memenuhi prinsip kejujuran (*shiddiq*) dan amanah. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini merumuskan bahwa upaya pencegahan kecurangan akan mendorong terciptanya kualitas laporan keuangan yang lebih baik demi mencapai keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat. Berdasarkan tinjauan literatur di atas, maka peneliti mengusulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>4</sub>** Terdapat pengaruh positif *Fraud Prevention* terhadap *Financial Reporting Quality*

#### **2.4.2.5. Pengaruh *Fraud Prevention* memoderasi Pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality***

Dalam kerangka keuangan syariah, *Islamic Corporate Governance* (ICG) merupakan sistem tata kelola yang tidak hanya menekankan aspek kepatuhan formal terhadap peraturan, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab, dan keadilan. *Shariah Enterprise Theory* (SET) memandang ICG sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual yang mengarah pada akuntabilitas tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat luas dan Allah SWT. Oleh karena itu, implementasi ICG harus didukung oleh sistem *fraud prevention* yang efektif agar dapat memastikan integritas *financial reporting quality*.

*Fraud prevention* merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga *financial reporting quality* karena berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan atau manipulasi informasi. Dalam konteks ICG, *fraud prevention* dapat diwujudkan melalui penguatan audit internal, peningkatan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, serta penerapan prinsip-prinsip Islam yang melarang segala bentuk penipuan dan ketidakadilan. Seperti yang dijelaskan oleh DeLorenzo (2010), pengawasan syariah adalah proses penting dalam memastikan seluruh aktivitas keuangan mematuhi prinsip-prinsip Islam,

termasuk dalam *financial reporting*.

Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa *fraud prevention* berpengaruh positif terhadap *financial reporting quality*. Umar et al. (2019) menunjukkan bahwa praktik *fraud prevention* secara signifikan meningkatkan *financial reporting quality* dan memperkuat kepercayaan pengguna *financial report*. Penelitian serupa dilakukan oleh Noholo (2021), yang menemukan bahwa semakin efektif tindakan *fraud prevention* dalam pengelolaan keuangan sektor publik, maka semakin tinggi *financial reporting quality* yang dihasilkan. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa *fraud prevention* tidak hanya berdampak langsung pada kualitas laporan, tetapi juga berperan sebagai faktor yang memperkuat efektivitas tata kelola berbasis Islam.

Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*, *fraud prevention* bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan bagian dari upaya menjaga amanah, mencegah kerusakan (*fasad*), dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, *fraud prevention* mendukung prinsip *maqashid syariah* khususnya dalam menjaga harta dan melindungi hak-hak masyarakat serta memperkuat integritas *financial reporting* sebagai bagian dari pertanggungjawaban spiritual. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>5</sub>** *Fraud Prevention* memperkuat pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality*

#### **2.4.2.6. *Fraud Prevention* memoderasi Pengaruh *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality***

*Accounting ethics* merupakan landasan moral dalam praktik *financial reporting* yang mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas, dan kejujuran. Dalam konteks *financial reporting quality*, keberadaan *accounting ethics* sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak hanya sesuai standar teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral yang dapat dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan. Namun, efektivitas *accounting ethics* dalam meningkatkan *financial reporting quality* sangat bergantung pada adanya sistem pengawasan dan *fraud prevention* yang berjalan dengan baik.

*Fraud prevention* bertindak sebagai mekanisme pendukung yang memperkuat pengaruh etika terhadap *financial reporting quality*. Ketika organisasi menerapkan sistem *fraud prevention* yang efektif, nilai-nilai etis yang dianut oleh sumber daya manusia akan lebih terjaga dan termanifestasi dalam *financial reporting* yang jujur dan transparan. Hal ini diperkuat oleh Rosyida (2017) yang menemukan bahwa etika sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial reporting quality*. Renanda dan Jamilus (2024) juga menekankan bahwa SDM yang etis dan inovatif mampu menghasilkan nilai-nilai yang tidak hanya kompetitif tetapi juga berkelanjutan dalam *financial reporting*.

Dalam studi yang lebih spesifik, *fraud prevention* terbukti mendukung peningkatan *financial reporting quality*. Lou dan Wang (2011) menemukan bahwa adanya langkah-langkah *fraud prevention* meningkatkan legitimasi dan keandalan laporan keuangan. Albrecht et al. (2012) menegaskan bahwa *fraud prevention* secara langsung berkorelasi dengan kepercayaan terhadap isi *financial report*. Penelitian Budiman et al. (2022) juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan *fraud prevention* terhadap *financial reporting quality*. Sementara itu, Christinawati dan Setiyawati (2022) menyatakan bahwa *fraud prevention* tidak hanya berkontribusi langsung terhadap *financial reporting quality*, tetapi juga memperkuat pengaruh variabel lain yang bersifat etis dan manajerial.

Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*, pelaporan keuangan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemilik modal, tetapi juga untuk memenuhi amanah dan pertanggungjawaban kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan masyarakat sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Dengan demikian, *accounting ethics* dan *fraud prevention* menjadi dua elemen penting dalam menjaga integritas pelaporan keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Accounting ethics* mencerminkan kejujuran (*siddiq*) dan tanggung jawab, sementara *fraud prevention* menjadi bagian dari hisbah pengawasan internal yang mencegah kerusakan (*fasad*) dan menjaga keadilan dalam muamalah keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H<sub>6</sub>** *Fraud Prevention* memperkuat pengaruh *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality*

#### **2.4.2.7. *Fraud Prevention* memoderasi Pengaruh *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality***

*Internal control effectiveness* merupakan elemen penting dalam menjaga akurasi, keandalan, dan kepatuhan dalam *financial reporting*. Sistem *Internal control* yang baik memastikan bahwa *financial reporting* disusun berdasarkan prosedur yang benar, sesuai standar, dan bebas dari kesalahan material. Namun demikian, pengaruh positif dari *Internal control effectiveness* terhadap *financial reporting quality* dapat diperkuat melalui adanya mekanisme *fraud prevention* yang berfungsi sebagai lapisan pengawasan tambahan dalam organisasi.

*Fraud prevention* dirancang untuk mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan dalam proses pelaporan keuangan, sehingga mampu menambah efektivitas sistem *Internal control* yang sudah ada. Penelitian oleh Akinbuli, Adegbe, dan Akinboade (2020) menunjukkan bahwa organisasi dengan kebijakan anti-penipuan dan sistem deteksi kecurangan yang kuat memiliki *Internal control* yang lebih efektif, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan *financial reporting quality*. Temuan ini diperkuat oleh Pati dan Lakshmi (2021), yang menemukan bahwa *fraud prevention* dapat memperkuat hubungan antara *Internal control effectiveness* dan *financial reporting quality* dengan mendeteksi penyimpangan lebih dini. Selain itu, studi Kumar, Jain, dan Rani (2019) menyatakan bahwa *internal control effectiveness* lebih optimal di organisasi yang telah menerapkan sistem *fraud prevention* secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena sistem tersebut memungkinkan deteksi dini dan tindakan korektif terhadap potensi penyimpangan yang bisa mempengaruhi keandalan laporan.

Selanjutnya, Albrecht et al. (2020) menegaskan bahwa *fraud prevention* yang kuat mampu secara signifikan mengurangi risiko manipulasi *financial reporting*. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih terkendali, terawasi, dan transparan, sehingga mendukung *Internal control* dalam menghasilkan *financial reporting* yang berkualitas. Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*, *fraud prevention* memiliki makna yang lebih mendalam dari sekadar fungsi teknis. Dalam pandangan ini, menjaga keandalan pelaporan keuangan merupakan bentuk amanah yang wajib dijaga oleh manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab vertikal

kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan tanggung jawab horizontal kepada masyarakat. Sistem *Internal control* yang dilengkapi dengan *fraud prevention* mencerminkan nilai hisbah, yaitu sistem pengawasan internal Islami yang bertujuan mencegah *fasad* (kerusakan) dan menjaga keadilan dalam aktivitas ekonomi. Maka, *fraud prevention* bukan hanya mekanisme pengawasan, tetapi juga merupakan ekspresi dari nilai-nilai *maqashid syariah*, seperti menjaga harta dan mendorong transparansi serta kejujuran dalam pelaporan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H<sub>7</sub>** *Fraud Prevention* memperkuat pengaruh positif *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Tujuan Penelitian untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh *Islamic corporate governance, accounting ethics* dan *internal control effectiveness* terhadap *financial reporting quality*, serta *Fraud Prevention* memoderasi *islamic corporate governance, accounting ethics* dan *internal control effectiveness* terhadap *financial reporting quality*. Metode penelitian kuantitatif menggunakan data primer yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

##### **3.2.1 Populasi Penelitian**

Populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari subjek atau obyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Lembaga yang menggunakan Full Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdiri dari Perbankan Syariah, Multifinance Syariah, Asuransi Syariah baik Asuransi Umum maupun Asuransi Jiwa. Lembaga keuangan tersebut terdaftar di OJK sebanyak 288 lembaga keuangan syariah.

##### **3.2.2 Sampel Penelitian**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2022). Penelitian ini menggunakan metode *Non-Probability Sampling* dengan teknik *Purposive Sampling*. Peneliti menetapkan kriteria sampel adalah individu mewakili lembaga yang menduduki posisi strategis (*Top Management* dan *Middle Management*) seperti *Manager, General Manager, Durektur* atau *Direktur* utama. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa responden memiliki pemahaman komprehensif dan otoritas terkait kebijakan tata

kelola, sistem pengendalian, dan etika akuntansi di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi objek penelitian. Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan Hair (2014) yakni penjumlahan dari indikator tertinggi dari setiap variabel dikali 5 (lima) sehingga pada penelitian ini ditemukan variabel *islamic corporate governance* memiliki nilai tertinggi 5 (lima) indikator, variabel *accounting ethics* memiliki nilai tertinggi 7 (tujuh), variabel *internal control effectiveness* memiliki nilai tertinggi 4 (empat), variabel *financial reporting quality* memiliki nilai tertinggi 5 (lima), serta variabel *Fraud Prevention* memiliki nilai tertinggi 4 (empat). Berdasarkan penjumlahan nilai tertinggi ditemukan jumlah nilai tertinggi dari seluruh variabel dalam penelitian ini yakni 25. Sehingga Jumlah sampel penelitian ini adalah  $25 \times 5$  (lima) yaitu 125 sampel penelitian.

Kualifikasi atau demografi responden yang akan ditampilkan pada kuesioner peneliti yaitu responden yang mengisi kuesioner merupakan profesional yang berada pada level *Top Management* dan *Middle Management*. Selanjutnya kuesioner yang diperoleh dan kemudian menjadi sampel penelitian adalah seluruh kuesioner yang diterima kembali setelah terisi oleh responden.

Pertimbangan menggunakan *Top Management* dan *Middle Management* sebagai responden, karena dianggap mengerti dan memahami audit dan pengambil kebijakan, selain itu memiliki pemahaman tentang *corporate governance*, hal ini juga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan audit dalam pekerjaannya pada lembaga dimana mereka bekerja dan memiliki kewenangan dalam membuat regulasi tentang *Accounting Ethics* di tempat kerja. Karena menggunakan unit analisis lembaga, data yang dihasilkan adalah data primer yang selanjutnya akan digunakan dalam analisis di penelitian ini. Pada penelitian ini untuk mengukur suatu pertanyaan maupun pernyataan adalah dengan menggunakan skala Likert.

### **3.3. Sumber dan Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dengan populasi penelitian adalah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK. Penelitian akan dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden yang memiliki pemahaman terkait audit dan pengambil kebijakan, selain itu memiliki

pemahaman tentang *corporate governance*, hal ini juga memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan audit dalam pekerjaannya pada perusahaan dimana mereka bekerja dan memiliki kewenangan dalam membuat regulasi tentang etika di tempat kerja di Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi unit analisis dari penelitian.

Sumber data responden di peroleh dari *company profile* perusahaan, kemudian peneliti mengirimkan permohonan data responden yang dijadikan penelitian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, selanjutnya peneliti mengirimkan email kepada responden berupa link google form kuesioner yang telah disiapkan kepada responden ke media yang telah peneliti jabarkan sebelumnya. Kuesioner yang disebarakan melalui media elektronik diantaranya menggunakan *networking* peneliti baik melalui media sosial berupa *Linked In*, *facebook*, *instagram*, *twitter*, *email* pribadi responden dan *direct chat* pada aplikasi *WhatsApp* dimana responden tersebut merupakan referensi dari pihak ketiga dan *networking* peneliti dan juga permohonan langsung melalui email institusi tempat responden bekerja pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

### **3.4. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, dilakukan penyebaran kuesioner kepada *Top Management* dan *Middle Management*. Karena menggunakan unit analisis lembaga, data yang dihasilkan adalah data primer yang selanjutnya akan digunakan dalam analisis di penelitian ini. Pada penelitian ini untuk mengukur suatu pertanyaan maupun pernyataan adalah dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert yaitu untuk mengukur pendapat, sikap, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2016). Di dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Likert 4 dimana 1 untuk nilai terendah yaitu sangat tidak setuju dan 4 untuk nilai tertinggi yaitu sangat setuju. Skala yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1  
Skor Penilaian Kuesioner

No	Kategori	Singkatan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	STS	1
2	Tidak Setuju (TS)	TS	2
3	Setuju (S)	S	3
4	Sangat Setuju (ST)	ST	4

Sumber: Sugiyono (2009:86)

Meskipun pada umumnya skala Likert menggunakan skala lima, namun mengutip dari beberapa pendapat dalam (Aswad et al., 2018) peneliti dapat mempertimbangkan untuk menetapkan hanya terdapat empat *alternative* jawaban dengan tujuan menghilangkan poin tengah (netral) untuk mengeliminasi responden untuk tidak memilih skala netral atau dan dengan mengeluarkan skor 3 (netral) dalam mengukur sikap yang akan memberikan hasil yang lebih *reliabel*.

### 3.5. Variabel dan Pengukuran/indikator Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1. Variabel Independen

##### a. *Islamic Corporate Governance*

(Mansour and Bhatti, 2018) menjelaskan *Islamic corporate governance* dalam Islam adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan *epistemology* sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketentuan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Adapun dimensi dan indikator dari *Islamic corporate governance* menggunakan (Maysharoh et al., 2024, Karbhari et al., 2020) yang terdiri dari 6 (enam) dimensi yakni dimensi pertama transparansi/ Keterbukaan (*Shiddiq*) dengan 3 (tiga) indikator. Dimensi kedua Akuntabilitas (*Amanah*) dengan 4 (empat) indikator. Dimensi ketiga *responsibility*/pertanggungjawaban (*Tabliq*) memiliki 3 (tiga) indikator. Dimensi berikutnya yakni dimensi keempat yakni

dimensi Indenpendensi/ Kemandirian (*Huriyah*) dengan 2 (dua) indikator dan yang kelima yakni dimensi *Fairness/Kesetaraan (Tawazun)* dengan 3 (tiga) indikator. Serta yang terakhir dimensi keenam yakni *Shariah Compliance (Prinsip Prinsip Syariah)* dengan 5 (lima) indikator.

#### **b. Accounting Ethics**

*Accounting ethics* merujuk pada seperangkat prinsip dan norma yang mengarahkan perilaku profesional akuntan dalam melaksanakan tugasnya, dengan tujuan untuk memastikan keadilan, transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pelaporan informasi keuangan. Prinsip etika ini mencakup beberapa aspek, seperti integritas (kebenaran dan kejujuran dalam pelaporan), objektivitas (kebebasan dari konflik kepentingan), kerahasiaan (menjaga informasi yang tidak untuk disebarluaskan), dan perilaku profesional yang sejalan dengan standar etika yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntansi (*International Federation of Accountants*, 2020). Adapun dimensi dan indikator dari *Accounting Ethics* menggunakan Nkuranga and Tarus, (2023) yang terdiri dari tiga dimensi yakni dimensi pertama *Accounting Integrity* dengan 7 (tujuh) indikator. Dimensi kedua *Accounting Objectivity* dengan 6 (enam) indikator. Serta yang terakhir dimensi *Professional competence and due care* dengan 7 (tujuh) indikator.

#### **c. Internal Control Effectiveness**

*Internal Control Effectiveness* menjelaskan sejauh mana sistem *Internal Control* di suatu organisasi mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, termasuk efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. *Internal Control* yang efektif dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan, serta memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dapat diandalkan dan akurat (Länsiluoto et al., 2016). Pada penelitian ini variabel *Internal Control Effectiveness* menggunakan dimensi dan indikator yang dikembangkan oleh (Pham et al., 2023) yang terdiri dari dimensi pertama Efektivitas dan Efisiensi Operasi dengan 4 (empat) indikator. Dimensi kedua yakni Keandalan Laporan Keuangan memiliki 4 (empat) indikator, dan dimensi ketiga yakni Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan dengan 4 (empat) indikator.

### 3.5.2. Variabel Dependent

#### a. *Financial Reporting Quality*

*Financial reporting quality* sebagai akurasi penyampaian informasi berkualitas yang dilakukan oleh suatu entitas tentang hasil operasi perusahaan untuk digunakan oleh pengguna sebagai pengambil keputusan (Rahmatika, 2016). Dimensi dan Indikator dari *financial reporting quality* berdasarkan Abed et al., (2022) yakni dimensi pertama *Relevance*. Dimensi kedua yakni *Faithful Representation*. Dimensi ketiga yakni *Understandability* dan dimensi keempat *Comparability* yang masing–masing 5 (lima) indikator.

### 3.5.3. Variabel Moderasi

#### a. *Fraud Prevention*

*Fraud Prevention* adalah upaya yang dilakukan dalam suatu hal untuk menekan terjadinya suatu tindakan yang dapat menyebabkan kecurangan (*fraud*) dan memperkecil peluang seseorang untuk melakukan kecurangan (Lestari and P.C, 2021). Sedangkan menurut (Faisal et al., 2023) *Fraud Prevention* adalah suatu bentuk upaya berupa tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecurangan seperti berbohong, menjiplak, mencuri, manipulasi dan menipu orang lain dengan maksud dan tujuan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok dengan cara melawan hukum yang berlaku. Pada variabel *Fraud Prevention* diukur dengan 4 (empat) dimensi yaitu penetapan kebijakan anti-*fraud*, prosedur pencegahan standar, teknik pengendalian dan sensitivitas terhadap *fraud* (Melindawati et al., 2023).

Berikut ini akan ditampilkan tabel operasional variabel dalam penelitian ini. Variabel tersebut terdiri dari variabel dependen *Financial Reporting Quality* (FRQ), variabel independen *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Accounting Ethics* (AE) dan *Internal Control Effectiveness* (INC). Pada tabel berikut juga terdapat operasional variabel untuk variabel moderasi *Fraud Prevention* (FP):

**Tabel 3.2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

<b>Variabel Dependen</b>		
Variabel	Dimensi	Indikator
<p><b>Financial Reporting Quality (FRQ)</b></p> <p>Abed, I.A.; Hussin, N.; Haddad, H.; Almubaydeen, T.H.; Ali, M.A (2022)</p>	<i>Relevance</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan tahunan mengungkapkan informasi berwawasan ke depan mengenai Lembaga Keuangan tersebut.</li> <li>2. Bank menggunakan nilai wajar dan bukan <i>preseden historis</i>.</li> <li>3. Biaya dalam menyiapkan laporan keuangan.</li> <li>4. Pernyataan transparan membantu pengembangan ekspektasi dan prediksi pengguna mengenai masa depan lembaga keuangan syariah.</li> <li>5. Adanya informasi non-keuangan dalam hal peluang dan risiko usaha melengkapi informasi keuangan.</li> </ol>
	<i>Faithful Representation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan tahunan menyoroti peristiwa positif dan negatif secara seimbang mendiskusikan hasil tahunan.</li> <li>2. Prinsip-prinsip akuntansi diikuti dengan ketat di lembaga keuangan syariah kami.</li> <li>3. Laporan tahunan ini secara luas mengungkapkan informasi mengenai isu-isu tata kelola perusahaan.</li> <li>4. Laporan tahunan memuat keterbukaan mengenai permasalahan lingkungan hidup.</li> <li>5. Laporan tahunan menjelaskan pilihan akuntansi.</li> </ol>
	<i>Understandability</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejauh mana laporan tahunan disusun dengan baik.</li> <li>2. Catatan atas laporan keuangan jelas.</li> <li>3. Penggunaan bahasa dan jargon teknis mudah diikuti dalam laporan tahunan.</li> <li>4. Laporan tahunan mencakup glosarium yang komprehensif.</li> <li>5. Penggunaan grafik dan tabel dalam laporan keuangan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.</li> </ol>
	<i>Comparability</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan atas revisi estimasi dan pertimbangan akuntansi menjelaskan implikasi dari revisi tersebut.</li> <li>2. Hasil periode akuntansi saat ini dibandingkan dengan hasil periode akuntansi sebelumnya.</li> <li>3. Informasi dalam laporan tahunan sebanding dengan informasi yang diberikan oleh organisasi lainnya.</li> <li>4. Laporan tahunan menyajikan angka dan rasio indeks keuangan.</li> <li>5. Perbandingan industri meningkatkan kualitas pelaporan keuangan</li> </ol>
<b>Variabel Independen</b>		
<b>Islamic Corporate Governance</b>	Transparansi/ Keterbukaan ( <i>Shiddiq</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga keuangan syariah memiliki akses mudah ke informasi layanan</li> <li>2. Penyampaian informasi layanan lembaga keuangan syariah cukup jelas</li> <li>3. Penyampaian informasi layanan lembaga keuangan syariah yang tepat waktu dan memadai</li> </ol>
	Akuntabilitas ( <i>Amanah</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyampaian informasi layanan lembaga keuangan syariah cukup akurat</li> <li>2. Informasi layanan lembaga keuangan syariah lengkap</li> <li>3. Kebijakan lembaga keuangan syariah diinformasikan kepada publik.</li> <li>4. Kebijakan lembaga keuangan syariah konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ol>
	Resposibility/ Pertanggungja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga keuangan syariah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>2. Lembaga keuangan syariah peduli terhadap masyarakat dan lingkungan</li> </ol>

Maysyaroh et al., (2024)	waban (Tabliq)	3. Lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas layanan yang diberikan kepada nasabah.
	Independensi / Kemandirian (Huriyah)	1. Lembaga keuangan syariah melindungi semua kepentingan nasabah 2. Lembaga keuangan syariah selalu objektif dalam mengambil keputusan
	Fairness/Kesetaraan (Tawazun)	1. Semua kepentingan pelanggan diperlakukan sama 2. Lembaga keuangan syariah memberikan kesempatan untuk memberikan masukan atau kritik (keluhan) 3. Lembaga keuangan syariah menindaklanjuti keluhan nasabah
	Shariah Compliance (Prinsip-Prinsip Syariah)	1. Tidak ada riba, gharar dan maysir dalam transaksi lembaga keuangan syariah 2. Lembaga keuangan syariah melakukan bisnis berbasis keuntungan halal 3. Lembaga keuangan syariah menjalankan mandat yang dipercaya oleh nasabah 4. DPS berperan efektif dalam mengawasi produk/layanan lembaga keuangan syariah 5. Lembaga keuangan syariah mengelola zakat, infaq, dan shadaqoh dengan kepercayaan
Accounting Ethics  Nkuranga & Tarus (2023)	Accounting integrity	1. Akuntan dengan jelas memahami apa yang benar dan salah terkait dengan pelaporan keuangan. 2. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini menjalankan kejujuran dalam pelaporan keuangan. 3. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini menghasilkan laporan keuangan dengan hati-hati dan ketelitian. 4. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini menghasilkan laporan keuangan yang jelas dan lengkap. 5. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini menunjukkan tingkat akuntabilitas yang tinggi. 6. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini tidak terlibat dalam kegiatan korupsi atau penipuan lainnya. 7. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini adalah manajer waktu yang baik dan merespons segera.
	Accounting objectivity	1. Akuntan telah mengembangkan keteguhan pribadi untuk membuat keputusan yang tepat tanpa bias. 2. Akuntan dapat dengan percaya diri menyelidiki kasus-kasus penipuan tanpa memedulikan hubungan pribadi. 3. Komentar dan pendapat yang disampaikan dalam laporan keuangan bersifat objektif dan tidak bias. 4. Akuntan melapor kepada manajemen tingkat tertinggi dalam lembaga keuangan syariah. 5. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini tidak membuat kompromi dalam hal kualitas pelaporan keuangan. 6. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini mengandalkan fakta yang dapat diverifikasi dalam menjalankan aktivitas mereka.
	Professional Competence and Due Care	1. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini memiliki pengetahuan profesional tentang pelaporan keuangan. 2. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini memiliki kemampuan untuk bekerja di bawah tekanan untuk memenuhi kepuasan investor tanpa mengorbankan kualitas. 3. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini telah membangun kekuatan batin untuk membuat keputusan pelaporan yang etis. 4. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini mengikuti program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan terkait dengan pelaporan keuangan. 5. Akuntan di lembaga keuangan syariah ini selalu memperbarui diri dengan informasi terkini tentang akuntansi dan pelaporan keuangan.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>Akuntan di lembaga keuangan syariah ini berkomunikasi secara efektif dengan karyawan lain di bank.</li> <li>Akuntan di lembaga keuangan syariah ini bertindak dengan hati-hati sesuai dengan standar teknis dan profesional yang berlaku ketika menjalankan aktivitas profesional mereka</li> </ol>
<b>Internal Control Effectiveness</b>  Pham et al (2023)	Efisiensi dan Efektivitas Operasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan usaha yang wajar, efisiensi operasional seharusnya bisa ditingkatkan lebih jauh.</li> <li>Ada kemungkinan masalah dalam operasi yang jika diatasi, akan menghasilkan rasio input-output yang lebih baik.</li> <li>Tidak ada tahap dalam proses yang saya ragukan efisiensinya.</li> <li>Lembaga keuangan syariah dalam beberapa fungsi bisa menggunakan sumber daya dengan lebih efisien</li> </ol>
	Keandalan Laporan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya memastikan bahwa laporan manajemen keuangan dapat dipercaya, sehingga terkadang perlu dilakukan verifikasi ulang atas informasi yang diterima.</li> <li>Lembaga keuangan syariah kadang-kadang harus memperbaiki kesalahan dalam laporan keuangan setelah informasi dikonfirmasi.</li> <li>Lembaga keuangan syariah kadang-kadang menerima informasi tentang kesalahan dalam laporan yang dikirim untuk penggunaan eksternal.</li> <li>Ada masalah dengan program akuntansi yang digunakan oleh manajemen keuangan.</li> </ol>
	Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menerapkan peraturan yang mengatur perusahaan kita dalam praktiknya cukup menantang.</li> <li>Perubahan dalam peraturan perundang-undangan seringkali datang secara tiba-tiba bagi perusahaan.</li> <li>Lembaga keuangan syariah telah mengamati bahwa staf mengalami kesulitan dalam mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.</li> <li>Tidak ada individu di perusahaan kami yang bertanggung jawab untuk memantau perubahan peraturan yang akan datang dan peraturan baru.</li> </ol>
<b>Variabel Moderating</b>		
<b>Fraud Prevention</b>  (Melindawati et.al 2023)	<i>Establishment of Anti-Fraud Policy</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan Menetapkan kebijakan anti-fraud</li> <li>Adanya komitmen antara manajemen dan para karyawan perusahaan untuk melaksanakan kegiatan anti-fraud</li> </ol>
	<i>Standard Prevention Procedures</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dengan adanya pemisahan fungsi pengendalian internal dapat menciptakan kondisi saling memeriksa antar fungsi</li> <li>Sistem komputer memadai dalam hal review keuangan</li> <li>Adanya prosedur mendeteksi fraud secara otomatis dalam sistem</li> </ol>
	<i>Control Techniques</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memberikan Pembagian tugas yang jelas.</li> <li>Perusahaan memberlakukan kontrol komputer kepada yang memiliki akses komputer.</li> <li>Perusahaan memberlakukan manual pengendalian terhadap file-file yang dipergunakan dalam pemrosesan komputer.</li> </ol>
	<i>Sensitivity to Fraud</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memiliki Kualifikasi calon pegawai harus mendapat perhatian khusus.</li> <li>Setiap pegawai selalu diingatkan dan didorong untuk melaporkan segala transaksi/kegiatan pegawai lainnya yang mencurigakan.</li> <li>Pegawai tidak diperkenankan lembur tanpa pengawasan yang memadai.</li> <li>Pegawai diwajibkan cuti tahunan</li> </ol>

### 3.6. Alat Analisis

Pada bagian berikut ini akan dijelaskan tentang tahapan atau proses pengujian terkait metode statistika yang digunakan dalam pengujian pesan batasannya untuk dasar pengambilan keputusan menerima hipotesis atau tidak menerima hipotesis penelitian data yang telah dikumpulkan kemudian akan diuji dalam beberapa uji statistik. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan metode penyelesaian *Structural Equation Modelling* (SEM) yang dalam hal penelitian ini lebih tepat dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull* dan sering disebut sebagai "*soft modelling*" karena tidak didasarkan pada banyak asumsi seperti data tidak harus terdistribusi normal dan tidak ada problem multikolinieritas antar variabel dependen. PLS bisa digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (*prediction*) dan untuk mengonfirmasi teori.

Lebih lanjut Ghozali (2021) menyatakan model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari tiga set hubungan. Pertama, *inner model* yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten (*structural model*). Kedua, *outer model* yang menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator atau variabel manifestnya (*measurement model*), dan yang ketiga adalah menghasilkan *weight relation*. Dalam penelitian ini, konstruk yang dibentuk menggunakan dengan indikator formatif. Dalam hal ini, peneliti memilih menggunakan PLS karena program analisis lainnya (seperti AMOS, Lisrel, dan lainnya.) tidak mampu melakukan analisis atas variabel laten dengan indikator formatif (Hair et al., 2010).

Menurut Hair et al., (2019) *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) adalah bagian dari SEM (*Structural Equation Modeling*) yang berguna untuk menguji bagaimana variabel-variabel terukur (indikator-indikator) yang baik dalam menggambarkan atau mewakili suatu bilangan dari suatu faktor, dimana dalam CFA faktor dapat disebut juga dengan konstruk. Konstruk merupakan suatu variabel tak terukur yang membutuhkan variabel-variabel terukur (indikator) untuk dapat menggambarkan konstruk tersebut. Selain itu CFA juga digunakan untuk menguji penegasan dari teori pengukuran. Teori pengukuran digunakan untuk menentukan

bagaimana variabel-variabel terukur, dapat menggambarkan secara logis dan sistematis suatu konstruk yang ditampilkan dalam suatu model.

Menurut Mardhotillah and Yulhendri, (2022) persamaan pengukuran secara umum untuk *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{X} = \mathbf{\Lambda}\xi + \mathbf{\Psi}\varepsilon$$

Dengan  $\mathbf{X}$  matriks ( $p \times 1$ ) dari indikator,  $\xi$  matrik ( $g \times 1$ ) dari variabel konstruk,  $\varepsilon$  matrik ( $p \times 1$ ) dari error,  $\mathbf{\Lambda}$  matriks ( $p \times g$ ) dari *loading* diantara indikator dan konstruk,  $\mathbf{\Psi}$  adalah matriks diagonal ( $p \times p$ ) dari *loading* diantara indikator dan error,  $p$  banyaknya indikator, dan  $g$  banyaknya konstruk. Untuk mempermudah pembahasan, diasumsikan bahwa  $E[\xi\xi'] = 0$  dan  $E[\varepsilon\varepsilon'] = I$  (matriks identitas).

### 3.6.1. Metode Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan data dengan disertai perhitungan untuk mengetahui karakteristik data. Analisis ini antara lain meliputi range, rata-rata (*mean*), deviasi standar, nilai maksimum, nilai minimum, dan jumlah data penelitian. Pengukuran rata-rata (*mean*) adalah cara yang paling umum digunakan untuk mengukur nilai sentral dari suatu distribusi data, sedangkan, deviasi standar merupakan perbedaan nilai data yang diteliti dengan nilai rata - ratanya. Apabila nilai rata-rata (*mean*) lebih besar daripada standar deviasi, maka kualitas datanya adalah baik.

### 3.6.2. Pengujian Kualitas Data dan Kelayakan Model Penelitian

#### a. Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Distribusi histogram berbentuk seperti lonceng atau bel sebagai bentuk distribusi normal. (Hair et al., 2017) menyatakan bahwa penilaian normalitas variabel metrik melibatkan ukuran empiris dari karakteristik bentuk distribusi (kecondongan dan kurtosis) dan plot probabilitas normal. Langkah-langkah empiris memberikan panduan untuk variabel dengan penyimpangan yang signifikan dari normalitas, dan plot probabilitas normal memberikan gambaran visual dari bentuk distribusi, Kedua penggambaran saling

melengkapi ketika memilih transformasi yang sesuai. Tinjauan pada normalitas menyangkut tindakan empiris yang mencerminkan bentuk distribusi (kecondongan dan kurtosis) serta uji statistik untuk normalitas (uji *Kolmogorov-Smirnov* yang dimodifikasi). Yamin et al. (2014) menyatakan bahwa pada program STATA pun dapat menunjukkan kenormalan distribusinya dengan cara melihat nilai *p-value* pada *multivariate test* dimana nilai *p-value* > 0,05 menunjukkan nilai distribusi data yang normal.

#### **b. Uji Outlier**

Hair et al., (2019) mengemukakan *outlier* atau anomali dalam bahasa *data mining*, adalah pengamatan dengan kombinasi unik dari karakteristik yang dapat diidentifikasi secara jelas berbeda dari apa yang "normal". Semua analisis yang difokuskan pada deteksi *outlier* didasarkan pada penetapan norma perbandingan sehingga pengamatan individu kemudian dapat dievaluasi dan deteksi *outlier* dapat dilakukan secara objektif dan rutin. Ini menjadi sangat penting karena jumlah dan keragaman jenis data yang digunakan meningkat. Di era Big Data dan analitik *real-time* yang berkelanjutan ini, kemampuan untuk mendeteksi *outlier*/ anomali harus diformalkan. Akibatnya, terutama dengan data *longitudinal*, peneliti harus terus-menerus mendefinisikan "konteks" data untuk menetapkan apa yang "normal". Pertimbangkan contoh klasik di mana kita melihat elektrokardiogram-serangkaian paku yang menggambarkan detak jantung. Sekarang jika kita fokus pada jangka waktu yang sangat kecil, lonjakan mungkin tampak seperti *outlier* dan menimbulkan kekhawatiran. Tetapi ketika kita mengamati dari waktu ke waktu, kita mendeteksi bahwa mereka adalah bagian dari pola yang lebih umum dan bahwa mereka adalah "normal" yang seharusnya kita harapkan.

#### **c. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer yang membutuhkan pengujian validitas dan reliabilitas. Hair et al., (2017) Metode yang dapat langsung mengetahui atau untuk memvalidasi hasil adalah (a) menilai replikabilitas/generalisasi hasil baik dengan sampel terpisah dalam kumpulan data asli atau dengan sampel terpisah, atau (b) mengejar konfirmasi analisis.

Reliabilitas adalah penilaian tingkat konsistensi antara beberapa pengukuran suatu variabel. Salah satu bentuk reliabilitas adalah *test-retest*. Untuk metode ini, konsistensi diukur antara tanggapan individu pada dua titik waktu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanggapan tidak terlalu bervariasi di seluruh periode waktu sehingga pengukuran yang diambil pada setiap titik waktu dapat diandalkan.

Ukuran reliabilitas kedua dan yang lebih umum digunakan adalah konsistensi internal, yang berlaku untuk konsistensi di antara variabel-variabel dalam skala yang dijumlahkan. Alasan untuk konsistensi internal adalah bahwa item individu atau indikator skala semua harus mengukur konstruk yang sama dan dengan demikian sangat saling berhubungan. Karena tidak ada *single item* yang merupakan ukuran sempurna dari suatu konsep, sehingga harus mengandalkan serangkaian tindakan diagnostik untuk menilai konsistensi internal.

*Single Item*, dalam test ini langkah pertama yang di pertimbangkan terkait dengan setiap item terpisah, termasuk korelasi *item-to-total* (korelasi item dengan skor skala yang dijumlahkan) dan korelasi antar item (korelasi antar item). Aturan praktis menunjukkan bahwa korelasi *item-to-total* melebihi 50 dan korelasi antar item melebihi 30.

*Cronbach's Alpha* Jenis ukuran diagnostik kedua adalah koefisien reliabilitas, yang menilai konsistensi seluruh skala, dengan *Cronbach's alpha* menjadi ukuran yang paling banyak digunakan. Batas bawah yang disepakati secara umum untuk alfa *Cronbach* adalah 0,70, meskipun mungkin menurun menjadi 0,60 dalam penelitian eksplorasi. Salah satu masalah dalam menilai alfa *Cronbach* adalah hubungan positifnya dengan jumlah item dalam skala. Karena peningkatan jumlah item, bahkan dengan tingkat interkorelasi yang sama, akan meningkatkan nilai reliabilitas, peneliti harus menempatkan persyaratan yang lebih ketat untuk skala dengan jumlah item yang besar. Pengukuran CFA Juga tersedia ukuran reliabilitas yang diturunkan dari analisis faktor konfirmatori. Termasuk dalam ukuran ini adalah keandalan komposit dan varians rata-rata yang diekstraksi.

### 3.6.3. Uji Kelayakan Model

Pada penelitian ini selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan model (Uji koefisien determinasi/ R<sup>2</sup>) dan Uji F) untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan regresi linier berganda. Model pada penelitian ini merupakan bentuk dari persamaan linier berganda yang digunakan untuk melihat pergerakan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat nya. Hair et al., (2018) menyatakan Regresi berganda adalah metode analisis yang tepat ketika masalah penelitian melibatkan satu variabel dependen metrik yang dianggap terkait dengan dua atau lebih variabel independen metrik. Tujuan dari analisis regresi berganda adalah untuk memprediksi perubahan variabel dependen dalam menanggapi perubahan variabel independen. Tujuan ini paling sering dicapai melalui aturan statistik *least square*. Kapanpun peneliti tertarik untuk memprediksi jumlah atau ukuran variabel dependen, regresi berganda berguna.

### 3.6.4. Analisis Kuantitatif Inferensial

Hair et al., (2011) menyatakan sebuah model ekonometrika dengan variabel moderasi disesuaikan dengan variabel penelitian ini sebagai berikut:

$$FRQ = \beta_1 ICG + \beta_2 AE + \beta_3 INC + \beta_4 FP + \beta_5 ICG*FP + \beta_6 AE*FP + \beta_7 INC*FP + \varepsilon$$

Keterangan:

ICG: *Islamic Corporate Governance*; AE: *Accounting Ethics*; INC: *Internal Control Effectiveness*; FRQ: *Financial Reporting Quality*; ICG\*FP: Moderasi *Fraud Prevention* pada *Islamic Corporate Governance*; AE\*FP: Moderasi *Fraud Prevention* pada *Accounting Ethics*; INC\*FP: Moderasi *Fraud Prevention* pada *Internal Control Effectiveness*.

Selanjutnya, teknik statistik yang akan digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi berganda. Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam mengukur tingkat pengaruh tersebut, peneliti juga melibatkan korelasi. Peneliti menggunakan teknik statistik korelasi *product moment (Pearson)*. Adapun skor yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil korelasi, seperti disebutkan oleh (Schober et al., 2021) yaitu:

**Tabel 3.3**  
**Skor korelasi Antar Variabel**

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
Nilai 0,00	Tidak Ada Korelasi
0,00 – 0,25	Korelasi Sangat Lemah
0,25 – 0,50	Korelasi Cukup Kuat
0,50 – 0,75	Korelasi Kuat
0,75 – 0,99	Korelasi Sangat Kuat
Nilai 1,00	Korelasi Sempurna

Sumber: Yamin et al. (2016)

### 3.6.5. Pengujian Hipotesis Uji t Parsial

Weaver and Wuensch, (2013) menyatakan bahwa uji-t merupakan cara untuk menghitung koefisien regresi secara individu. Berikut ketentuan dari hipotesis atas uji-t antara variabel independent dengan variabel dependent. Kriteria pengujian dari uji t ini adalah:

- Jika  $t_{tabel} < t_{hitung}$ , maka  $H_0$  tidak ditolak
- Jika  $t_{tabel} > t_{hitung}$ , maka  $H_0$  ditolak
- Jika tingkat sig  $< 0,05$ , maka  $H_0$  tidak ditolak
- Jika tingkat sig  $> 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak

### 3.6.7. Uji Determinasi

Menurut Imam Ghozali (2016), Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien korelasi determinasi adalah nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

### 3.7. Cara menentukan jenis variabel Moderasi

Variabel moderator biasanya diperkenalkan ketika ada hubungan antara *predictor* (X) dan variabel kriteria (Y) yang secara tidak terduga lemah atau tidak konsisten, Jadi, justru ketika terjadi X tidak signifikan terhadap Y, maka perlu adanya variabel moderasi. Variabel X tidak dapat menjadi prediktor tunggal, jika tidak ada variabel moderasi. Variabel X akan berpengaruh terhadap Y jika ada variabel moderasi (Baron, R.M., & Kenny, 1986).

Dalam pengambilan kesimpulan analisis regresi yang melibatkan variabel moderasi, menurut (Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, 1981) bahwa variabel moderasi dibagi menjadi empat jenis/kategori yaitu:

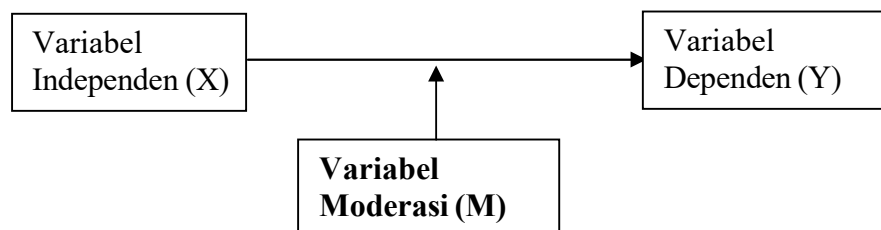
1. Variabel Moderasi Murni (*Pure Moderator*), merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, hal ini terjadi dimana variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Variabel Moderasi Semu (*Quasi Moderator*), merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, hal ini terjadi dimana variabel moderasi semu tersebut berinteraksi dengan variabel independen sekaligus menjadi variabel independen.
3. Variabel *antecedent*, *exogenous*, *intervening*, atau *suppressor*. Variabel *antecedent* merupakan variabel yang mendahului variabel independen. Mengamati satu atau dua variabel dengan variabel lain. Atau dengan kata lain, upaya mencari penggalan hubungan sebab akibat dari suatu tantangan sebab akibat yang lain. Sebab-sebab yang mendahului sebab-sebab yang diamati inilah yang disebut dengan variabel *antecedent* (Nasution, 2017). Variabel *exogenous* atau variabel independen/prediktor merupakan variabel yang berperan memberikan pengaruh kepada variabel lain. Variabel *intervening* (antara) merupakan variabel yang muncul antara waktu variabel independen beroperasi untuk mempengaruhi variabel dependen dan dampaknya terhadap variabel dependen. Variabel *suppressor* atau variabel kontrol penekan merupakan adanya hubungan atau pengaruh suatu variabel dengan variasi lain

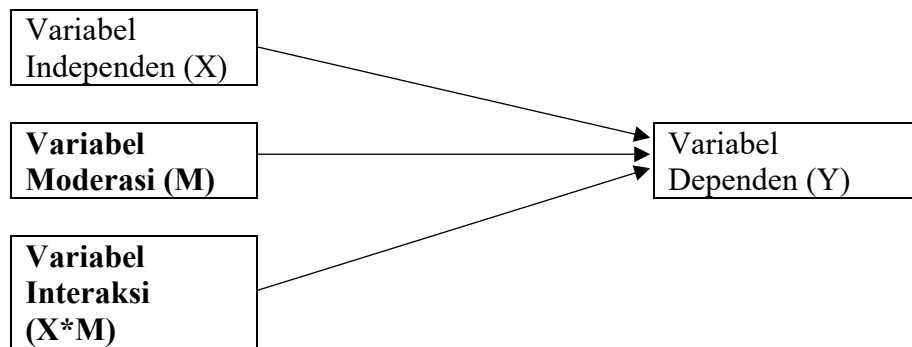
dalam hubungan antara dua variabel dan setelah diuji dengan variabel kontrol ternyata lebih memperjelas hubungan tersebut.

4. Variabel Moderasi Potensial (*Homologizer Moderator*), merupakan variabel yang potensial menjadi variabel moderasi karena adanya pengaruh kekuatan yang berhubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel jenis ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai relasi yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam menentukan keempat kategori tersebut, maka berikut disajikan gambar kerangka kerja untuk mengidentifikasi keempat jenis variabel moderasi. Analisis pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi apakah variabel moderasi (Z) berinteraksi secara signifikan dengan variabel independen (X):

1. Jika ya, maka identifikasi apakah variabel moderasi berhubungan dengan variabel dependen (Y)? Jika ya, maka variabel tersebut disebut *Quazi Moderator*. Jika tidak, maka variabel tersebut disebut *Pure Moderator*.
2. Jika tidak, maka identifikasi apakah variabel moderasi berhubungan dengan variabel independen (X) atau dependen (Y)? Jika ya, maka variabel tersebut disebut variabel *antecedent*, *exogenous*, *intervening*, atau *supressor*. Jika tidak, maka perlu dilakukan analisis *subgroup* dengan melihat apakah terdapat perbedaan nilai R square, yaitu dengan cara group I menguji model sebelum variabel moderasi dimasukkan dalam fungsi. Group II menguji model setelah variabel moderasi dimasukkan dalam fungsi. Jika hasilnya berbeda, maka variabel tersebut disebut *Homologizer* dan jika hasilnya sama, maka variabel tersebut bukan merupakan variabel moderasi.





$$Y = b_0 + b_1X + b_2M + b_3X*M$$

Keterangan:

No.	Hasil Uji	Jenis Moderasi
1	$b_2$ non significant $b_3$ significant	Moderasi Murni ( <i>Pure Moderator</i> )
2	$b_2$ significant $b_3$ significant	Moderasi Semu ( <i>Quasi Moderator</i> ). Quasi moderasi merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang sekaligus menjadi variabel independen.
3	$b_2$ significant $b_3$ non significant	Prediktor Moderasi ( <i>Predictor Moderasi Variabel</i> ). Artinya variabel moderasi ini hanya berperan sebagai variabel prediktor (independen) dalam model hubungan yang dibentuk
4	$b_2$ non significant $b_3$ non significant	Moderasi Potensial ( <i>Homologiser Moderator</i> ). Artinya variabel tersebut potensial menjadi variabel moderasi

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Investigasi moderasi variabel *Fraud Prevention* terhadap hubungan antara *Islamic Corporate Governance*, *Accounting Ethics* dan *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality*. melalui tiga tahapan pembahasan. Tahap pertama adalah penjelasan tentang data responden yaitu penjelasan tentang karakteristik responden serta juga demografi dari responden. Tahap kedua adalah analisis deskriptif kemudian juga membahas statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang diteliti. Sementara untuk tahap ketiga merupakan analisis keterkaitan antar variabel yang meliputi uji validitas, reliabilitas alat ukur dan uji hipotesis dengan metode analisis model persamaan struktural (SEM) dengan menggunakan teknik analisis berbasis *variance* yaitu PLS (*Partial Least Square*). Bab ini ditutup dengan pembahasan hasil penelitian berkaitan dengan seluruh hipotesa yang diangkat dalam penelitian.

#### **4.1. Deskripsi Sampel**

Populasi penelitian yang ada dalam penelitian ini adalah individu dengan level jabatan sebagai Direktur Utama, Direktur, General Manager, Manager yang bekerja di lembaga keuangan syariah seperti Perbankan Syariah, Multifinance Syariah dan Asuransi Syariah baik yang penuh syariah maupun yang masih unit usaha syariah. Pengambilan populasi sasaran dengan fokus pada Direktur Utama, Direktur, General Manager, Manager di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia adalah untuk memastikan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan kinerja mereka dalam rangka untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam hal pencegahan kecurangan. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yakni Responden adalah Direktur Utama, Direktur, General Manager, Manager di lembaga keuangan syariah baik Perbankan Syariah, Multifinance Syariah, Asuransi Syariah. Responden yang memberikan jawaban juga dapat diverifikasi posisi

jabatan melalui sosial media, kartu nama, dan tanda pengenal lainnya bahwa memang bekerja di lembaga keuangan syariah tersebut.

#### 4.1.1. Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan distribusi responden berdasarkan jenis dan jumlah lembaga keuangan syariah (LKS) yang terlibat dalam pengumpulan data. Dalam hal ini, informasi mengenai jumlah instansi yang diwakili dan sampel yang berhasil dikumpulkan disusun secara rinci untuk memberikan gambaran kuantitatif tentang kontribusi masing-masing lembaga terhadap keseluruhan data penelitian. Tabel berikut menyajikan sebaran lembaga keuangan syariah beserta jumlah sampel yang diperoleh dari masing-masing institusi. Data ini juga disertai dengan persentase kontribusi tiap-tiap lembaga terhadap total sampel penelitian:

**Tabel 4.1**  
**Sebaran Institusi dan Responden Penelitian**

No	Lembaga Keuangan Syariah	Jumlah Instansi LKS	Jumlah Responden	%
<b>1</b>	Sektor Perbankan Syariah	206	121	58,74
	- Bank Umum Syariah	14	14	100
	- Unit Usaha Syariah	19	19	100
	- BPR Syariah	173	88	50,87
<b>2</b>	Sektor Multifinance	29	29	100
	- Full Mutifinance Syariah	3	3	100
	- Unit Usaha Syariah Multifinance	26	26	100
<b>3</b>	Sektor Asuransi	53	47	88,68
	Asuransi Jiwa	28	26	92,86
	- Full Syariah	7	7	100
	- Unit usaha Syariah	21	19	90,48
	Asuransi Umum	25	21	84,00
	- Full Syariah	5	3	60
	- Unit Syariah	20	18	90
	<b>Total Lembaga Keuangan Syariah</b>	288	197	68,40

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 4.1 memberikan gambaran rinci mengenai distribusi lembaga keuangan syariah (LKS) dan kontribusi sampel dari masing-masing sektor yang terlibat dalam penelitian ini. Dari total 288 institusi LKS yang tercatat, 197 sampel

berhasil dikumpulkan, menunjukkan tingkat respons keseluruhan sebesar 68,40%. Analisis lebih terperinci berdasarkan sektor dan sub-sektor adalah sebagai berikut

- 1) Sektor perbankan ini terdiri dari 206 institusi, dengan total 121 sampel yang berhasil dikumpulkan. Tingkat respons keseluruhan di sektor ini adalah 62,14%, dengan rincian Bank Umum Syariah (BUS) dengan Jumlah instansi sebanyak 14, dengan tingkat respons sempurna, yaitu 100%. Semua lembaga di sub-sektor ini memberikan kontribusi penuh terhadap pengumpulan data. Unit Usaha Syariah (UUS) Perbankan ditemukan Terdapat 19 institusi, juga dengan tingkat respons 100%, menunjukkan kesediaan yang tinggi untuk berpartisipasi. BPR Syariah (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) dengan Jumlah lembaga terbanyak dalam sektor ini, yaitu 173 instansi. Namun, hanya 88 sampel yang berhasil dikumpulkan, menghasilkan tingkat respons sebesar 50,87%, yang menjadi angka terendah di sektor perbankan syariah. Jumlah responden di sektor Perbankan Syariah, khususnya BPR Syariah (BPRS), lebih sedikit dibandingkan jumlah instansinya karena beberapa faktor utama. Pertama, BPRS tersebar di 24 provinsi di Indonesia, namun dalam penelitian ini hanya 19 provinsi yang masuk dalam sampel, sementara 5 (lima) provinsi lainnya tidak terwakili, yang berkontribusi pada berkurangnya jumlah responden. Kedua, tantangan aksesibilitas dan keterjangkauan menyebabkan tidak semua BPRS memiliki perwakilan yang dapat memberikan data yang dibutuhkan. Ketiga, skala operasional dan struktur organisasi BPRS yang lebih kecil dibandingkan Bank Umum Syariah menyebabkan keterbatasan personel dengan kewenangan untuk menjadi responden yang kompeten. Keempat, tingkat partisipasi dalam penelitian akademik atau survei cenderung lebih rendah karena tidak semua BPRS memiliki kebijakan atau prosedur yang jelas terkait pengisian survei. Selain itu, karena penelitian ini berfokus pada representasi korporasi, pengambilan data dilakukan dengan memilih satu responden yang benar-benar mewakili kebijakan dan keputusan di setiap instansi, sementara tidak semua BPRS memiliki individu yang dapat dengan mudah diakses untuk memenuhi kriteria ini.

- 2) Sektor multifinance memiliki 29 lembaga, dengan tingkat respons keseluruhan mencapai 100%, mengindikasikan partisipasi yang optimal. Distribusi sub-sektor Full Multifinance Syariah terdiri dari 3 (tiga) institusi, semuanya memberikan data lengkap dengan tingkat respons 100%. Adapun untuk Unit Usaha Syariah Multifinance dengan Jumlah lembaga sebanyak 26, juga dengan tingkat respons 100%.
- 3) Sektor asuransi syariah menunjukkan tingkat partisipasi yang sangat tinggi dalam penelitian ini, dengan total 53 lembaga yang terdaftar dan 47 sampel yang berhasil dikumpulkan, menghasilkan tingkat respons sebesar 88,68%. Angka ini mencerminkan keterlibatan yang hampir sempurna dari sektor ini, baik dari sub-sektor asuransi jiwa maupun asuransi umum. Pada sub-sektor asuransi jiwa syariah, dari 28 lembaga yang tercatat berpartisipasi sebanyak 26 responden, dengan tingkat respons mencapai 92,86%. Sub-sektor ini terdiri dari dua jenis lembaga, yaitu asuransi jiwa full syariah sebanyak 7 (tujuh) institusi dan unit usaha syariah (UUS) sebanyak 21 institusi, yang keduanya menunjukkan komitmen penuh dalam memberikan data penelitian. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya penelitian dan kontribusi untuk pengembangan sektor keuangan syariah. Sementara itu, sub-sektor asuransi umum syariah mencatatkan jumlah lembaga sebanyak 25 dengan 21 sampel yang terkumpul, menghasilkan tingkat respons sebesar 84%. Sub-sektor ini terdiri dari 5 (lima) lembaga full syariah yang berpartisipasi sebanyak 3 (tiga) lembaga yang memberikan data dengan tingkat respon sebesar 60%, sedangkan unit usaha syariah (UUS) sebanyak 20 lembaga mencatat tingkat respons sebesar 90%, dengan 18 lembaga memberikan data. Meskipun tingkat respons pada UUS asuransi umum sedikit lebih rendah dibandingkan sub-sektor lainnya, angka ini tetap menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penelitian. Secara keseluruhan, sektor asuransi syariah mencerminkan profesionalisme dan kesadaran tinggi, dengan respons maksimal di beberapa sub-sektor, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan partisipasi di kalangan UUS pada asuransi umum.

4) Penyebaran kuesioner dilakukan dengan bantuan asosiasi yang menaungi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, yaitu Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI). Melalui dukungan ketiga asosiasi tersebut, kuesioner berhasil disampaikan kepada perwakilan resmi dari masing-masing instansi. Setiap instansi hanya diwakili oleh satu responden yang dipilih berdasarkan relevansi dan kapabilitasnya dalam menjawab pertanyaan penelitian, sehingga seluruh data yang diperoleh digunakan sebagai sampel penelitian secara penuh. Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan representasi yang proporsional dan validitas data yang optimal

#### 4.1.2. Jenis Kelamin

Analisis karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dilakukan untuk memahami distribusi partisipan dalam penelitian ini. Data jenis kelamin memberikan gambaran tentang keterwakilan responden laki-laki dan perempuan, serta memungkinkan analisis lebih mendalam terkait potensi pengaruh demografi gender terhadap temuan penelitian. Tabel berikut menampilkan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin.

**Tabel 4.2**  
**Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1.	Laki - Laki	146	74.11
2.	Perempuan	51	25.89
	<b>Jumlah</b>	<b>197</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan data terkait jenis kelamin responden, berikut deskripsi yang lebih detail responden laki-laki berjumlah 146 orang, yang mewakili 74.11% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam survei ini adalah laki-laki, dengan proporsi yang sangat dominan, yaitu lebih dari tiga perempat dari seluruh peserta. Responden perempuan berjumlah 51 orang, yang mencakup 25.89% dari keseluruhan responden. Ini mengindikasikan bahwa

partisipasi perempuan dalam survei ini lebih sedikit, dengan hanya sekitar seperenam dari total responden.

Dominasi responden laki-laki pada kelompok manajemen menengah ini bisa saja mempengaruhi pendekatan terhadap pelaporan keuangan, mengingat penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi dan pendekatan antara gender dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, perspektif laki-laki yang lebih dominan mungkin membawa preferensi atau gaya manajemen tertentu dalam pelaporan keuangan, yang bisa berdampak pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar pelaporan. Selain itu, rendahnya proporsi responden perempuan (25,89%) bisa saja menjadi refleksi dari komposisi gender di posisi manajemen menengah yang terkait dengan pelaporan keuangan, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap kebijakan perusahaan dalam bidang keuangan dan pelaporan. Misalnya, keterlibatan perempuan yang lebih sedikit mungkin berpotensi mengurangi keberagaman sudut pandang yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan akurat. Secara keseluruhan, komposisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang dihasilkan akan sangat dipengaruhi oleh pandangan manajemen menengah laki-laki, yang merupakan mayoritas dalam survei ini. Hal ini bisa mengarah pada suatu pola atau standar pelaporan yang sesuai dengan perspektif mereka, tetapi berpotensi kurang mewakili sudut pandang yang lebih luas. Dengan demikian, meningkatkan keberagaman gender dalam manajemen menengah dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong kualitas pelaporan keuangan yang lebih inklusif dan berimbang

#### **4.1.3. Usia**

Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik demografis responden, penelitian ini mengelompokkan responden berdasarkan usia. Pembagian usia ini dirancang untuk mencerminkan tingkat pengalaman, kematangan profesional, dan relevansi terhadap topik yang diteliti. Tabel berikut menyajikan data tentang jumlah responden dari setiap kelompok usia beserta persentasenya terhadap total responden. Informasi ini penting untuk memahami

proporsi partisipasi responden dari berbagai kelompok usia dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi interpretasi hasil penelitian.

**Tabel 4.3**  
**Usia Responden**

No	Usia	Jumlah Responden	Persentase
1.	25 - 29 tahun	19	9.64
2.	30 - 35 tahun	28	14.21
3.	36 - 40 tahun	60	30.46
4.	41 - 45 tahun	37	18.78
5.	> 45 Tahun	53	26.90
	<b>Jumlah</b>	<b>197</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan tabel distribusi usia responden, penelitian ini melibatkan total 197 responden yang berasal dari berbagai kelompok usia. Kelompok usia 36–40 tahun mendominasi, dengan jumlah responden sebanyak 60 orang atau 30,46% dari total. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam kelompok usia produktif yang umumnya memiliki pengalaman kerja yang matang, sehingga memungkinkan mereka memberikan wawasan yang mendalam terkait topik penelitian. Kelompok usia terbesar berikutnya adalah responden yang berusia di atas 45 tahun, yaitu sebanyak 53 orang atau 26,90%. Tingginya proporsi responden di kelompok usia ini mengindikasikan keterlibatan yang signifikan dari individu dengan tingkat senioritas yang lebih tinggi, yang dapat menyumbangkan perspektif berdasarkan pengalaman panjang mereka.

Sementara itu, kelompok usia 41–45 tahun terdiri dari 37 responden atau 18,78% dari total, menempatkan kelompok ini di posisi ketiga. Angka ini juga mencerminkan keterlibatan yang cukup signifikan dari responden yang berada di tahap puncak karier mereka. Di sisi lain, kelompok usia 30–35 tahun mencakup 28 responden atau 14,21%, menunjukkan partisipasi dari kalangan profesional muda yang mulai memasuki fase pertengahan karier. Adapun kelompok usia 25–29 tahun menjadi kelompok dengan jumlah responden paling sedikit, yaitu 19 orang atau 9,64%, yang mungkin merepresentasikan generasi baru yang masih berada di tahap awal pengembangan profesional mereka.

Secara keseluruhan, distribusi usia responden ini menunjukkan keterwakilan yang baik dari berbagai tingkatan usia, dengan proporsi yang seimbang antara kelompok usia muda, menengah, dan senior. Hal ini memberikan jaminan bahwa hasil penelitian mencakup sudut pandang dari berbagai tingkat pengalaman dan jenjang karier, yang memperkaya temuan dan interpretasi data

#### 4.1.4. Pendidikan Terakhir

Tingkat pendidikan responden merupakan salah satu variabel penting yang dianalisis dalam penelitian ini untuk memahami latar belakang akademik partisipan. Informasi ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian, serta relevansinya terhadap topik yang dibahas. Tingkat pendidikan juga dapat mencerminkan kapasitas intelektual responden dalam memahami dan memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks penelitian. Tabel berikut menyajikan distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, meliputi kategori Sarjana/DIV, Magister, dan Doktor, beserta persentase masing-masing terhadap total responden. Data ini diolah dari hasil survei pada tahun 2025:

**Tabel 4.4**  
**Pendidikan Responden**

No	Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Sarjana / DIV	141	71.57
2.	Magister	51	25.89
3.	Doktor	5	2.54
	<b>Jumlah</b>	<b>197</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah (2025)

Dengan mayoritas responden berpendidikan Sarjana atau DIV (71.57%) dan sebagian lainnya berpendidikan Magister (25.89%), data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di kalangan manajemen menengah cukup mendukung dalam hal kapasitas intelektual dan keahlian teknis yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelaporan keuangan berkualitas.

Responden dengan pendidikan Sarjana atau sederajat yang mendominasi survei (141 orang) menunjukkan bahwa sebagian besar manajemen menengah

memiliki latar belakang pendidikan formal yang kuat dalam bidang yang relevan, seperti akuntansi, keuangan, atau manajemen. Tingkat pendidikan ini membekali mereka dengan pemahaman mendasar mengenai prinsip-prinsip pelaporan keuangan, serta keterampilan analitis yang cukup untuk menafsirkan data keuangan dan mengikuti standar pelaporan yang berlaku. Keahlian teknis ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan akurat, konsisten, dan sesuai dengan regulasi.

Di sisi lainnya, kehadiran responden yang berpendidikan Magister (25.89%) memberikan kontribusi tambahan dalam hal kemampuan analisis yang lebih mendalam, pengetahuan mengenai manajemen strategis, dan pendekatan berbasis riset yang lebih kuat. Manajemen menengah dengan gelar Magister mungkin memiliki perspektif yang lebih luas mengenai risiko keuangan, tata kelola perusahaan, serta penerapan standar pelaporan internasional, yang semuanya berkontribusi pada kualitas pelaporan yang lebih komprehensif dan akuntabel.

Meskipun jumlah responden dengan pendidikan Doktor (2.54%) relatif kecil, keberadaan mereka dalam survei ini tetap signifikan. Individu dengan gelar Doktor biasanya memiliki keahlian mendalam dalam riset dan metodologi analisis keuangan yang kompleks. Pengetahuan tingkat lanjut ini dapat meningkatkan kualitas pelaporan dengan memperkenalkan praktik-praktik terbaik, analisis risiko mendalam, serta pendekatan strategis dalam penyusunan laporan keuangan.

Secara keseluruhan, latar belakang pendidikan responden, yang didominasi oleh Sarjana dan Magister, menunjukkan kesiapan manajemen menengah untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang berkualitas. Tingkat pendidikan ini membekali mereka dengan dasar teori dan praktik yang baik, sementara keberadaan lulusan Magister dan Doktor menambah nilai dalam bentuk perspektif strategis dan riset. Dengan komposisi pendidikan ini, manajemen menengah dapat diharapkan untuk memenuhi standar pelaporan keuangan yang andal, akurat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

#### 4.1.5. Lama Bekerja di Lembaga Keuangan Syariah saat ini

Untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai latar belakang profesional responden, penelitian ini menganalisis data terkait lama bekerja. Informasi tentang lama bekerja penting karena dapat mencerminkan tingkat pengalaman, kompetensi, serta pemahaman responden terhadap bidang yang relevan dengan penelitian. Responden dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan tahun kerja mereka, sehingga mempermudah identifikasi kontribusi dari berbagai tingkat senioritas.

Dibeberapa lembaga keuangan syariah, terutama yang sudah lebih matang, ada sistem rotasi jabatan untuk memastikan kaderisasi yang baik. Rotasi ini bisa terjadi dalam jabatan seperti Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, maupun Direksi, yang memang memerlukan kombinasi keahlian keuangan dan pemahaman syariah.

Beberapa jabatan di lembaga keuangan syariah membutuhkan pengalaman kerja yang panjang, sementara yang lain lebih fleksibel. Dari data yang diperoleh bahwa Direktur dan Direktur Utama sering kali berasal dari profesional dengan pengalaman panjang di industri keuangan. Dan General Manager dan Manager di Lembaga Keuangan Syariah, terutama yang sudah lebih matang, ada sistem rotasi jabatan untuk memastikan kaderisasi dan menunjukkan bahwa banyak pegawai baru naik ke posisi ini dalam waktu relatif singkat. Banyaknya pejabat baru di level tertentu bisa menunjukkan bahwa ada peluang percepatan karir di industri ini, terutama di tingkat managerial dan eksekutif.

Tabel berikut menyajikan distribusi jumlah responden berdasarkan lama bekerja beserta persentasenya terhadap total responden. Data ini berfungsi untuk memperkaya analisis terkait keterlibatan profesional dengan berbagai tingkat pengalaman dalam penelitian ini:

**Tabel 4.5**  
**Lama Bekerja Responden**

No	Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
1.	1- 4 tahun	93	47.21
2.	5 - 10 tahun	62	31.47
3.	11 - 15 tahun	20	10.15

No	Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
4.	16 - 20 tahun	8	4.06
5.	> 20 tahun	14	7.11
	<b>Jumlah</b>	<b>197</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah (2025)

Data tentang lama bekerja responden menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka memiliki pengalaman kerja 1 (satu) hingga 10 tahun dengan rincian 47,21% bekerja selama 1(satu) sampai 4 (empat) tahun dan 31.47% selama 5 (lima) sampai 10 tahun. Di sisi lainnya, responden dengan pengalaman kerja yang lebih lama, yaitu di atas 10 tahun, hanya mencakup sekitar 21.32 % dari total responden. Ketika dikaitkan dengan kualitas pelaporan keuangan, komposisi lama bekerja ini memberikan beberapa implikasi bagi efektivitas dan akurasi pelaporan yang dihasilkan, terutama karena mayoritas responden berada di level manajemen menengah.

Responden yang bekerja antara 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun mungkin membawa ide-ide segar dan pemahaman terbaru mengenai teknologi pelaporan keuangan serta metode analisis modern. Namun, keterbatasan pengalaman mereka mungkin mempengaruhi pemahaman menyeluruh atas standar pelaporan keuangan yang kompleks dan prosedur pelaporan yang detail. Meskipun demikian, dengan dukungan dari manajemen dan kolaborasi lintas tim, mereka tetap memiliki potensi untuk berkontribusi pada kualitas pelaporan melalui pendekatan baru dan lebih efisien.

Responden dengan pengalaman 5 (lima) sampai 10 tahun (31.47 %) biasanya memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai siklus bisnis, operasional perusahaan, serta praktik pelaporan yang baik. Mereka berperan penting dalam memastikan pelaporan keuangan yang akurat, serta memiliki keterampilan analisis yang lebih berkembang, yang dibutuhkan untuk mengelola data keuangan yang kompleks dan mengidentifikasi ketidaksesuaian. Manajemen menengah dalam kelompok ini memiliki keseimbangan antara inovasi dan stabilitas, yang diperlukan untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang kredibel dan terstruktur.

Sementara itu, meskipun jumlah responden dengan pengalaman kerja di atas 10 tahun relatif kecil (sekitar 21.32 %), kehadiran mereka signifikan dalam menjaga

kualitas pelaporan keuangan yang stabil dan akuntabel. Pengalaman kerja yang lebih Panjang terutama bagi mereka yang telah bekerja lebih dari 15 tahun, menambah wawasan mendalam mengenai kebijakan keuangan dan regulasi yang terus berubah, serta keahlian dalam pengawasan pelaporan keuangan agar konsisten dengan standar akuntansi. Mereka juga dapat membantu membimbing responden yang lebih muda, memastikan bahwa standar pelaporan tetap terjaga di tengah perubahan atau tantangan baru.

Secara keseluruhan, distribusi pengalaman kerja ini menunjukkan bahwa mayoritas responden di manajemen menengah memiliki keahlian yang memadai untuk memastikan pelaporan keuangan yang berkualitas. Pengalaman yang beragam di antara mereka mulai dari pendekatan inovatif dari yang lebih baru hingga kestabilan dari yang berpengalaman membentuk kerangka pelaporan keuangan yang seimbang, di mana kualitas pelaporan dapat terus ditingkatkan melalui kolaborasi dan pengawasan dari manajemen menengah yang berpengalaman.

#### 4.1.6. Level Jabatan

Distribusi responden berdasarkan level jabatan menjadi salah satu aspek penting dalam penelitian ini untuk menggambarkan keterwakilan setiap jenjang dalam struktur organisasi. Data ini mencerminkan peran dan tanggung jawab responden, mulai dari tingkat pengambilan keputusan strategis, hingga pelaksana manajerial. Analisis ini juga memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami kontribusi responden dari berbagai tingkatan jabatan terhadap isu yang diteliti. Tabel berikut menampilkan distribusi jumlah responden berdasarkan level jabatan beserta persentasenya terhadap total populasi penelitian.

**Tabel 4.6**  
**Level Jabatan Responden**

No	Level Jabatan	Jumlah Responden	Persentase
1.	Direktur Utama	38	5.77
2.	Direktur	12	18.27
3.	General Manager	21	10.10
4.	Manager	126	60.58
	<b>Jumlah</b>	<b>197</b>	<b>100</b>

Sumber: Data diolah (2025)

Data menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada level manager (63.96%), khususnya pada posisi manajer, yang memiliki peran langsung dalam operasional sehari-hari perusahaan, termasuk proses penyusunan dan pengawasan pelaporan keuangan. Jumlah signifikan ini menunjukkan bahwa pandangan, keterampilan, dan keahlian mereka menjadi faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Manajer yang berada di level *middle management* sering kali bertanggung jawab untuk menerjemahkan kebijakan keuangan strategis dari tingkat eksekutif (seperti Direktur dan General Manager) ke dalam proses operasional. Dalam konteks pelaporan keuangan, mereka mengawasi detail penyusunan laporan, memastikan data keuangan akurat, dan menjaga kepatuhan pada standar akuntansi dan regulasi. Dengan mayoritas manajer yang berperan aktif dalam survei ini, dapat diasumsikan bahwa kualitas pelaporan keuangan sangat dipengaruhi oleh keahlian mereka dalam mengelola proses dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi yang baik.

General Manager, 21 orang (10.66%), Direktur Utama 38 orang (19.29%), dan Direktur 12 orang (6.09%) juga memberikan kontribusi strategis dalam pelaporan keuangan, meskipun dalam peran pengawasan atau peninjauan akhir. Posisi ini memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga selaras dengan tujuan strategis perusahaan dan memenuhi standar kepatuhan yang lebih luas, seperti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam pelaporan keuangan, serta memberikan persetujuan akhir sebelum laporan dipublikasikan atau dipresentasikan kepada pemangku kepentingan eksternal.

Pada level Direktur Utama, terdapat 38 responden, yang mencakup 19,29% dari total 197 responden. Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 (satu) dari 5 (lima) responden berasal dari jajaran direktur utama di organisasi ini.

Sebagai pemegang posisi strategis, para direktur utama memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan bisnis, serta pengelolaan operasional di berbagai divisi atau unit kerja. Jumlah yang cukup signifikan ini

mencerminkan bahwa struktur organisasi memiliki lapisan kepemimpinan yang kuat di tingkat direktorat, yang mendukung arah dan kebijakan perusahaan.

Dibandingkan dengan Direktur, yang hanya berjumlah 12 orang (6,09%), jumlah direktur utama lebih besar, yang menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih luas di antara mereka. Namun, jika dibandingkan dengan level Manager, yang mencapai 126 responden (63,96%), jumlah direktur utama masih jauh lebih kecil, mengindikasikan bahwa eksekusi kebijakan dan operasional lebih banyak dikelola di tingkat manajerial.

Proporsi direktur utama yang mencapai hampir seperlima dari total responden mencerminkan struktur kepemimpinan yang solid dan berlapis di tingkat strategis, dengan peran yang krusial dalam merumuskan kebijakan serta mengarahkan organisasi menuju pencapaian visi dan misi. Keberadaan direktur utama yang signifikan ini memastikan adanya keseimbangan antara perencanaan strategis dan implementasi operasional, yang diperkuat oleh dukungan dari manajemen menengah. Dengan mayoritas responden berasal dari level manajerial, kualitas pelaporan keuangan dapat dijaga melalui proses penyusunan yang sistematis, akurat, dan diawasi secara ketat. Interaksi erat antara direktur dan manajemen menengah tidak hanya memperkuat efektivitas pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan sistem pengendalian internal yang andal, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan Perusahaan.

#### **4.1.7. Deskripsi Statistik**

Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, tanpa membuat kesimpulan atau generalisasi yang melampaui data itu sendiri. Dalam analisis ini, data disajikan dalam bentuk statistik dasar, seperti rata-rata, persentase, frekuensi, dan distribusi, untuk memudahkan pemahaman terhadap pola, tren, atau karakteristik data. Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi variabel *Islamic Corporate*

*Governance, Accounting Ethics, nternal Control Effectiveness, Fraud Prevention dan Financial Reporting Quality.*

**Tabel 4.7**  
**Analisis Statistik Deskriptif**

<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
ICG	197	1	4	2.84036	0.86978
AE	197	1	4	2.16907	0.66140
INC	197	1	4	2.94289	0.85874
FP	197	1	4	3.17893	0.80549
FRQ	197	1	4	2.97665	0.83867

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS, 2025

Keterangan: ICG = *Islamic Corporate Governance*; AE = *Accounting Ethics*; INC= *Internal Control Effectiveness*; FP = *Fraud Prevention*; FRQ = *Finansial Reporting Quality*

Variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) memiliki nilai rata-rata sebesar 2.84036, yang mencerminkan persepsi positif responden terhadap implementasi tata kelola Islam di lembaga keuangan syariah. Meskipun angka ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip governansi syariah telah diterapkan dengan cukup baik, nilai yang belum mencapai angka maksimal 4 (empat) menandakan bahwa implementasi tata kelola ini masih belum sepenuhnya optimal, mengindikasikan adanya tantangan dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, independensi pengawasan, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah di seluruh lini organisasi. Selain itu, standar deviasi sebesar 0.86978 menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap *Islamic corporate governance* relatif seragam, menandakan adanya konsistensi dalam pengalaman mereka terhadap implementasi sistem tata kelola ini, yang dapat menjadi indikasi bahwa kebijakan governansi syariah telah diterapkan secara sistematis dan merata di berbagai level organisasi. Namun, nilai rata-rata yang belum mencapai tingkat tertinggi menunjukkan adanya celah dalam efektivitas implementasi, seperti kurangnya keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam pengambilan keputusan strategis, keterbatasan mekanisme audit syariah yang ketat, atau belum optimalnya pemahaman dan kepatuhan karyawan terhadap prinsip-prinsip governansi Islam. Untuk memastikan tata kelola Islam berjalan secara ideal, lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta

memastikan bahwa prinsip syariah tidak hanya dipatuhi secara formal, tetapi juga diinternalisasi dalam seluruh aspek operasional organisasi.

Variabel *Accounting Ethics* (AE) dengan nilai rata-rata terendah yaitu 2.16907, memberikan sinyal bahaya bagi integritas profesi akuntan di LKS Indonesia. Angka ini secara tajam merefleksikan adanya tekanan (*pressure*) yang tinggi atau rasionalisasi yang lemah terhadap kode etik profesi di tengah persaingan industri keuangan. Rendahnya nilai ini menunjukkan bahwa prinsip etika Islam seperti Siddiq (kejujuran) seringkali terpinggirkan demi pencapaian target performa finansial atau tuntutan manajemen. Standar deviasi yang relatif kecil (0.66140) memperkuat temuan bahwa krisis etika ini merupakan fenomena yang sistemik dan merata di persepsi responden. Hal ini menjadi paradoks besar bagi lembaga yang mengusung nilai syariah; jika etika akuntansi lemah, maka seluruh laporan yang dihasilkan kehilangan ruh keadilan ekonominya. LKS di Indonesia memerlukan rekayasa ulang pada sistem budaya kerja yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memproteksi integritas akuntan dari intervensi yang merusak objektivitas.

Variabel *Internal Control Effectiveness* (INC) memiliki nilai rata-rata 2.94289, menunjukkan bahwa secara teknis, sistem pertahanan lapis pertama (*first line of defense*) di LKS Indonesia sudah cukup solid namun masih memiliki celah fungsional. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun SOP dan pemisahan fungsi telah ada, efektivitasnya seringkali terkendala oleh budaya atau rasa sungkan yang masih kuat dalam struktur organisasi di Indonesia, yang berpotensi melonggarkan pengawasan internal. Standar deviasi sebesar 0.85874 mengonfirmasi adanya variasi efektivitas kontrol antar-kantor cabang atau departemen, di mana kantor pusat mungkin memiliki kontrol ketat sementara kantor cabang di daerah mengalami degradasi pengawasan. Tanpa pengendalian internal yang absolut, LKS sangat rentan terhadap kegagalan operasional dan risiko reputasi yang dapat memicu rush (penarikan dana besar-besaran) oleh nasabah yang mengharapkan keamanan dana di atas segalanya.

Variabel *Fraud Prevention* (FP) meraih nilai rata-rata tertinggi sebesar 3.17893, yang menunjukkan bahwa LKS di Indonesia telah sangat responsif terhadap ancaman kecurangan. Angka yang kuat ini mencerminkan keberhasilan

adopsi teknologi antifraud dan sistem *Whistleblowing* yang mulai efektif. Namun, argumen kritisnya adalah apakah tingginya angka ini disebabkan oleh sistem pencegahan yang proaktif atau hanya reaksi atas maraknya kasus *fraud* di sektor perbankan Indonesia belakangan ini. Standar deviasi 0.80549 menunjukkan bahwa kesadaran akan bahaya kecurangan sudah mulai merata. Meski demikian, angka ini belum mencapai level sempurna (4), yang berarti masih ada celah pada "internal fraud" yang melibatkan kerja sama antar-orang dalam (*collusion*). Pencegahan *fraud* di LKS tidak boleh hanya bersandar pada sistem digital, tetapi harus menyentuh penguatan aspek spiritualitas karyawan agar muncul rasa takut kepada Allah SWT sebagai pengawas tertinggi (Muraqabah).

Variabel *Financial Reporting Quality* (FRQ) menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2.97665, mengindikasikan bahwa kualitas informasi keuangan LKS di Indonesia berada pada level yang cukup andal, namun belum sepenuhnya transparan bagi pemangku kepentingan. Dalam konteks akuntansi syariah, kualitas laporan bukan hanya soal angka yang balans, tetapi soal bagaimana laporan tersebut mampu mengungkapkan zakat, pembiayaan yang berkeadilan, dan pembersihan unsur ribawi. Nilai yang belum menyentuh angka 3.5 ke atas menandakan masih adanya praktik *earnings management* (manajemen laba) untuk menjaga citra profitabilitas di mata investor. Dengan standar deviasi 0.83867, terlihat adanya perbedaan kualitas pelaporan antara LKS besar dan kecil. Untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia, LKS di Indonesia harus meningkatkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) agar lebih informatif, jujur, dan tidak menyesatkan, sehingga benar-benar mencerminkan substansi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Secara keseluruhan, nilai rata-rata untuk masing-masing variabel berada di sekitar atau sedikit di atas ambang batas moderat, namun sebagian besar variabel utama seperti *Islamic Corporate Governance* (ICG), *Internal Control Effectiveness* (INC), dan *Financial Reporting Quality* (FRQ) masih tertahan di bawah angka 3 (tiga). Hal ini mengindikasikan adanya persepsi positif yang bersifat transisional, di mana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia telah membangun infrastruktur formal, namun belum mencapai tahap maturitas yang ideal dalam

implementasi substansialnya. Ketertinggalan yang sangat mencolok terlihat pada variabel *Accounting Ethics* (AE) yang memiliki rata-rata terendah (2.16907), menunjukkan adanya krisis integritas profesional yang kontradiktif dengan nilai-nilai syariah. Sebaliknya, konsistensi tinggi ditemukan pada variabel *Fraud Prevention* (FP) yang mencapai nilai tertinggi (3.17893), menandakan bahwa meskipun aspek etika individu masih lemah, mekanisme pertahanan sistemik terhadap kecurangan telah diterapkan secara lebih seragam dan tegas. Kondisi ini memberikan argumen kuat bahwa LKS di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan antara kecanggihan sistem kontrol teknis dengan internalisasi etika Islam, guna menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya akurat secara administratif tetapi juga jujur secara teologis.

Data responden yang diolah pada bagian statistik deskriptif dalam penelitian ini menunjukkan gambaran informasi umum mengenai respon setiap individu dalam menjawab indikator setiap variabel sesuai dengan kondisi responden itu sendiri berkaitan persepsi mereka tentang *Islamic Corporate Governance*, *Accounting Ethics*, *Internal Control Effectiveness*, *Financial Reporting Quality* dan *Fraud Prevention* di sebuah lembaga keuangan syariah. Hasil dari jawaban masing-masing responden merupakan gambaran deskripsi variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Penyebaran kuesioner melalui *google form* yang dibagikan melalui media *whatsapp*, *email* yang dibantu oleh Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) yang dibagikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan dinyatakan sebagai sampel penelitian. Jawaban responden dalam penelitian ini dikelompokkan serta diberi bobot dengan skala Likert dari 1 (satu) sampai dengan 4 (Empat) untuk pengisian jawaban kuesioner. Skala Likert adalah skala yang digunakan berdasarkan penjumlahan sikap responden dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-indikator dari suatu variabel yang akan diukur. Pengukuran skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 1 (satu)= Sangat Tidak Setuju, 2 (dua)= Tidak Setuju, 3 (tiga)= Setuju, dan 4 (empat)=Sangat Setuju. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

#### 4.1.8. Deskriptif *Islamic Corporate Governance*

Variabel *Islamic Corporate Governance* terdiri dari 6 (enam) dimensi dan 20 item pernyataan, berikut hasil analisis deskriptif rata-rata dari hasil tanggapan responden, yang diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Deskriptif *Islamic Corporate Governance***

Dimensi	Item	SS	S	TS	STS	N	ST	SI	%	Rata - Rata	Std Deviasi	Rata-Rata Sub
		4	3	2	1							
TRA	TRA1	60	65	56	16	197	563	788	71.4	2.86	0.95	70.94
	TRA2	62	62	52	21	197	559	788	70.9	2.84	0.99	
	TRA3	58	66	52	21	197	555	788	70.4	2.82	0.98	
AKT	AKT1	49	72	61	15	197	549	788	69.7	2.79	0.90	72.37
	AKT2	47	68	65	17	197	539	788	68.4	2.74	0.92	
	AKT3	57	89	49	2	197	595	788	75.5	3.02	0.76	
	AKT4	60	86	49	2	197	598	788	75.9	3.04	0.77	
RES	RES1	54	69	67	7	197	564	788	71.6	2.86	0.86	70.43
	RES2	54	67	55	21	197	548	788	69.5	2.78	0.97	
	RES3	52	70	60	15	197	553	788	70.2	2.81	0.91	
IND	IND1	46	80	58	13	197	553	788	70.2	2.81	0.87	70.11
	IND2	36	101	45	15	197	552	788	70.1	2.80	0.82	
FAI	FAI11	44	78	57	18	197	542	788	68.8	2.75	0.90	72.00
	FAI12	59	89	46	3	197	598	788	75.9	3.04	0.77	
	FAI13	51	72	68	6	197	562	788	71.3	2.85	0.84	
SHC	SHC1	49	69	57	22	197	539	788	68.4	2.74	0.96	71.75
	SHC2	45	81	58	13	197	552	788	70.1	2.80	0.86	
	SHC3	56	86	52	3	197	589	788	74.7	2.99	0.78	
	SHC4	60	83	50	4	197	593	788	75.3	3.01	0.80	
	SHC5	49	71	68	9	197	554	788	70.3	2.81	0.86	
Total Skor Total											11,257	
Total Skor Ideal											15,760	
% Total											71.43	

Keterangan: D = Dimensi ; Ind = Indikator ; SS = Sangat Setuju ; S = Setuju ; TS = Tidak Setuju ; STS = Sangat Tidak Setuju ; N = Jumlah Data ; ST = Skor Total ; SI = Skor Ideal ; Min = Minimal ; Max = Maximal ; Std Dev = Standar Deviasi ; Indikator atau pertanyaan telah disajikan pada halaman lampiran

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 197 responden, variabel *Islamic Corporate Governance* (X1) yang merujuk pada kerangka Maysyaroh et al. (2024) secara keseluruhan memperoleh total skor aktual sebesar 11.257 dari skor ideal 15.760, sehingga mencapai persentase total sebesar 71,43%. Capaian ini menempatkan implementasi tata kelola perusahaan berbasis syariah pada lembaga keuangan yang diteliti dalam kategori Tinggi atau Baik. Hasil tersebut

mengindikasikan bahwa LKS telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam seperti *Shiddiq*, *Amanah*, *Tabliq*, *Huriyah*, dan *Tawazun* ke dalam struktur organisasinya, meskipun terdapat variasi persepsi pada indikator spesifik yang menunjukkan tantangan dalam mewujudkan tata kelola syariah yang sempurna.

Dimensi pertama, Transparansi atau Keterbukaan (*Shiddiq*), mencatatkan rata-rata sub-dimensi sebesar 70,94%. Pada indikator pertama (TRA1) mengenai akses mudah ke informasi layanan, diperoleh rata-rata 2,86 dengan standar deviasi 0,95, didukung oleh 60 responden Sangat Setuju (SS) dan 65 responden Setuju (S). Argumen yang mendasari hasil ini adalah responden merasakan kemudahan akses informasi sebagai bentuk kejujuran (*Shiddiq*) lembaga, namun keberadaan 56 responden yang menjawab Tidak Setuju (TS) menunjukkan bahwa platform digital informasi syariah mungkin belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan nasabah secara inklusif. Indikator kedua (TRA2) terkait kejelasan informasi mencatat rata-rata 2,84 (Std Dev 0,99), sementara indikator ketiga (TRA3) mengenai ketepatan waktu informasi memperoleh rata-rata 2,82 (Std Dev 0,98). Rendahnya rata-rata pada TRA3 mencerminkan ekspektasi responden terhadap pembaruan data yang lebih *real-time* untuk memastikan transparansi murni yang tidak menyembunyikan fakta keuangan apa pun.

Dimensi kedua, Akuntabilitas (*Amanah*), memperoleh rata-rata sub-dimensi sebesar 72,37%. Indikator pertama (AKT1) mengenai akurasi informasi mencatatkan rata-rata 2,79 (Std Dev 0,90). Indikator kedua (AKT2) terkait kelengkapan informasi mencatatkan rata-rata terendah pada dimensi ini yaitu 2,74 dengan 65 responden TS dan 17 responden Sangat Tidak Setuju (STS). Argumen responden memilih jawaban rendah ini berakar dari pandangan bahwa informasi akad syariah seringkali masih bersifat umum dan kurang mendetail dalam memaparkan risiko. Sebaliknya, indikator ketiga (AKT3) mengenai penyampaian kebijakan ke publik (Rata-rata 3,02) dan indikator keempat (AKT4) terkait konsistensi terhadap peraturan (Rata-rata 3,04) menunjukkan dukungan kuat dari 86 responden S. Hal ini menjadi argumen bahwa LKS dinilai sangat patuh pada regulasi eksternal sebagai bentuk tanggung jawab (*Amanah*) kepada otoritas dan umat.

Dimensi ketiga, Responsibility atau Pertanggungjawaban (*Tabliq*), mencatat rata-rata sebesar 70,43%. Indikator pertama (RES1) mengenai kepatuhan hukum mencatatkan rata-rata 2,86 (Std Dev 0,86). Indikator kedua (RES2) terkait kepedulian masyarakat dan lingkungan mencatat rata-rata 2,78, di mana terdapat 55 responden TS dan 21 responden STS. Rendahnya skor ini didasari argumen bahwa program tanggung jawab sosial syariah (CSR) lembaga mungkin belum terekspos secara luas atau belum dirasakan dampaknya secara langsung oleh komunitas sekitar. Indikator ketiga (RES3) mengenai tanggung jawab layanan memperoleh rata-rata 2,81, menunjukkan bahwa lembaga telah berupaya menyampaikan (*Tabliq*) hak dan kewajiban nasabah, meskipun praktik di lapangan masih memerlukan konsistensi lebih tinggi.

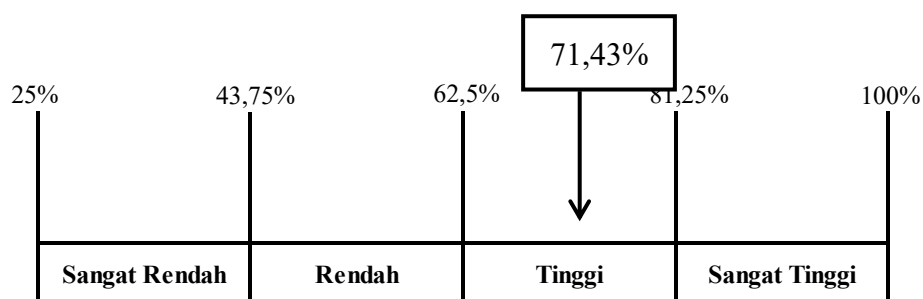
Dimensi keempat, Independensi atau Kemandirian (*Huriyah*), memperoleh rata-rata terendah yaitu 70,11%. Indikator pertama (IND1) mengenai perlindungan kepentingan nasabah mencatat rata-rata 2,81. Indikator kedua (IND2) mengenai objektivitas pengambilan keputusan mencatat rata-rata 2,80 dengan standar deviasi 0,82. Argumen mendalam di balik hasil ini adalah adanya persepsi bahwa pengambilan keputusan di LKS terkadang masih dipengaruhi oleh tekanan struktur induk atau kepentingan pemegang saham, yang dalam konsep *Huriyah* seharusnya bersifat independen dan murni didasarkan pada prinsip kemaslahatan umat serta aturan syariah tanpa intervensi pihak luar.

Dimensi kelima, Fairness atau Kesetaraan (*Tawazun*), mencapai rata-rata 72,00%. Indikator pertama (FAI1) terkait perlakuan sama terhadap pelanggan mencatat rata-rata 2,75. Namun, indikator kedua (FAI2) mengenai pemberian kesempatan masukan atau kritik memperoleh rata-rata tinggi sebesar 3,04 dengan dukungan 89 responden S. Argumen utama responden memilih Setuju adalah LKS dipandang sangat terbuka terhadap kritik sebagai implementasi nilai musyawarah. Indikator ketiga (FAI3) terkait tindak lanjut keluhan mencatat rata-rata 2,85, yang menunjukkan bahwa meskipun masukan diterima dengan baik, kecepatan dalam menindaklanjuti keluhan tersebut masih dipandang belum seimbang (*Tawazun*) dengan harapan nasabah.

Dimensi terakhir, *Shariah Compliance* (Prinsip Syariah), mencatatkan rata-rata sebesar 71,75%. Indikator SHC1 mengenai ketiadaan *riba*, *gharar*, dan *maysir* mencatat rata-rata 2,74 dengan 57 responden TS dan 22 responden STS. Argumen yang melandasi keraguan responden ini adalah masih adanya persepsi kemiripan antara produk syariah dengan konvensional di mata publik. Indikator SHC2 terkait bisnis berorientasi keuntungan halal mencatat rata-rata 2,80. Indikator SHC3 mengenai mandat kepercayaan nasabah meraih rata-rata 2,99, sementara indikator keempat (SHC4) mengenai peran efektif Dewan Pengawas Syariah (DPS) meraih rata-rata tinggi sebesar 3,01 didukung 83 responden S. Hasil ini memberikan argumen kuat bahwa responden sangat mempercayai kredibilitas DPS sebagai penjaga gawang syariah dalam lembaga. Terakhir, indikator SHC5 mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah mencatat rata-rata 2,81, yang menunjukkan transparansi dalam pengelolaan dana sosial syariah dinilai sudah cukup amanah.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa implementasi *Islamic Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah mencapai skor rata-rata total 71,43% dari skor ideal, yang mengindikasikan kualitas yang berada pada kategori Tinggi atau Baik. Setiap dimensi menunjukkan nilai di atas 70%, dengan dimensi Akuntabilitas (*Amanah*) mencatatkan skor tertinggi (72,37%) dan dimensi Independensi (*Huriyah*) dengan skor terendah (70,11%). Meskipun persepsi terhadap tata kelola syariah cukup positif, hasil ini menunjukkan adanya beberapa area strategis yang harus ditingkatkan, terutama dalam hal menjaga independensi keputusan dan memurnikan praktik transaksi dari unsur non-syariah guna memperkuat kepercayaan nasabah secara jangka panjang.

Berdasarkan tabel di atas, hasil rekapitulasi analisis deskriptif pada variabel *Islamic Corporate Governance* (X1) diperoleh hasil skor total sebesar 11.257 dengan rata-rata persentase sebesar 71,43%. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kategorisasi jawaban responden secara keseluruhan mengenai variabel ini, peneliti menggunakan garis kontinum sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Garis Kontinum Variabel *Islamic Corporate Governance***

Berdasarkan tabel dan garis kontinum di atas, diperoleh hasil persentase sebesar 71,43% dari skor ideal, sehingga dapat dinyatakan bahwa praktik *Islamic Corporate Governance* pada lembaga keuangan syariah yang diteliti berada pada kategori Tinggi

**4.1.9. Deskriptif *Accounting Ethics***

Tabel berikut menyajikan deskripsi statistik mengenai variabel *Accounting Ethics* terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 20 item pernyataan. Masing-masing dimensi diwakili oleh sejumlah indikator yang dinilai berdasarkan tingkat persetujuan responden menggunakan skala Likert dari Sangat Setuju (SS) hingga Sangat Tidak Setuju (STS). Analisis ini melibatkan jumlah responden sebanyak 197, dengan perhitungan skor total, skor ideal, rata-rata, persentase, serta standar deviasi untuk setiap indikator dan dimensi. Hasil pengolahan data memberikan gambaran mengenai tingkat penerapan nilai-nilai etika kerja Islam di antara responden, yang dirangkum dalam persentase keseluruhan sebesar 70,45%. Informasi lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.9**  
**Deskriptif *Accounting Ethics***

Dimensi	Item	SS	S	TS	STS	N	ST	SI	%	Rata - Rata	Std Deviasi	Rata-Rata Sub
		4	3	2	1							
AI	A11	38	79	59	21	197	528	788	67.0	2.68	0.90	70.76
	A12	56	83	54	4	197	585	788	74.2	2.97	0.80	
	A13	46	69	73	9	197	546	788	69.3	2.77	0.86	
	A14	42	75	62	18	197	535	788	67.9	2.72	0.90	
	A15	54	82	53	8	197	576	788	73.1	2.92	0.84	
	A16	43	78	57	19	197	539	788	68.4	2.74	0.91	
AO	A17	60	82	53	2	197	594	788	75.4	3.02	0.78	70.43
	AO1	57	88	50	2	197	594	788	75.4	3.02	0.76	
	AO2	51	69	72	5	197	560	788	71.1	2.84	0.84	
	AO3	41	77	59	20	197	533	788	67.6	2.71	0.91	
	AO4	48	75	61	13	197	552	788	70.1	2.80	0.88	
	AO5	39	83	61	14	197	541	788	68.7	2.75	0.85	
PC	AO6	37	98	46	16	197	550	788	69.8	2.79	0.84	70.16
	PC1	39	80	60	18	197	534	788	67.8	2.71	0.89	
	PC2	51	71	66	9	197	558	788	70.8	2.83	0.87	
	PC3	59	64	64	10	197	566	788	71.8	2.87	0.90	
	PC4	37	98	46	16	197	550	788	69.8	2.79	0.84	

Dimensi	Item	SS	S	TS	STS	N	ST	SI	%	Rata - Rata	Std Deviasi	Rata-Rata Sub
		4	3	2	1							
	PC5	54	69	66	8	197	563	788	71.4	2.86	0.87	
	PC6	52	70	67	8	197	560	788	71.1	2.84	0.86	
	PC7	45	77	53	22	197	539	788	68.4	2.74	0.94	
Total Skor Total											11,103	
Total Skor Ideal											15,760	
% Total											70.45	

Keterangan: D = Dimensi ; Ind = Indikator ; SS = Sangat Setuju ; S = Setuju ; TS = Tidak Setuju ; STS = Sangat Tidak Setuju ; N = Jumlah Data ; ST = Skor Total ; SI = Skor Ideal ; Min = Minimal ; Max = Maximal ; Std Dev = Standar Deviasi ; Indikator atau pertanyaan telah disajikan pada halaman lampiran

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 197 responden, variabel *Accounting Ethics* (X2) yang merujuk pada kerangka kerja Nkuranga & Tarus (2023) secara keseluruhan memperoleh total skor aktual sebesar 11.103 dari skor ideal 15.760, sehingga mencapai persentase total sebesar 70,45%. Capaian ini menempatkan implementasi etika akuntansi pada lembaga keuangan syariah dalam kategori Tinggi atau Baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa para akuntan di lembaga tersebut telah memiliki kesadaran etis yang kuat, yang mencakup integritas, objektivitas, serta kompetensi profesional guna menjaga amanah para pemangku kepentingan.

Dimensi pertama, *Accounting Integrity* (AI), mencatatkan rata-rata sub-dimensi sebesar 70,76%. Indikator pertama (AI1) mengenai pemahaman akuntan terhadap benar dan salah dalam pelaporan memperoleh rata-rata 2,68 dengan standar deviasi 0,90, didukung oleh 38 responden Sangat Setuju (SS) dan 79 responden Setuju (S), namun terdapat 59 responden Tidak Setuju (TS). Argumennya adalah meskipun mayoritas paham, adanya jawaban TS menunjukkan adanya tantangan dalam menentukan batasan etis pada praktik lapangan yang kompleks. Indikator AI2 mengenai kejujuran mencatat rata-rata 2,97 (Std Dev 0,80) dengan dukungan 83 responden S, yang menunjukkan internalisasi nilai Siddiq berjalan baik. Indikator AI3 terkait kehati-hatian (rata-rata 2,77) dan AI4 mengenai laporan yang jelas (rata-rata 2,72) mencerminkan persepsi bahwa ketelitian akuntan masih terbebani oleh tingginya volume transaksi syariah. Indikator AI5 terkait akuntabilitas tinggi mencatat rata-rata 2,92 dengan 82 responden S. Sementara itu, AI6 mengenai ketiadaan keterlibatan korupsi (rata-rata 2,74) didukung oleh 78

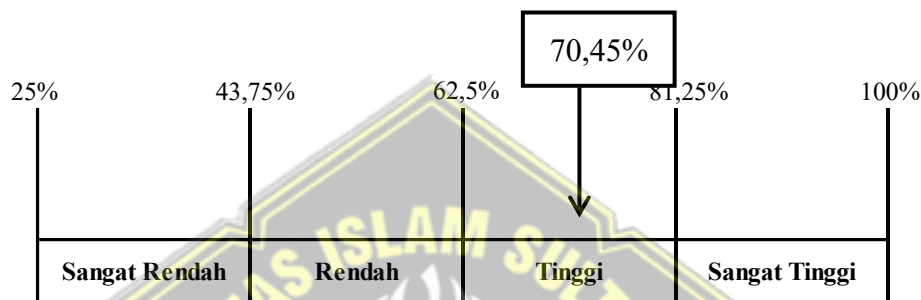
responden S, meskipun ekspektasi pengawasan tetap tinggi. Indikator AI7 terkait manajemen waktu mencatat skor tertinggi di dimensi ini (3,02) dengan 82 responden S, menunjukkan disiplin tinggi akuntan terhadap tenggat waktu pelaporan.

Dimensi kedua, *Accounting Objectivity* (AO), mencapai rata-rata sub-dimensi sebesar 70,43%. Indikator AO1 mengenai keteguhan pribadi membuat keputusan tanpa bias mencatat rata-rata 3,02 (Std Dev 0,76) dengan dukungan 88 responden S. Argumennya adalah akuntan memiliki kemandirian moral untuk menolak intervensi kepentingan sepihak. Indikator AO2 terkait penyelidikan penipuan tanpa memedulikan hubungan pribadi mencatat rata-rata 2,84 (Std Dev 0,84) dengan 72 responden TS, mengindikasikan hambatan budaya "tidak enak hati" masih ada dalam LKS. Indikator AO3 mengenai pendapat yang objektif memperoleh rata-rata 2,71, sementara AO4 mengenai pelaporan ke manajemen tingkat tertinggi mencatat rata-rata 2,80. Indikator AO5 terkait ketiadaan kompromi pada kualitas (rata-rata 2,75) dan AO6 mengenai penggunaan fakta yang dapat diverifikasi (rata-rata 2,79) menunjukkan akuntan berupaya keras menjaga profesionalitas di tengah tekanan target operasional lembaga.

Dimensi ketiga, *Professional Competence and Due Care* (PC), mencatatkan rata-rata sub-dimensi sebesar 70,16%. Indikator PC1 mengenai pengetahuan profesional memiliki rata-rata 2,71 dengan 80 responden S, dan PC2 mengenai kemampuan bekerja di bawah tekanan mencatat rata-rata 2,83. Indikator PC3 terkait kekuatan batin untuk keputusan etis meraih rata-rata 2,87, didukung 59 responden SS. Argumennya adalah aspek spiritualitas syariah menjadi motor penggerak etika profesi. Indikator PC4 terkait pelatihan berkelanjutan mencatat rata-rata 2,79 dengan 98 responden S, dan PC5 terkait pembaruan informasi terkini meraih rata-rata 2,86. Indikator PC6 mengenai komunikasi efektif mencatat rata-rata 2,84. Terakhir, PC7 terkait bertindak dengan hati-hati sesuai standar teknis memperoleh rata-rata 2,74, menunjukkan perlunya peningkatan ketelitian dalam penerapan standar akuntansi syariah yang kian dinamis.

Secara keseluruhan, data pada tabel menunjukkan bahwa praktik etika akuntansi pada lembaga keuangan syariah mencapai skor rata-rata total 70,45% dari skor

ideal, yang mengindikasikan kualitas pada kategori Tinggi atau Baik. Setiap dimensi berada di atas angka 70%, dengan dimensi *Accounting Integrity* mencatat skor tertinggi (70,76%) dan dimensi *Professional Competence and Due Care* dengan skor terendah (70,16%). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun integritas akuntan sudah sangat kuat, lembaga tetap harus memprioritaskan pengembangan kompetensi teknis berkelanjutan guna menjaga transparansi dan kepercayaan umat secara jangka panjang.



**Gambar 4.2**  
**Garis Kontinum Variabel *Accounting Ethics***

#### 4.1.10. Deskriptif *Internal Control Effectiveness*

Tabel 4.10 menampilkan hasil deskriptif terkait *internal control effectiveness* pada lembaga keuangan syariah berdasarkan beberapa dimensi utama, yaitu efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Setiap dimensi ini dievaluasi melalui beberapa indikator atau item pertanyaan yang mengukur seberapa baik lembaga keuangan syariah menjalankan pengendalian internal dalam hal efisiensi operasional, keakuratan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam tabel tersebut, setiap item ditampilkan dengan jumlah responden yang menyatakan tingkat persetujuan mereka, diukur dari skala "Sangat Setuju" hingga "Sangat Tidak Setuju". Hasil ini kemudian dihitung untuk memperoleh persentase tingkat kesesuaian (%), rata-rata, dan standar deviasi, yang menunjukkan konsistensi dan tingkat variabilitas respons. Untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dapat dilihat pada tabel Deskriptif *Internal Control Effectiveness* sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Deskriptif *Internal Control Effectiveness***

Dimensi	Item	SS	S	TS	STS	N	ST	SI	%	Rata - Rata	Std Deviasi	Rata-Rata Sub
		4	3	2	1							
EEO	EEO1	68	58	62	9	197	579	788	73.5	2.94	0.92	71.61
	EEO2	63	57	63	14	197	563	788	71.4	2.86	0.95	
	EEO3	64	57	59	17	197	562	788	71.3	2.85	0.97	
	EEO4	54	70	54	19	197	553	788	70.2	2.81	0.95	
KLK	KLK1	50	78	52	17	197	555	788	70.4	2.82	0.91	73.79
	KLK2	59	60	53	25	197	547	788	69.4	2.78	1.01	
	KLK3	83	67	39	8	197	619	788	78.6	3.14	0.87	
	KLK4	70	78	42	7	197	605	788	76.8	3.07	0.84	
KHP	KHP1	83	62	45	7	197	615	788	78.0	3.12	0.88	74.65
	KHP2	67	74	42	14	197	588	788	74.6	2.98	0.92	
	KHP3	58	86	38	15	197	581	788	73.7	2.95	0.89	
	KHP4	52	86	44	15	197	569	788	72.2	2.89	0.88	
Total Skor Total											6,936	
Total Skor Ideal											9,456	
% Total											73.35	

Keterangan: D = Dimensi ; Ind = Indikator ; SS = Sangat Setuju ; S = Setuju ; TS = Tidak Setuju ; STS = Sangat Tidak Setuju ; N = Jumlah Data ; ST = Skor Total ; SI = Skor Ideal ; Min = Minimal ; Max = Maximal ; Std Dev = Standar Deviasi ; Indikator atau pertanyaan telah disajikan pada halaman lampiran

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 197 responden, variabel *Internal Control Effectiveness* (X3) yang merujuk pada kerangka kerja Pham et al. (2023) secara keseluruhan memperoleh total skor aktual sebesar 6.936 dari skor ideal 9.456, sehingga mencapai persentase total sebesar 73,35%. Capaian ini menempatkan efektivitas pengendalian internal pada lembaga keuangan syariah yang diteliti dalam kategori Tinggi atau Baik. Secara umum, hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian yang diterapkan telah mampu memitigasi risiko operasional dan menjaga kepatuhan syariah, meskipun terdapat beberapa indikator spesifik yang memerlukan optimasi guna mencapai kualitas pengendalian yang lebih sempurna.

Dimensi pertama, Efisiensi dan Efektivitas Operasi (EEO), mencatatkan rata-rata sub-dimensi sebesar 71,61%. Pada indikator pertama (EEO1) mengenai pernyataan bahwa dengan usaha yang wajar, efisiensi operasional seharusnya bisa ditingkatkan lebih jauh, diperoleh skor rata-rata 2,94 dengan standar deviasi 0,92, didukung oleh 68 responden Sangat Setuju (SS) dan 58 responden Setuju (S), namun terdapat 62 responden Tidak Setuju (TS) dan 9 responden Sangat Tidak

Setuju (STS). Argumen yang mendasari hal ini adalah staf LKS menyadari adanya potensi perbaikan prosedur operasional agar lebih ramping dan tidak birokratis. Indikator kedua (EEO2) terkait kemungkinan masalah operasi yang jika diatasi akan menghasilkan rasio input-output yang lebih baik mencatatkan rata-rata 2,86 (Std Dev 0,95) dengan sebaran 63 responden SS, 57 responden S, 63 responden TS, dan 14 responden STS. Responden menilai bahwa hambatan teknis masih menjadi kendala dalam optimalisasi produktivitas kerja. Pada indikator ketiga (EEO3) mengenai tidak adanya tahap dalam proses yang diragukan efisiensinya, diperoleh rata-rata 2,85 (Std Dev 0,97) dengan 59 responden TS dan 17 responden STS. Hal ini menyiratkan adanya keraguan praktisi lapangan terhadap alur kerja syariah yang kompleks. Indikator keempat (EEO4) mengenai penggunaan sumber daya dengan lebih efisien mencatatkan skor terendah di dimensi ini yaitu 2,81 (Std Dev 0,95) dengan 54 responden TS dan 19 responden STS, yang menjadi argumen bahwa pengalokasian SDM maupun teknologi pada fungsi tertentu di LKS dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.

Dimensi kedua, Keandalan Laporan Keuangan (KLK), memperoleh rata-rata sub-dimensi sebesar 73,79%. Indikator pertama (KLK1) terkait pernyataan bahwa lembaga tidak sepenuhnya memastikan laporan manajemen dapat dipercaya sehingga perlu verifikasi ulang, mencatat rata-rata 2,82 (Std Dev 0,91) dengan 78 responden S. Hal ini mencerminkan sikap kehati-hatian (*prudence*) untuk menghindari salah saji materil. Indikator kedua (KLK2) mengenai keharusan memperbaiki kesalahan laporan setelah dikonfirmasi mencatatkan rata-rata 2,78 (Std Dev 1,01), yang merupakan skor terendah di dimensi ini karena adanya 53 responden TS dan 25 responden STS. Argumen responden adalah kontrol internal seringkali baru mendeteksi kesalahan di tahap akhir pelaporan. Sebaliknya, indikator ketiga (KLK3) mengenai penerimaan informasi tentang kesalahan laporan dari pihak eksternal meraih skor tertinggi di seluruh variabel X3 dengan rata-rata 3,14 (Std Dev 0,87), didukung oleh 83 responden SS dan 67 responden S. Ini menunjukkan LKS sangat responsif terhadap masukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun regulator lainnya. Indikator keempat (KLK4) terkait masalah dengan program akuntansi mencatatkan rata-rata 3,07 (Std Dev 0,84) dengan 78

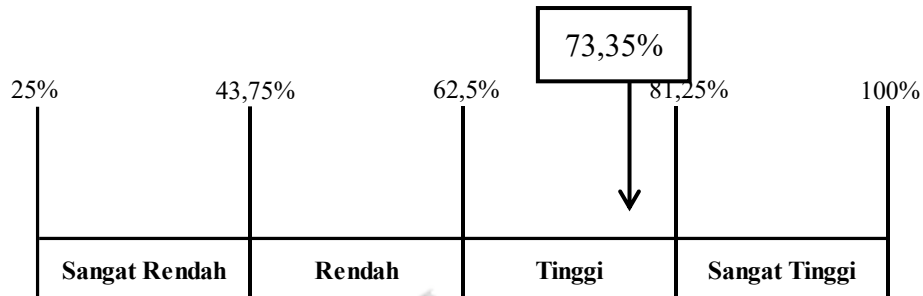
responden S, yang berargumen bahwa keandalan laporan sangat bergantung pada integritas sistem informasi akuntansi berbasis akad syariah.

Dimensi ketiga, Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan (KHP), mencatatkan rata-rata sub-dimensi tertinggi sebesar 74,65%. Indikator pertama (KHP1) mengenai tantangan dalam menerapkan peraturan perusahaan mencatatkan rata-rata 3,12 (Std Dev 0,88) dengan dukungan 83 responden SS dan 62 responden S. Argumennya adalah kepatuhan pada regulasi ganda (perbankan umum dan Fatwa DSN-MUI) merupakan tantangan berat namun diprioritaskan. Indikator kedua (KHP2) terkait perubahan peraturan yang datang tiba-tiba mencatat rata-rata 2,98 (Std Dev 0,92) dengan 74 responden S, menunjukkan sistem pengendalian harus selalu dinamis merespons kebijakan regulator. Indikator ketiga (KHP3) mengenai kesulitan staf dalam mematuhi hukum mencatatkan rata-rata 2,95 (Std Dev 0,89) dengan 86 responden S, yang mengindikasikan perlunya penguatan pelatihan kompetensi syariah bagi SDM. Terakhir, indikator keempat (KHP4) mengenai ketiadaan individu yang bertanggung jawab memantau perubahan peraturan mencatat rata-rata 2,89 (Std Dev 0,88) dengan 86 responden S, yang menjadi argumen bahwa LKS memerlukan unit kepatuhan yang lebih dedikatif untuk memantau fluktuasi regulasi terbaru.

Secara keseluruhan, data pada tabel ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal pada lembaga keuangan syariah mencapai skor rata-rata total 73,35% dari skor ideal, yang mengindikasikan kualitas yang berada pada kategori Tinggi atau Baik. Setiap dimensi menunjukkan nilai di atas 70%, dengan dimensi Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan (KHP) mencatatkan skor tertinggi (74,65%) dan dimensi Efisiensi dan Efektivitas Operasi (EEO) dengan skor terendah (71,61%). Meskipun persepsi terhadap efektivitas pengendalian internal cukup positif, hasil ini menunjukkan adanya beberapa area yang dapat diperbaiki, terutama dalam meningkatkan efisiensi proses operasional dan akurasi pelaporan keuangan sejak tahap input data guna memperkuat integritas lembaga secara menyeluruh.

Berdasarkan tabel di atas, hasil rekapitulasi analisis deskriptif pada variabel *Internal Control Effectiveness* (X3) diperoleh hasil skor total sebesar 6.936 dengan

rata-rata persentase sebesar 73,35%. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kategorisasi jawaban responden secara keseluruhan mengenai variabel ini, peneliti menggunakan garis kontinum sebagai berikut:



**Gambar 4.3**  
**Garis Kontinum Variabel *Internal Control Effectiveness***

Berdasarkan tabel dan garis kontinum di atas, diperoleh hasil skor pada variabel *Internal Control Effectiveness* sebesar 6.936 atau dengan persentase sebesar 73,35% dari skor ideal, sehingga dapat dinyatakan bahwa efektivitas pengendalian internal pada lembaga keuangan syariah yang diteliti berada pada kategori Tinggi.

#### 4.1.11. Deskriptif *Fraud Prevention*

*Fraud Prevention*, penting untuk memahami bahwa pencegahan kecurangan merupakan salah satu elemen utama dalam menjaga integritas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Dimensi pencegahan kecurangan dirancang untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa semua aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Analisis data dalam tabel berikut menggambarkan sejauh mana kebijakan dan langkah yang diterapkan perusahaan telah efektif dalam mencegah kecurangan berdasarkan tanggapan responden terhadap berbagai indikator yang relevan.

**Tabel 4.11**  
**Deskriptif *Fraud Prevention***

Dimensi	Item	SS	S	TS	STS	N	ST	SI	%	Rata - Rata	Std Deviasi	Rata-Rata Sub
		4	3	2	1							
EAP	EAP1	70	93	30	4	197	623	788	79.1	3.16	0.75	80.39
	EAP2	84	88	19	6	197	644	788	81.7	3.27	0.76	
SPP	SPP1	89	86	20	2	197	656	788	83.2	3.33	0.70	80.67
	SPP2	76	93	25	3	197	636	788	80.7	3.23	0.72	

Dimensi	Item	SS	S	TS	STS	N	ST	SI	%	Rata - Rata	Std Deviasi	Rata-Rata Sub
		4	3	2	1							
	SPP3	65	95	33	4	197	615	788	78.0	3.12	0.75	
CT	CT1	82	58	33	24	197	592	788	75.1	3.01	1.03	76.78
	CT2	79	66	39	13	197	605	788	76.8	3.07	0.93	
	CT3	79	74	36	8	197	618	788	78.4	3.14	0.85	
SF	SF1	81	91	20	5	197	642	788	81.5	3.26	0.74	80.08
	SF2	77	86	26	8	197	626	788	79.4	3.18	0.81	
	SF3	86	67	32	12	197	621	788	78.8	3.15	0.91	
	SF4	77	96	15	9	197	635	788	80.6	3.22	0.77	
Total Skor Total											7,513	
Total Skor Ideal											9,456	
% Total											79.45	

Keterangan: D = Dimensi ; Ind = Indikator ; SS = Sangat Setuju ; S = Setuju ; TS = Tidak Setuju ; STS = Sangat Tidak Setuju ; N = Jumlah Data ; ST = Skor Total ; SI = Skor Ideal ; Min = Minimal ; Max = Maximal ; Std Dev = Standar Deviasi ; Indikator atau pertanyaan telah disajikan pada halaman lampiran

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 197 responden, variabel *Fraud Prevention* (Z) yang merujuk pada kerangka Melindawati et al. (2023) secara keseluruhan memperoleh total skor aktual sebesar 7.513 dari skor ideal 9.456, sehingga mencapai persentase total sebesar 79,45%. Capaian ini menempatkan upaya pencegahan kecurangan pada lembaga keuangan syariah yang diteliti dalam kategori Tinggi atau Sangat Baik. Hasil ini mengindikasikan bahwa LKS telah memiliki benteng pertahanan yang kuat dalam menjaga integritas operasional dan kepercayaan nasabah melalui mekanisme pencegahan yang sistematis, meskipun terdapat variasi pada efektivitas teknik pengendalian tertentu.

Dimensi pertama, *Establishment of Anti-Fraud Policy* (EAP), mencatatkan rata-rata sub-dimensi sebesar 80,39%. Pada indikator pertama (EAP1) mengenai penetapan kebijakan *anti-fraud* oleh perusahaan, diperoleh skor rata-rata 3,16 dengan standar deviasi 0,75, didukung oleh 70 responden Sangat Setuju (SS) dan 93 responden Setuju (S). Argumen yang mendasari hal ini adalah keberadaan kebijakan tertulis memberikan landasan hukum dan etika yang jelas bagi seluruh staf untuk menghindari tindakan menyimpang. Indikator kedua (EAP2) terkait adanya komitmen antara manajemen dan karyawan untuk melaksanakan kegiatan *anti-fraud* mencatatkan rata-rata 3,27 (Std Dev 0,76) dengan dukungan 84 responden SS dan 88 responden S. Responden memberikan penilaian tinggi karena

dalam konteks syariah, komitmen ini dipandang sebagai bentuk pemenuhan akad dan amanah yang harus dijaga bersama antara pimpinan dan staf guna menghindari *bathil*.

Dimensi kedua, *Standard Prevention Procedures* (SPP), meraih rata-rata sub-dimensi tertinggi sebesar 80,67%. Indikator pertama (SPP1) mengenai pemisahan fungsi pengendalian internal untuk menciptakan kondisi saling memeriksa (*check and balance*) mencatat rata-rata 3,33 (Std Dev 0,70) dengan 89 responden SS dan 86 responden S. Argumen responden adalah pemisahan tugas merupakan kunci utama dalam LKS untuk mencegah adanya dominasi transaksi oleh satu individu yang rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Indikator kedua (SPP2) terkait sistem komputer yang memadai dalam hal *review* keuangan memperoleh rata-rata 3,23 (Std Dev 0,72) dengan 76 responden SS dan 93 responden S. Pada indikator ketiga (SPP3) mengenai prosedur mendeteksi *fraud* secara otomatis dalam sistem, diperoleh rata-rata 3,12 (Std Dev 0,75) dengan dukungan 65 responden SS dan 95 responden S. Hal ini menunjukkan bahwa LKS telah mengadopsi teknologi informasi untuk memantau transaksi secara *real-time*, yang dinilai lebih efektif dibandingkan pengawasan manual.

Dimensi ketiga, *Control Techniques* (CT), memperoleh rata-rata sub-dimensi sebesar 76,78%, yang merupakan nilai relatif terendah dibandingkan dimensi lainnya. Indikator pertama (CT1) mengenai pembagian tugas yang jelas mencatat rata-rata 3,01 dengan standar deviasi tertinggi (1,03), di mana terdapat 33 responden Tidak Setuju (TS) dan 24 responden Sangat Tidak Setuju (STS). Argumen mendalam di balik hasil ini adalah adanya persepsi responden bahwa pada beberapa unit kerja, masih terjadi tumpang tindih deskripsi pekerjaan (*job overlap*) yang berpotensi menjadi celah kecurangan. Indikator kedua (CT2) terkait kontrol komputer kepada yang memiliki akses mencatat rata-rata 3,07 (Std Dev 0,93) dengan 79 responden SS. Indikator ketiga (CT3) mengenai manual pengendalian terhadap *file-file* komputer mencatatkan rata-rata 3,14 (Std Dev 0,85) dengan dukungan 79 responden SS dan 74 responden S. Rendahnya skor pada dimensi ini secara keseluruhan menyiratkan bahwa teknik kontrol fisik dan manajerial masih

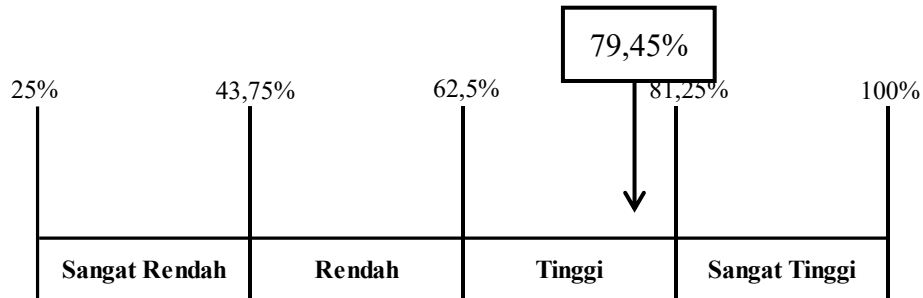
perlu dipertegas agar tidak ada individu yang memiliki akses berlebih tanpa pengawasan.

Dimensi terakhir, *Sensitivity to Fraud* (SF), mencatatkan rata-rata sub-dimensi sebesar 80,08%. Indikator pertama (SF1) terkait kualifikasi calon pegawai yang harus mendapat perhatian khusus mencatat rata-rata 3,26 (Std Dev 0,74) dengan dukungan 81 responden SS dan 91 responden S. Argumen responden adalah pencegahan *fraud* di LKS dimulai dari proses rekrutmen untuk memastikan aspek integritas (*Siddiq*) calon karyawan. Indikator kedua (SF2) mengenai dorongan pelaporan transaksi mencurigakan (*whistleblowing*) memperoleh rata-rata 3,18 (Std Dev 0,81). Indikator ketiga (SF3) terkait larangan lembur tanpa pengawasan mencatatkan rata-rata 3,15 (Std Dev 0,91) dengan 86 responden SS, yang berargumen bahwa lembur merupakan waktu yang berisiko tinggi bagi terjadinya manipulasi data. Terakhir, indikator keempat (SF4) mengenai kewajiban cuti tahunan mencatat rata-rata 3,22 (Std Dev 0,77) dengan 77 responden SS dan 96 responden S. Kewajiban cuti dinilai efektif karena saat pegawai cuti, posisinya akan digantikan sementara, sehingga tindakan kecurangan yang mungkin disembunyikan dapat terdeteksi oleh pegawai pengganti.

Secara keseluruhan, data pada tabel ini menunjukkan bahwa pencegahan kecurangan pada lembaga keuangan syariah mencapai skor rata-rata total 79,45% dari skor ideal, yang mengindikasikan kualitas yang berada pada kategori Tinggi atau Sangat Baik. Setiap dimensi menunjukkan nilai di atas 75%, dengan dimensi *Standard Prevention Procedures* (SPP) mencatatkan skor tertinggi (80,67%) dan dimensi *Control Techniques* (CT) dengan skor terendah (76,78%). Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa lembaga memiliki sistem pencegahan berbasis prosedur standar dan kebijakan yang sangat kuat, namun masih menghadapi tantangan pada aspek teknis pembagian tugas harian yang harus dipastikan lebih presisi guna menutup setiap celah risiko kecurangan.

Berdasarkan tabel di atas, hasil rekapitulasi analisis deskriptif pada variabel *Fraud Prevention* (Z) diperoleh hasil skor total sebesar 7.513 dengan rata-rata persentase sebesar 79,45%. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kategorisasi

jawaban responden secara keseluruhan mengenai variabel moderasi ini, peneliti menggunakan garis kontinum sebagai berikut:



**Gambar 4.4**  
**Garis Kontinum Variabel *Fraud Prevention***

Berdasarkan tabel dan garis kontinum di atas, diperoleh hasil persentase sebesar 79,45% dari skor ideal, sehingga dapat dinyatakan bahwa upaya *Fraud Prevention* pada lembaga keuangan syariah yang diteliti berada pada kategori Tinggi.

#### 4.1.12. Deskriptif Financial Reporting Quality

Tabel 4.12 menampilkan hasil deskriptif terkait financial reporting quality di lembaga keuangan syariah berdasarkan 4 (empat) dimensi utama yakni *Relevance* (Relevansi), *Faithful Representation* (Penyajian Wajar), *Understandability* (Keterpahaman), dan *Comparability* (Komparabilitas). Masing-masing dimensi diukur melalui beberapa indikator untuk menilai sejauh mana laporan keuangan lembaga tersebut dapat memberikan informasi yang relevan, akurat, mudah dipahami, dan konsisten dibandingkan periode sebelumnya atau dengan institusi lainnya.

Pada tabel ini, setiap indikator ditampilkan berdasarkan jumlah responden yang memberikan peringkat tingkat persetujuan, dari "Sangat Setuju" hingga "Sangat Tidak Setuju". Hasilnya kemudian diringkas dalam bentuk persentase kesesuaian (%), rata-rata, dan standar deviasi, untuk memberikan gambaran umum mengenai variabilitas dan tingkat konsistensi dalam persepsi responden.

Secara keseluruhan, financial reporting quality lembaga keuangan syariah ini menunjukkan persentase total sebesar 75,03%, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa pelaporan keuangan sudah cukup berkualitas. Namun, masih terdapat area yang memerlukan perbaikan, terutama dalam dimensi *Faithful Representation* dan *Understandability*, untuk memastikan informasi yang disajikan lebih seimbang dan mudah dimengerti. Untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif dapat dilihat pada tabel Deskriptif Kualitas Pelaporan Keuangan sebagai berikut:

**Tabel 4.12**  
**Deskriptif *Financial Reporting Quality***

Dimensi	Item	SS	S	TS	STS	N	ST	SI	%	Rata - Rata	Std Deviasi	Rata-Rata Sub
		4	3	2	1							
REL	REL1	65	92	35	5	197	611	788	77.5	3.10	0.77	76.19
	REL2	66	92	34	5	197	613	788	77.8	3.11	0.77	
	REL3	71	86	35	5	197	617	788	78.3	3.13	0.79	
	REL4	58	92	37	10	197	592	788	75.1	3.01	0.83	
	REL5	47	91	49	10	197	569	788	72.2	2.89	0.82	
FAR	FAR1	53	40	58	46	197	494	788	62.7	2.51	1.12	69.06
	FAR2	47	53	67	30	197	511	788	64.8	2.59	1.01	
	FAR3	53	67	59	18	197	549	788	69.7	2.79	0.94	
	FAR4	52	102	35	8	197	592	788	75.1	3.01	0.78	
	FAR5	49	97	37	14	197	575	788	73.0	2.92	0.85	
UND	UND1	53	60	62	22	197	538	788	68.3	2.73	0.98	74.62
	UND2	49	108	34	6	197	594	788	75.4	3.02	0.74	
	UND3	43	107	41	6	197	581	788	73.7	2.95	0.74	
	UND4	73	79	40	5	197	614	788	77.9	3.12	0.81	
	UND5	66	92	34	5	197	613	788	77.8	3.11	0.77	
COM	COM1	69	92	32	4	197	620	788	78.7	3.15	0.76	77.31
	COM2	72	89	32	4	197	623	788	79.1	3.16	0.76	
	COM3	77	70	47	3	197	615	788	78.0	3.12	0.82	
	COM4	64	79	51	3	197	598	788	75.9	3.04	0.80	
	COM5	60	80	53	4	197	590	788	74.9	2.99	0.81	
Total Skor Total											11.709	
Total Skor Ideal											15,760	
% Total											74.30	

Keterangan: D = Dimensi ; Ind = Indikator ; SS = Sangat Setuju ; S = Setuju ; TS = Tidak Setuju ; STS = Sangat Tidak Setuju ; N = Jumlah Data ; ST = Skor Total ; SI = Skor Ideal ; Min = Minimal ; Max = Maximal ; Std Dev = Standar Deviasi ; Indikator atau pertanyaan telah disajikan pada halaman lampiran

Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 197 responden, variabel *Financial Reporting Quality* yang diukur menggunakan kerangka dimensi *Relevance*, *Faithful Representation*, *Understandability*, dan *Comparability*

menunjukkan kualitas yang berada pada kategori Tinggi atau Baik dengan persentase total sebesar 74,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum, laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah yang diteliti telah mampu memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal penyajian informasi yang akuntabel sesuai dengan prinsip syariah. Namun, sebaran jawaban responden mencerminkan adanya persepsi yang sangat dinamis terhadap transparansi dan kepatuhan operasional lembaga.

Dimensi pertama, *Relevance*, mencapai rata-rata sub-dimensi sebesar 76,19%. Pada indikator pertama mengenai pengungkapan informasi berwawasan ke depan, diperoleh rata-rata 3,10 dengan standar deviasi 0,77, yang didukung oleh 65 responden Sangat Setuju (SS) dan 92 responden Setuju (S). Argumen yang mendasari hal ini adalah responden merasa lembaga telah transparan dalam memaparkan rencana strategis ekspansi produk syariah masa depan. Indikator kedua terkait penggunaan nilai wajar mencatat rata-rata 3,11 (Std Dev 0,77) dengan dukungan 66 responden SS dan 92 responden S, karena kebijakan ini dinilai lebih mencerminkan realitas pasar aset syariah saat ini dibandingkan nilai historis. Indikator ketiga mengenai biaya penyiapan laporan meraih skor tertinggi (3,13; Std Dev 0,79) dengan 71 responden SS dan 86 responden S, menunjukkan efisiensi operasional lembaga dalam menghasilkan informasi berkualitas tinggi. Namun, pada indikator ke empat terkait transparansi ekspektasi masa depan (rata-rata 3,01; Std Dev 0,83), terdapat 37 responden Tidak Setuju (TS) dan 10 responden Sangat Tidak Setuju (STS) yang mengisyaratkan keraguan responden terhadap akurasi prediksi bagi hasil di masa mendatang. Terakhir, indikator kelima mengenai informasi non-keuangan mencatat skor terendah di dimensi ini (2,89; Std Dev 0,82) dengan 49 responden TS, karena responden menganggap laporan masih kurang mendalam dalam menyajikan analisis risiko spesifik syariah, seperti risiko ketidakpatuhan syariah (*Shariah non-compliance risk*).

Dimensi kedua, *Faithful Representation*, mencatatkan nilai terendah sebesar 69,06%, yang mengindikasikan tantangan pada netralitas informasi syariah. Indikator pertama mengenai keseimbangan penyorotan peristiwa positif dan negatif memperoleh skor terendah di seluruh penelitian (rata-rata 2,51; Std Dev 1,12)

dengan 58 responden TS dan 46 responden STS. Alasan mendalam di balik ini adalah adanya persepsi responden bahwa lembaga keuangan syariah cenderung hanya memonjolkan sisi kedermawanan dan keuntungan halal, namun kurang terbuka dalam melaporkan kendala operasional atau kerugian pada pembiayaan tertentu. Indikator kedua terkait kepatuhan terhadap prinsip akuntansi mencatat rata-rata 2,59 (Std Dev 1,01) dengan 67 responden TS, yang menyiratkan keraguan responden terhadap ketegasan implementasi PSAK Syariah secara menyeluruh. Indikator ketiga mengenai pengungkapan isu tata kelola meraih rata-rata 2,79 (Std Dev 0,94) dengan 59 responden TS, karena responden merasa peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam laporan belum dipaparkan secara detail. Sementara itu, indikator keempat terkait keterbukaan isu lingkungan mendapat dukungan positif (3,01; Std Dev 0,78) dari 102 responden S sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaporan penyaluran dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah). Indikator kelima mengenai penjelasan pilihan akuntansi (rata-rata 2,92; Std Dev 0,85) didukung oleh 97 responden S karena membantu responden memahami metode bagi hasil yang diterapkan.

Dimensi ketiga, *Understandability*, meraih rata-rata 74,62%. Indikator pertama mengenai kualitas penyusunan laporan tahunan memiliki rata-rata 2,73 (Std Dev 0,98) dengan 62 responden TS, yang berargumen bahwa struktur laporan lembaga keuangan syariah seringkali terlalu kompleks karena penggabungan dana investasi dan dana bank. Indikator kedua terkait kejelasan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) didukung oleh 108 responden S (rata-rata 3,02; Std Dev 0,74) karena sangat membantu memperjelas rincian akad syariah yang digunakan. Indikator ketiga mengenai penggunaan bahasa teknis mencatat rata-rata 2,95 (Std Dev 0,74) dengan 107 responden S, menandakan istilah seperti Murabahah atau Mudharabah sudah cukup akrab bagi pemangku kepentingan. Indikator keempat mengenai glosarium komprehensif meraih skor tertinggi (3,12; Std Dev 0,81) dengan 73 responden SS, karena sangat krusial dalam menjembatani pemahaman istilah fikih muamalah bagi nasabah awam. Indikator kelima terkait penggunaan grafik dan tabel memiliki rata-rata 3,11 (Std Dev 0,77) dengan 92 responden S,

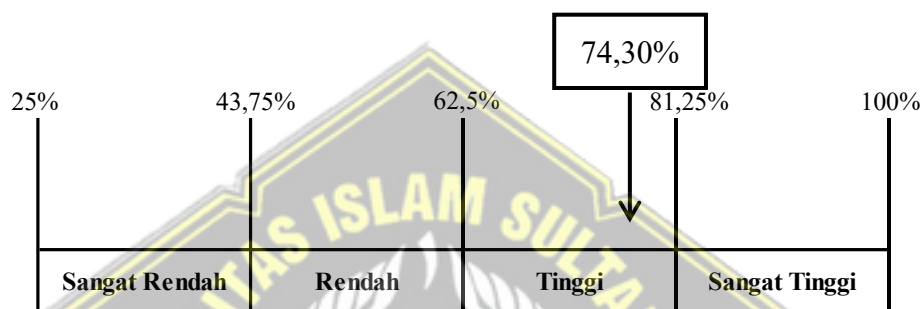
yang menilai visualisasi jauh lebih efektif dalam menunjukkan pertumbuhan aset syariah.

Dimensi terakhir, *Comparability*, menjadi kekuatan utama dengan rata-rata sub-dimensi tertinggi sebesar 77,31%. Indikator pertama mengenai revisi estimasi akuntansi didukung oleh 92 responden S (rata-rata 3,15; Std Dev 0,76) karena transparansi perubahan kebijakan akuntansi dianggap mempermudah penelusuran laba. Indikator kedua terkait perbandingan hasil periode saat ini dengan sebelumnya mencatatkan skor tertinggi di seluruh penelitian (rata-rata 3,16; Std Dev 0,76) dengan 72 responden SS dan 89 responden S, yang menunjukkan konsistensi pelaporan kinerja tahun-ke-tahun yang sangat baik. Indikator ketiga mengenai kesepadanan dengan organisasi lain didukung oleh 77 responden SS (rata-rata 3,12; Std Dev 0,82), karena format laporan dinilai telah mengikuti standar industri perbankan syariah nasional. Indikator keempat terkait penyajian rasio indeks keuangan mencatat rata-rata 3,04 (Std Dev 0,80) dengan 79 responden S, meskipun 51 responden TS berharap rasio efisiensi syariah ditampilkan lebih menonjol. Terakhir, indikator kelima mengenai perbandingan industri meraih rata-rata 2,99 (Std Dev 0,81) dengan 80 responden S, di mana responden mengapresiasi upaya lembaga menempatkan kinerjanya dalam konteks kompetisi industri keuangan syariah secara luas. Secara kolektif, hasil ini menunjukkan bahwa lembaga memiliki fundamental keterbandingan yang kuat, namun perlu memperkuat netralitas penyajian untuk mencapai kualitas laporan keuangan syariah yang ideal.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa financial reporting quality pada lembaga keuangan syariah mencapai persentase sebesar 74,30% dari skor ideal, yang mengindikasikan kualitas pelaporan yang berada pada kategori Baik. Sebagian besar dimensi menunjukkan capaian yang positif, dengan dimensi *Comparability* mencatat skor tertinggi (77,31%) dan dimensi *Faithful Representation* mencatat skor terendah (69,06%). Meskipun persepsi terhadap *financial reporting quality* secara umum sudah cukup positif, hasil ini menunjukkan adanya beberapa area strategis yang masih perlu diperbaiki, terutama dalam aspek penyajian yang netral dan seimbang antara informasi positif maupun negatif (*Faithful Representation*) serta peningkatan kualitas penyusunan laporan agar lebih

sistematis (*Understandability*), guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan tabel di atas, hasil rekapitulasi analisis deskriptif pada variabel *financial reporting quality* (Y) diperoleh hasil skor total sebesar 11.709 dengan rata-rata persentase sebesar 74,30%. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat kategorisasi jawaban responden secara keseluruhan mengenai *financial reporting quality*, peneliti menggunakan garis kontinum sebagai berikut:



**Gambar 4.5**  
**Garis Kontinum Variabel *Financial Reporting Quality***

Berdasarkan tabel dan garis kontinum di atas, diperoleh hasil skor pada variabel *financial reporting quality* sebesar 11.709 atau dengan persentase sebesar 74,30% dari skor ideal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *financial reporting quality* pada lembaga keuangan syariah yang diteliti berada pada kategori Tinggi.

#### 4.2. Analisis dan Pembahasan

Pada metode kuantitatif, ada tiga teknik untuk menganalisis data, teknik-teknik ini didasarkan pada jumlah variabel. Jika variabel ataupun indikator yang diukur atau yang diuji dalam suatu teknik statistika berjumlah tunggal maka teknik statistika yang digunakan disebut statistika *univariate*, sedangkan apabila jumlah variabel atau indikator yang diuji berjumlah banyak maka yang teknik statistika disebut dengan statistika *multivariate* (Abdillah & Jogiyanto, 2016:88). Dalam teknik *multivariate*, ada beberapa teknik untuk menganalisis data dan penelitian ini menggunakan SEM (*structural equation modeling*). Pada penelitian ini menggunakan teknik *multivariate* dikarenakan penelitian ini menganalisis hubungan

lebih dari dua variabel. Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan metode SEM (*structural equation modelling*) dengan *partial least squares* (PLS). *Partial least squares* (PLS) adalah teknik statistika multivarian yang melakukan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel *independent* berganda.

## 4.2.1 Hasil Uji Kelayakan Model

### 4.2.2.1. Pengujian Normalitas

Asumsi fundamental yang ada pada analisis *multivariate* adalah normalitas. Pengukuran pada data yang berdistribusi normal dengan nilai kritikal dari  $a - z$  berdasarkan level signifikan 0,05 error adalah antara +/- 1,96 (Hair et al, 2018). Pada tabel 4.14 berikut akan ditampilkan nilai dari skewness masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4. 13**  
**Uji Normalitas dengan Skewness**

Variabel	Nilai <i>Skewness</i>	Kesimpulan
<i>Islamic Corporate Governance</i> (X1)	-0.243	Normal
<i>Accounting Ethics</i> (X2)	-0.152	Normal
<i>Internal Control Effectiveness</i> (X3)	-0.327	Normal
<i>Fraud Prevention</i> (Z)	-0.359	Normal
<i>Financial Reporting Quality</i> (Y)	-0.465	Normal

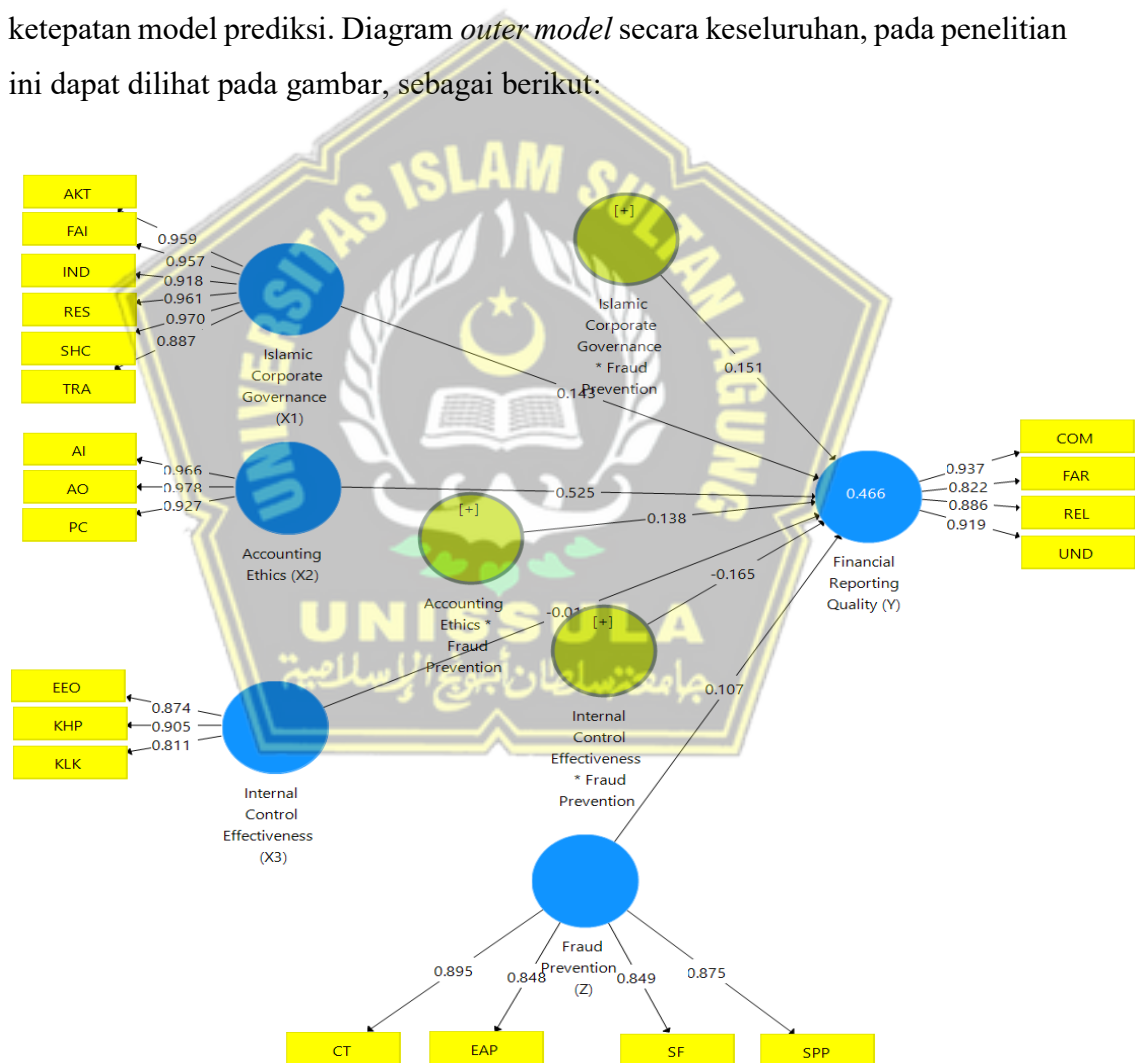
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2025

Berdasarkan hasil tabel di atas ditemukan bahwa variabel moderasi *Fraud Prevention* (Z) mencatat nilai -0,359 dan variabel dependen *Financial Reporting Quality* (Y) sebesar -0,465. maka distribusi data dianggap simetris dan tidak mengalami kemiringan yang ekstrem. Hasil uji ini menyatakan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini berstatus Normal. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk melanjutkan analisis ke tahap berikutnya, yaitu pengujian hipotesis mengenai pengaruh moderasi *Fraud Prevention* terhadap hubungan variabel independen (*Islamic Corporate Governance*, *Accounting Ethics*, *Internal Control Effectiveness*) dengan variabel dependen (*Financial Reporting Quality*). Dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, hasil investigasi mengenai bagaimana

*fraud prevention* mampu memperkuat *financial reporting quality* dalam kerangka *Islamic corporate governance* dan *accounting ethics* dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.

#### 4.2.2.2. Model Pengukuran (*Outer Model Testing*)

Model Pengukuran (*Outer Model Testing*) merupakan pengukuran untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Melalui proses literasi algoritma, parameter model pengukuran (*validitas konvergen, validitas diskriminan, composite reliability, dan cronbach's alpha*) diperoleh, termasuk nilai  $R^2$  sebagai parameter ketepatan model prediksi. Diagram *outer model* secara keseluruhan, pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:



**Gambar 4. 6**

#### ***Outer Model Testing***

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS

Berikut pengujian- pengujian yang dilakukan pada *outer model* (model pengukuran), yang dapat diketahui melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Uji Validitas Konvergen

Validitas konvergen, berhubungan dengan prinsip bahwa pengukuran dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi apabila skor yang didapat dari dua instrument yang berbeda yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi. Uji validitas konvergen dalam PLS dengan *indicator reflektif* dinilai mendasar pada *loading factor indicator* yang mengukur konstruk tersebut, menyatakan *rule of thumb* yang digunakan untuk validitas konvergen *outer loading* sebesar  $\geq 0.7$ , dan nilai AVE yang dinyatakan valid adalah 0.50 atau lebih tinggi, menurut Hair angka di atas 0.50 dapat menunjukkan bahwa konstruk menjelaskan setidaknya 50% dari varians setiap item. *Convergent validity* seluruh konstruk dalam penelitian ini valid (Hair et al., 2019). Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil *convergent validity* dengan nilai *loading factor* dan AVE, sebagai berikut:

**Tabel 4. 14**  
**Nilai Loading Factor**

Variabel	No Item (Sub Variabel)	Factor Loading	keterangan
<i>Islamic Corporate Governance</i>	ICG1	0,887	Valid
	ICG2	0,959	Valid
	ICG3	0,961	Valid
	ICG4	0,918	Valid
	ICG5	0,957	Valid
	ICG6	0,970	Valid
<i>Accounting Ethics</i>	AE1	0.966	Valid
	AE2	0,978	Valid
	AE3	0,927	Valid
<i>Internal Control Effectiveness</i>	ICE1	0,874	Valid
	ICE2	0,811	Valid
	ICE3	0,905	Valid
<i>Fraud Prevention</i>	FP1	0,848	Valid
	FP2	0,875	Valid
	FP3	0,895	Valid
	FP4	0,849	Valid
<i>Financial Reporting Quality</i>	FRQ1	0,886	Valid
	FRQ2	0,822	Valid

	FRQ3	0,919	Valid
	FRQ4	0,937	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS

Berdasarkan hasil dari tabel di atas, diperoleh hasil *convergent validity* dengan *loading factor*, seluruh *loading factor* indikator memiliki nilai yang lebih dari 0.7, sehingga dapat dinyatakan valid. Bahwa semua indikator dan dimensi merupakan faktor pembentuk dari variabel latennya.

Selain itu, validitas konvergen juga dapat diukur dengan menghitung setiap indikator pada *average variance extracted* (AVE). Indikator untuk menghitung AVE, apabila nilai AVE lebih dari 0.5 maka item pada variabel tersebut dianggap memiliki validitas konvergen yang cukup. (Hair *et al.*, 2019;). Hasil nilai AVE dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
***Average Variance Extracted (AVE)***

Variabel	AVE
<i>Islamic Corporate Governance (X1)</i>	0.888
<i>Accounting Ethics (X2)</i>	0.916
<i>Internal Control Effectiveness (X3)</i>	0.747
<i>Fraud Prevention (Z)</i>	0.751
<i>Financial Reporting Quality (Y)</i>	0.795
<i>Islamic Corporate Governance * Fraud Prevention</i>	1.000
<i>Accounting Ethics * Fraud Prevention</i>	1.000
<i>Internal Control Effectiveness * Fraud Prevention</i>	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS

Berdasarkan data yang diolah menggunakan SmartPLS, seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai AVE di atas ambang batas 0,50. Secara rinci, nilai AVE untuk *Islamic Corporate Governance* sebesar 0,888, *Accounting Ethics* sebesar 0,916, *Internal Control Effectiveness* sebesar 0,747, *Fraud Prevention* sebesar 0,751, dan *Financial Reporting Quality* sebesar 0,795. Selain itu, variabel interaksi (moderasi) menunjukkan nilai 1,000, yang umum terjadi pada produk indikator tunggal dalam analisis moderasi. Hasil ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians dari indikator-indikator tersebut dapat dijelaskan oleh masing-masing variabel latennya.

Dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi kriteria

validitas konvergen yang baik, sehingga data dianggap reliabel untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dengan terpenuhinya syarat AVE ini, peneliti dapat melanjutkan ke tahap pengujian inner model atau uji hipotesis. Hal ini memberikan dasar yang kuat bagi peneliti untuk membuktikan apakah *Fraud Prevention* secara signifikan memperkuat atau memperlemah hubungan antara *corporate governance*, etika, dan *internal control* terhadap *financial reporting quality* yang dihasilkan.

#### b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji reliabilitas suatu konstruk. Pada uji ini dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yaitu *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. *Cronbach's alpha* digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai rendah. *Rule of thomb* yang digunakan yaitu jika nilai *composite reliability* > 0.70 maka dapat diterima. Sedangkan *composite reliability* digunakan yaitu nilai *composite reliability* harus > 0.70 pada penelitian *confirmatory* (Hair *et al*, 2019). Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil uji reliabilitas, sebagai berikut:

Tabel 4. 16

#### Uji Realibilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	Keterangan
<i>Islamic Corporate Governance</i> (X1)	0.975	0.979	Reliabel
<i>Accounting Ethics</i> (X2)	0.954	0.970	Reliabel
<i>Internal Control Effectiveness</i> (X3)	0.848	0.898	Reliabel
<i>Fraud Prevention</i> (Z)	0.890	0.924	Reliabel
<i>Financial Reporting Quality</i> (Y)	0.914	0.939	Reliabel
<i>Islamic Corporate Governance</i> * <i>Fraud Prevention</i>	1.000	1.000	Reliabel
<i>Internal Control Effectiveness</i> * <i>Fraud Prevention</i>	1.000	1.000	Reliabel
<i>Accounting Ethics</i> * <i>Fraud Prevention</i>	1.000	1.000	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS

Evaluasi terhadap model pengukuran (*outer model*) dalam penelitian ini diawali dengan pengujian konsistensi internal melalui uji reliabilitas terhadap

seluruh konstruk laten yang diestimasi. Dalam kerangka metodologi *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM), reliabilitas instrumen diukur secara komprehensif menggunakan dua indikator utama, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Berdasarkan data hasil pengolahan SmartPLS yang disajikan, seluruh variabel penelitian baik variabel independen (*Islamic Corporate Governance*, *Accounting Ethics*, dan *Internal Control Effectiveness*), variabel moderasi (*Fraud Prevention*), maupun variabel dependen (*Financial Reporting Quality*) menunjukkan nilai koefisien yang melampaui ambang batas konservatif sebesar 0,70. Capaian ini memberikan justifikasi teoretis bahwa instrumen yang digunakan memiliki tingkat presisi dan stabilitas yang sangat tinggi dalam merepresentasikan fenomena yang diteliti.

Secara spesifik, variabel *Islamic Corporate Governance* (X1) dan *Accounting Ethics* (X2) menunjukkan tingkat konsistensi yang sangat superior dengan nilai *Composite Reliability* masing-masing sebesar 0,979 dan 0,970. Hal ini mengindikasikan bahwa butir-butir pernyataan dalam kuesioner mampu menjelaskan konstruk tata kelola berbasis syariah dan *accounting ethics* dengan tingkat kesalahan pengukuran yang minimal. Demikian pula pada variabel *Internal Control Effectiveness* (X3), *Fraud Prevention* (Z), serta *Financial Reporting Quality* (Y) yang semuanya mencatatkan nilai di atas 0,80, yang secara empiris mengukuhkan bahwa perangkat pengukuran yang dikembangkan memiliki korelasi antar-indikator yang kuat dan mampu memberikan hasil yang konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang dalam kondisi yang serupa.

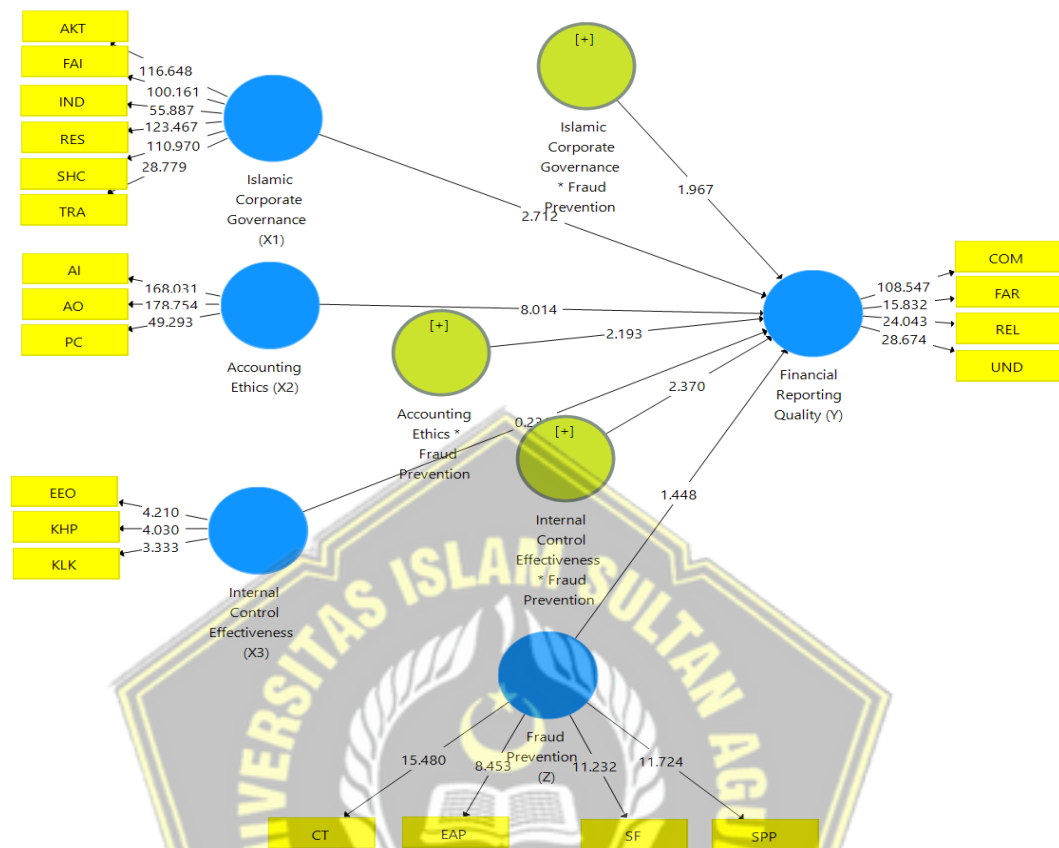
Analisis lebih lanjut pada tabel tersebut mengungkap fenomena menarik pada variabel interaksi atau efek moderasi, di mana nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* untuk seluruh hubungan moderasi menunjukkan angka sempurna yaitu 1,000. Secara teknis dalam pemodelan SmartPLS, nilai sempurna ini mencerminkan bahwa variabel interaksi tersebut dibentuk dari hasil perkalian skor indikator yang telah distandarisasi (*product indicator approach*), sehingga secara matematis tidak memiliki varians residu dalam konteks reliabilitas internalnya. Hal ini memperkuat kedudukan model penelitian ini dalam menginvestigasi peran *Fraud Prevention* sebagai variabel pemoderat, karena data

interaksi yang diolah memiliki tingkat keandalan mutlak untuk diikutsertakan dalam pengujian struktural selanjutnya.

Sebagai simpulan dari evaluasi *outer model* ini, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh konstruk laten dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria *rule of thumb* yang dipersyaratkan. Konsistensi internal yang tinggi ini menjamin bahwa setiap variabel telah terukur secara akurat dan bebas dari bias pengukuran yang signifikan. Dengan terpenuhinya standar reliabilitas ini, maka model penelitian memiliki fondasi yang kokoh untuk dilanjutkan pada tahap pengujian signifikansi hubungan kausalitas dan pengujian hipotesis moderasi (*inner model*), guna menjawab problematika mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *financial reporting quality* secara mendalam.

#### **4.2.2.3. Model Struktural (*Inner Model Testing*)**

Evaluasi model structural (*inner model*) bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. *Inner model* dievaluasi dengan melihat besarnya persentase *variance* yang dijelaskan yaitu dengan melihat nilai *R-Square* untuk konstruk laten endogen. Langkah pertama untuk menilai model struktural (*inner model*) adalah dengan memeriksa konstruksi *prediktif* untuk *kolinearitas*. Penilaian hasil model struktural didasarkan pada kemampuan untuk memprediksi konstruksi endogen dan untuk indikator (Hair et al, 2019). Pengujian hipotesis pada SmartPLS dilakukan melalui analisis koefisien jalur melalui *bootstrapping* metode yang digunakan untuk mengetahui besar dan arah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Suatu variabel bebas dikatakan mempengaruhi variabel terikat apabila nilai *pvalues* nya  $<0,05$  (Hair, et al 2019). *Inner model* dapat dievaluasi menggunakan beberapa tahapan, antara lain *rsquare*, *qsquare* (relevansi prediksi), model fit dan koefisien jalur (*path coefficient*). Hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui dari penghitungan model menggunakan PLS teknik *bootstrapping*. Dari hasil penghitungan *bootstrapping* tersebut akan diperoleh nilai t statistik setiap hubungan atau jalur. Diagram *inner model* secara keseluruhan, pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar, sebagai berikut:



Gambar 4. 7

**Inner Model Testing**

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS

Berikut pengujian- pengujian yang dilakukan pada *inner model* (model struktural), yang dapat diketahui melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1) *Rsquare*

*Rsquare* ( $R^2$ ) merupakan Koefisien penentuan yaitu ukuran daya prediktif dalam sampel. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu), dengan 0 (nol) menunjukkan tidak ada hubungan dan 1 (satu) menunjukkan hubungan yang sempurna (Hair et al., 2019). Menurut Ghozali (2020) Perubahan nilai *R Squares* dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah mempunyai pengaruh *substantive*. Semakin tinggi nilai  $R^2$  semakin besar kekuatan penjelasan dari model struktural *PLS*, dan karena itu semakin baik prediksi konstruksi endogen (Hair et al.,2019: 781).

Menurut Ghozali (2020) Nilai  $R^2$  0,75, 0,50, dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderate, dan lemah. Pada beberapa konteks penelitian nilai  $R^2$  0,10, dan bahkan lebih rendah, dianggap memuaskan. Dengan demikian, nilai-nilai  $R^2$  harus selalu ditafsirkan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 17**  
***Rsquare***

	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>
<i>Financial Reporting Quality</i> (Y)	0.466	0.446

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS

Berdasarkan tabel 4.17 di atas diperoleh nilai koefisien determinasi yang direpresentasikan melalui *R Square* dan *Adjusted R Square*. Nilai *R Square* yang tertera pada tabel adalah sebesar 0,466, sementara nilai *Adjusted R Square* berada pada angka 0,446. Kedua nilai ini merupakan indikator kunci untuk mengukur sejauh mana model regresi yang disusun mampu menjelaskan variabilitas dari variabel dependen, yaitu *Financial Reporting Quality*.

Interpretasi terhadap nilai *R Square* sebesar 0,466 menunjukkan bahwa gabungan variabel independen yang terdiri dari *Islamic Corporate Governance*, *Accounting Ethics*, dan *Internal Control Effectiveness*, dengan *Fraud Prevention* sebagai variabel moderasi, secara simultan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 46,6% terhadap *Financial Reporting Quality*. Angka ini mencerminkan bahwa hampir separuh dari dinamika atau perubahan yang terjadi pada kualitas pelaporan keuangan dalam objek penelitian ini dapat dijelaskan melalui interaksi variabel-variabel tersebut. Hal ini memberikan penegasan awal bahwa model penelitian yang diajukan memiliki relevansi empiris yang cukup baik.

Mengingat penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,446 menjadi acuan yang lebih akurat untuk digunakan. Penggunaan *Adjusted R Square* sangat disarankan karena nilai ini telah dikoreksi terhadap jumlah variabel dan ukuran sampel, sehingga memberikan gambaran yang lebih objektif dan terhindar dari bias kenaikan nilai yang semu. Dengan angka 44,6%, model ini menunjukkan konsistensi yang stabil dalam

memprediksi bagaimana tata kelola islami, etika, dan pengendalian internal bekerja sama dalam bingkai pencegahan kecurangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Jika ditinjau dari perspektif penelitian ilmu sosial dan akuntansi, nilai *Adjusted R Square* di kisaran 0,446 ini dikategorikan ke dalam tingkat kekuatan pengaruh yang moderat atau cukup kuat. Capaian ini menandakan bahwa kerangka konseptual yang dibangun sudah cukup komprehensif dalam menangkap faktor-faktor krusial yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan. Meskipun tidak bersifat deterministik mutlak, nilai ini sudah sangat memadai untuk dijadikan dasar dalam menarik kesimpulan ilmiah serta memberikan rekomendasi praktis bagi organisasi terkait penguatan sistem pengendalian dan etika profesi.

Sebagai penutup, perlu diperhatikan bahwa masih terdapat sisa varians sebesar 55,4% (hasil dari 100% - 44,6%) yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini. Faktor-faktor sisa tersebut kemungkinan berasal dari variabel eksternal seperti kualitas audit eksternal, tekanan regulasi, komitmen manajemen puncak, atau penerapan teknologi sistem informasi akuntansi yang lebih canggih. Adanya sisa varians ini justru memberikan peluang dan ruang bagi penelitian di masa depan untuk mengeksplorasi variabel tambahan guna memperkaya literatur mengenai *financial reporting quality* dalam perspektif syariah dan etika.

## 2) Model Fit

Pengujian atas model yang dibangun, akan menunjukkan bahwa variabel dalam penelitian ini, telah memiliki model persamaan yang fit. Nilai  $< 0,1$  pada *Standardized Root Mean Residual* (SRMR) mengidentifikasi nilai standar residu atas model yang fit (Hair *et al*, 2018) Uji model fit ini digunakan untuk mengetahui suatu model memiliki kecocokan dengan data. Pada uji kecocokan model dapat dilihat dari nilai SRMN model. Model PLS dinyatakan telah memenuhi kriteria uji model fit jika nilai SRMN  $< 0.1$  dan model dinyatakan *perfect* SRMN  $< 0.08$ . Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4. 18**  
**Model Fit**

	<i>Saturated Model</i>	<i>Estimated Model</i>
SRMR	0.045	0.045

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai SRMR dari model penelitian adalah 0.045 ( $0.045 < 0.1$ ). Nilai ini menunjukkan bahwa model penelitian merupakan model yang fit. Berdasarkan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai SRMR untuk *Saturated Model* maupun *Estimated Model* menunjukkan angka yang identik, yaitu sebesar 0,045. Nilai SRMR ini mencerminkan rata-rata perbedaan antara korelasi yang diamati (data lapangan) dengan korelasi yang diprediksi oleh model struktural penelitian. Kesamaan nilai antara model jenuh (*saturated*) dan model estimasi menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam representasi struktur hubungan antar variabel, baik itu variabel *Islamic Corporate Governance*, *accounting ethics*, *internal control effectiveness*, maupun peran moderasi fraud prevention dalam menghasilkan *financial reporting quality*.

Jika merujuk pada kriteria penilaian model fit yang umum diterima dalam literatur statistik, sebuah model penelitian dikatakan memiliki kecocokan yang baik (*good fit*) apabila nilai SRMR berada di bawah ambang batas 0,08. Dengan perolehan nilai 0,045 yang secara signifikan lebih kecil dari batas maksimal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi syarat kecocokan yang memadai. Hal ini memberikan indikasi kuat bahwa model tidak mengalami kesalahan spesifikasi yang berarti dan data pendukung telah selaras dengan teori yang diajukan dalam penelitian.

Hasil uji SRMR yang positif ini memberikan fondasi yang kuat bagi peneliti untuk melanjutkan analisis ke tahap berikutnya, yakni pengujian hipotesis dan koefisien jalur. Dengan model yang telah terbukti fit, maka estimasi mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance*, *accounting ethics*, dan *internal control effectiveness* terhadap *financial reporting quality* dapat dianggap valid secara statistik.

## 4.2.2. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

### 4.2.2.1. Statistik Inferensial

Nilai estimasi untuk model pengukuran formatif harus signifikan tingkat signifikansi ini dinilai dengan prosedur *bootstrapping*. Hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui dari penghitungan model menggunakan PLS teknik *bootstrapping*. Dari hasil penghitungan *bootstrapping* tersebut akan diperoleh nilai t statistik setiap hubungan atau jalur. Pengujian hipotesis ini diatur dengan tingkat signifikansi 5%. Hipotesis dapat diterima apabila nilai signifikansi  $<0.05$ .

Dalam melakukan uji hipotesis, peneliti menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan mengasumsikan *Fraud Prevention* sebagai *pure moderator*. Adapun argumentasi menjadikan *Fraud Prevention* sebagai *pure moderator* dengan asumsi bahwa penerapan *Fraud Prevention* dan dalam perusahaan, membutuhkan variabel lain untuk mencapai *financial reporting quality* sehingga *Fraud Prevention* tidak dapat berdiri sendiri (menjadi variabel independen) dan hanya berfungsi ketika berinteraksi dengan *Islamic corporate governance, accounting ethics* dan *internal control effectiveness*. Penentuan asumsi *pure moderator* didasarkan pada pertimbangan bahwa *Fraud Prevention* yang memiliki 4 (empat) dimensi dan 12 indikator dirasa kurang kuat untuk bisa lebih mencapai *financial reporting quality*. Hasil penghitungan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini, akan diuraikan dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 4. 19

#### Pengujian Hipotesis *Path Coefficient*

Struktur Model	Prediksi	Sampel Asli (O)	P Values	Penjelasan
ICG -> FRQ	+	0.143	0.007	<b>Signifikan dan memiliki arah Positif.</b> Penerapan ICG yang semakin baik akan meningkatkan <i>financial reporting quality</i> secara signifikan.
AE -> FRQ	+	0.525	0.000	<b>Signifikan dan memiliki arah positif.</b> <i>Accounting Ethics</i> memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap <i>financial reporting quality</i> .
INC -> FRQ	+	-0.013	0.813	<b>Tidak Signifikan.</b> <i>Internal Control Effectiveness</i> dalam model ini tidak

				terbukti memengaruhi <i>financial reporting quality</i> secara langsung.
FP -> FRQ	+	0.107	<b>0.148</b>	<b>Tidak Signifikan.</b> Upaya <i>Fraud Prevention</i> secara mandiri tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>financial reporting quality</i>
FP moderasi ICG -> FRQ		0.151	<b>0.050</b>	<b>Signifikan.</b> <i>Fraud Prevention</i> berperan sebagai moderasi. Dengan nilai koefisien positif (0,151), ini menunjukkan bahwa <i>Fraud Prevention</i> yang baik mampu <b>memperkuat</b> pengaruh positif ICG terhadap <i>financial reporting quality</i> . dan bertindak sebagai <i>Pure Moderator</i>
FP moderasi AE -> FRQ		0.138	<b>0.029</b>	<b>Signifikan.</b> <i>Fraud Prevention</i> terbukti memoderasi hubungan Etika Akuntansi terhadap <i>financial reporting quality</i> . Koefisien positif (0,138) berarti <i>Fraud Prevention</i> <b>memperkuat</b> hubungan tersebut. dan bertindak sebagai <i>Pure Moderator</i>
FP moderasi INC -> FRQ		-0.165	<b>0.018</b>	<b>Signifikan.</b> Menariknya, meskipun pengaruh langsung Efektivitas Pengendalian Internal ke <i>financial reporting quality</i> tidak signifikan, namun ketika dimoderasi oleh <i>Fraud Prevention</i> , hasilnya menjadi signifikan. dan bertindak sebagai <i>Pure Moderator</i>
<i>R-squared</i>				0,466
<i>Adjusted R-squared</i>				0,446

Tingkat Signifikansi \*0,05

Sumber: Hasil Pengolahan Data SmartPLS

Keterangan : ICG = *Islamic Corporate Governance*; AE = *Accounting Ethics*; INC = *Internal Control Effectiveness*; FRQ= *Financial Reporting Quality*

Dari hasil uji regresi melalui smart PLS maka diperoleh persamaan model penelitian sebagai berikut:

$$FRQ = 0.143ICG + 0.525AE + (-0.013)INC + 0.107FP + 0.151ICG*FP + 0.138 AE*FP + (-0.165)INC*FP + \epsilon_i$$

Berikut adalah analisis deskriptif dari Tabel 4.19 yang menampilkan pengujian hipotesis untuk berbagai hubungan antar variabel berdasarkan hasil pengolahan data dengan SmartPLS.

- a. Pengaruh antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Financial Reporting Quality* (FRQ) memiliki koefisien sebesar 0.143, menunjukkan pengaruh signifikan dan positif dengan nilai *t-statistics* sebesar 2.712, dan *p-value* adalah 0.007 ( $<0.05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima. Dengan demikian, *Islamic Corporate Governance* berperan dalam peningkatan *Financial Reporting Quality*.
- b. Pengaruh *Accounting Ethics* (AE) juga memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap *Financial Reporting Quality* dengan koefisien 0.525. Nilai *t-statistics* sebesar 8.014 jauh melampaui batas signifikansi, dan *p-value* adalah 0.000 ( $<0.05$ ) Hipotesis diterima, menunjukkan bahwa *Accounting Ethics* berkontribusi signifikan dalam meningkatkan *Financial Reporting Quality*.
- c. Pengaruh *Internal Control Effectiveness* (INC) Memiliki pengaruh negatif yang sangat lemah terhadap *Financial Reporting Quality* dengan nilai koefisien sebesar -0.013. Nilai signifikansi yang ditunjukkan oleh nilai *t-statistics* sebesar 0.236 dan *p-value* adalah 0.813, yang berada jauh di atas ambang batas standar ( $>0.05$ ). Dengan demikian, Hipotesis ditolak, menunjukkan bahwa *Internal Control Effectiveness* dalam model ini tidak terbukti memengaruhi *financial reporting quality* secara langsung.
- d. Pengaruh *Fraud Prevention* (FP) Memiliki pengaruh positif namun lemah terhadap *Financial Reporting Quality* dengan koefisien sebesar 0.107. Nilai signifikansi yang ditunjukkan oleh *p-value* adalah 0.148, yang berarti lebih besar dari ambang batas standar ( $>0.05$ ). Dengan demikian, Hipotesis ditolak, menunjukkan bahwa upaya *Fraud Prevention* secara mandiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan *Financial Reporting Quality* pada penelitian ini.
- e. *Fraud Prevention* (FP) memperkuat hubungan antara *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Financial Reporting Quality* (FRQ) dengan koefisien 0.151. Nilai *t-statistics* sebesar 1.967 dan *p-value* 0.050, Dengan nilai koefisien positif (0,151), ini menunjukkan bahwa *fraud prevention* yang baik mampu memperkuat pengaruh positif *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality*. dan bertindak sebagai *Pure Moderator*

- f. Moderasi *Fraud Prevention* terhadap hubungan *Accounting Ethics* (AE) dan *Financial Reporting Quality* (FRQ) memiliki koefisien positif sebesar 0.138. Nilai *t-statistics* 2.193 dengan *p-value* 0.029 (<0.05). pengaruh ini signifikan. Hipotesis diterima. *Fraud Prevention* terbukti memoderasi hubungan *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality*. Koefisien positif (0,138) berarti *fraud prevention* memperkuat hubungan tersebut. dan bertindak sebagai *Pure Moderator*.
- g. Pengaruh Moderasi *Fraud Prevention* (FP) Menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam memoderasi hubungan antara *Internal Control* dan *Financial Reporting Quality* dengan nilai koefisien sebesar -0.165. Nilai *p-value* sebesar 0.018 berada di bawah ambang batas standar (<0.05), yang berarti Hipotesis diterima. Hal ini menarik karena meskipun pengaruh langsung *Internal Control effectiveness* ke *financial reporting quality* tidak signifikan, kehadiran *Fraud Prevention* sebagai *Pure Moderator* berhasil memberikan dampak yang signifikan secara statistik dalam model penelitian ini.

#### 4.2.2.2. R<sup>2</sup> (R-squared)

Nilai R<sup>2</sup> (R-squared) sebesar 0,466 menunjukkan bahwa model penelitian mampu menjelaskan 46,6% variasi atau naik-turunnya *Financial Reporting Quality*. Angka ini mencerminkan sejauh mana variabel independent yakni *Islamic Corporate Governance*, *accounting ethics*, dan *internal control effectiveness* secara simultan berkontribusi terhadap pembentukan *financial reporting quality* tersebut.

Dalam konteks investigasi *fraud*, angka 46,6% ini cukup menarik. Hal ini menandakan bahwa hampir setengah dari faktor-faktor yang menentukan baik-buruknya laporan keuangan dalam sampel telah berhasil dipotret oleh variabel-variabel yang peneliti pilih. Sisanya sebesar 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti tekanan eksternal, kondisi ekonomi makro, atau variabel psikologis auditor.

Pencapaian angka 0,466 mengindikasikan adanya hubungan yang substansial. Ini membuktikan bahwa integrasi antara nilai-nilai spiritual melalui *Islamic Corporate Governance* dan penguatan teknis melalui pengendalian internal memang menjadi fondasi yang kuat dalam menjaga integritas laporan keuangan.

Model ini dianggap memiliki daya prediksi yang memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan manajerial.

Jika kita melihat dari kacamata praktis, nilai *R-squared* ini menegaskan bahwa kebijakan *Fraud Prevention* memiliki peran krusial sebagai "penjaga" hubungan antar variabel tersebut. Tanpa adanya sistem pencegahan yang kuat, variabel-variabel *corporate governance* dan etika mungkin tidak akan memiliki daya dorong yang sebesar 46,6% terhadap *financial reporting quality*.

#### **4.2.2.3. Nilai *Adjusted R-Squared***

Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,446 memberikan legitimasi ilmiah yang kuat bahwa model investigasi dalam penelitian ini sudah berada pada posisi yang tepat atau "fit". Secara teknis, angka ini merupakan hasil koreksi terhadap  $R^2$  murni yang telah mempertimbangkan jumlah variabel independen serta ukuran sampel yang digunakan. Konsistensi nilai di angka 0,446 ini menjadi sinyal positif mengenai efisiensi model, hal ini menunjukkan bahwa penambahan variabel moderasi *Fraud Prevention* ke dalam kerangka penelitian benar-benar memberikan kontribusi nyata dalam menjelaskan varians *financial reporting quality*, bukan sekadar "pemanis" statistik yang muncul secara kebetulan. Dilihat dari sisi metodologi, kemampuan model untuk menjelaskan 44,6% dinamika *financial reporting quality* merupakan pencapaian yang signifikan untuk penelitian ilmu sosial. Rendahnya selisih antara  $R^2$  dengan *Adjusted R-squared* membuktikan bahwa setiap variabel yang dipilih terutama interaksi *accounting ethics* dan *internal control effectiveness* memiliki keterkaitan fungsional yang kuat dan sangat parsimonius. Hal ini secara otomatis meminimalisir kekhawatiran akan adanya bias akibat terlalu banyak variabel (*overfitting*), sehingga meningkatkan reliabilitas hasil penelitian jika kelak diterapkan pada populasi yang lebih luas. Secara praktis, nilai ini memperkuat argumen bahwa institusi perlu memberikan perhatian serius pada penguatan *fraud prevention*, karena terbukti secara stabil mampu menjelaskan hampir separuh dari faktor-faktor yang menentukan reliabilitas *financial reporting*

### 4.2.3. Pembahasan Uji Inferensial

#### 4.2.3.1. Analisis Hipotesis ke 1 *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality*

*Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Reporting Quality*. Dimana *Corporate Governance* dalam Islam mengacu pada *corporate governance* yang berdasarkan pada prinsip-prinsip etika, moral, dan syariah Islam. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam *Islamic corporate governance* adalah transparansi atau keterbukaan (*Shiddiq*), yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *financial reporting quality*. Transparansi yang baik meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan dengan jujur, tepat waktu, dan sesuai dengan fakta. Dalam lembaga keuangan syariah, akses yang mudah ke informasi tentang layanan keuangan merupakan tanda adanya keterbukaan. Transparansi yang baik memastikan bahwa informasi layanan keuangan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, baik nasabah, investor, maupun regulator. Akses yang mudah terhadap informasi layanan keuangan memengaruhi *financial reporting quality* karena mendorong keterbukaan di semua aspek operasional. Ketika informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, laporan keuangan yang dihasilkan cenderung lebih transparan dan akurat. Laporan keuangan yang transparan memungkinkan pengguna laporan (seperti investor dan pemerintah) untuk menilai kinerja keuangan lembaga dengan lebih baik, karena data yang digunakan dalam pelaporan didasarkan pada informasi yang dapat diakses secara luas dan akurat.

Prinsip ini juga memperkuat konsep amanah dalam Islam, di mana perusahaan tidak boleh menyembunyikan informasi yang relevan dari publik. Lembaga keuangan syariah yang mematuhi prinsip transparansi dalam layanan akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Dalam *Islamic Corporate Governance*, penyampaian informasi yang jelas merupakan komponen penting dari transparansi. Informasi yang disampaikan oleh lembaga keuangan syariah harus dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga tidak ada kekeliruan atau informasi yang disalahartikan. Ketika lembaga keuangan syariah menyampaikan informasi yang jelas terkait dengan layanan mereka, hal ini mendorong penyajian laporan keuangan yang lebih mudah dipahami oleh para pengguna. Penyampaian informasi yang jelas memungkinkan para pemangku kepentingan memahami kondisi keuangan perusahaan secara lebih baik.

Dalam Islam, prinsip *Shiddiq* (kejujuran) mewajibkan lembaga untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan benar, tanpa menyembunyikan atau memanipulasi data yang dapat menyesatkan pengguna laporan. Informasi yang jelas juga memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat diandalkan dan relevan dengan keputusan bisnis atau investasi yang akan diambil. Keterbukaan ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dan meminimalkan risiko ketidakpastian dalam pelaporan keuangan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”.*

Selain kejelasan, ketepatan waktu dalam penyampaian informasi juga merupakan bagian integral dari transparansi dalam *Islamic corporate governance*. Informasi keuangan yang disampaikan secara tepat waktu memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang cepat dan akurat. Penyampaian informasi yang tepat waktu dan memadai berkaitan erat dengan ketepatan waktu penyusunan dan publikasi laporan keuangan. Laporan keuangan

yang disampaikan tepat waktu akan lebih relevan dan berguna bagi pengguna laporan, karena mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi terkini. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan bisa menyebabkan hilangnya relevansi informasi, yang dapat mengakibatkan keputusan yang salah atau bias di kalangan investor atau pemegang saham. Ketepatan waktu juga mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah terhadap akuntabilitas dan tanggung jawab dalam penyampaian informasi. Lembaga yang mampu memberikan laporan keuangan tepat waktu menunjukkan bahwa mereka mengikuti aturan dan etika bisnis sesuai dengan prinsip Islam. Dalam Islam, menjaga waktu dan menepati janji adalah bagian dari akhlak mulia yang memperkuat kepercayaan.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكْفِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”

Salah satu dimensi penting dari *Islamic corporate governance* adalah akuntabilitas (*amanah*), yang merujuk pada tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ismawati et al., 2022). Dalam lembaga keuangan syariah, akuntabilitas adalah elemen kunci yang memengaruhi *financial reporting quality*. Akuntabilitas (*amanah*) dalam *Islamic corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial reporting quality*, akuntabilitas dalam Islam menuntut penyampaian informasi yang akurat dan sesuai dengan fakta. Dalam lembaga keuangan syariah, informasi yang diberikan kepada publik harus bebas dari kesalahan, manipulasi, atau distorsi, agar dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang benar.

Relevansi terhadap *financial reporting quality* yakni akuratnya penyampaian informasi keuangan berpengaruh langsung terhadap *financial reporting quality*. Ketika informasi yang disampaikan kepada publik atau para pemangku kepentingan akurat, maka laporan keuangan yang disusun mencerminkan keadaan keuangan yang sebenarnya, tanpa manipulasi atau menyembunyian data. Akuntabilitas ini menuntut bahwa data keuangan yang dilaporkan sesuai dengan fakta, sehingga para investor, pemegang saham, dan regulator dapat membuat keputusan yang tepat.

Dalam konteks Islam, kejujuran dan ketepatan informasi merupakan bagian dari *amanah* yang harus dijaga. Ruslang et al., (2020). Dengan menjaga akurasi informasi, lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa mereka bertindak sesuai dengan prinsip syariah yang mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu".

Dalam akuntabilitas Islam, penyampaian informasi harus lengkap, artinya semua informasi yang relevan harus disampaikan tanpa ada yang disembunyikan. Laporan yang tidak lengkap bisa menyesatkan dan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Informasi yang lengkap adalah elemen esensial dari *financial reporting quality* yang tinggi. Laporan keuangan yang menyajikan data secara lengkap mencakup semua aspek keuangan yang relevan, termasuk aset, liabilitas, pendapatan, dan pengeluaran, sehingga memberikan gambaran yang menyeluruh tentang kondisi keuangan lembaga. Dengan penyajian yang lengkap, laporan keuangan menjadi lebih dapat diandalkan dan membantu pemangku kepentingan dalam menilai kinerja lembaga keuangan syariah dengan lebih baik.

Akuntabilitas (*amanah*) dalam *Islamic corporate governance* juga mencakup kewajiban untuk mengkomunikasikan kebijakan lembaga keuangan kepada publik secara jelas. Transparansi dalam kebijakan memungkinkan pemangku kepentingan memahami arah dan strategi perusahaan, serta dampaknya terhadap mereka. Dengan menginformasikan kebijakan lembaga secara terbuka, termasuk kebijakan keuangan, investasi, atau operasional, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih transparan dan akuntabel. Ketika kebijakan lembaga diinformasikan secara jelas kepada publik, hal ini membantu pemangku kepentingan memahami konteks di balik angka-angka yang ada dalam laporan keuangan. Informasi tentang kebijakan

juga memperkuat kepercayaan pengguna laporan terhadap validitas laporan keuangan yang disusun.

Dalam prinsip syariah, akuntabilitas dalam kebijakan adalah bentuk tanggung jawab moral dan etika lembaga kepada masyarakat. Menyembunyikan kebijakan atau tidak menginformasikannya dengan benar adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al Baqarah ayat 283:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*“Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*

Kebijakan lembaga keuangan syariah harus konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik aturan internal perusahaan maupun hukum syariah dan regulasi eksternal. Konsistensi kebijakan menunjukkan komitmen lembaga untuk menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Kebijakan yang konsisten dan sesuai dengan peraturan berkontribusi pada stabilitas dan keandalan laporan keuangan. Ketika lembaga keuangan syariah mematuhi peraturan dan menjalankan kebijakan secara konsisten, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan. Pelaporan keuangan yang berdasarkan kebijakan yang konsisten juga mengurangi risiko perubahan tiba-tiba dalam metode pelaporan, yang dapat membingungkan atau menyesatkan pengguna laporan. Konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan juga menunjukkan bahwa lembaga tersebut menjalankan amanah dengan baik, karena mereka mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh hukum syariah dan aturan eksternal lainnya.

Dimensi *responsibility* (pertanggungjawaban) dalam konteks ini merujuk pada kewajiban lembaga keuangan syariah untuk bertindak secara benar, transparan, dan etis dalam menjalankan operasinya serta memenuhi kewajiban kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Pertanggungjawaban yang baik memastikan bahwa lembaga keuangan mematuhi peraturan, menjaga tanggung

jawab sosial, serta memberikan layanan yang jujur kepada nasabah. Semua ini berkontribusi pada peningkatan *financial reporting quality*.

Lembaga keuangan syariah mematuhi peraturan perundang-undangan, pelaporan keuangan yang disusun menjadi lebih akurat dan sesuai dengan standar akuntansi serta aturan yang ditetapkan oleh regulator. Kepatuhan terhadap regulasi mengharuskan lembaga untuk melaporkan informasi keuangan dengan jujur, tanpa adanya manipulasi, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Laporan keuangan yang patuh pada aturan meningkatkan kredibilitas di mata regulator, investor, dan masyarakat. Hal ini juga mengurangi risiko sanksi atau penalti yang bisa berdampak buruk bagi reputasi lembaga. Kepatuhan ini juga sejalan dengan prinsip *Tabliq* (penyampaian yang benar), yang mengharuskan lembaga untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan fakta.

Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan tercermin dalam pelaporan keberlanjutan dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Lembaga keuangan syariah yang melaksanakan program-program sosial dan ramah lingkungan akan mencantumkan informasi ini dalam laporan keuangan mereka, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat. Laporan yang memuat tanggung jawab sosial ini menambah dimensi kualitas keuangan, karena menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Dalam Islam, tanggung jawab sosial adalah bagian dari *amanah*, yang menekankan bahwa setiap individu dan lembaga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Prinsip *Tabliq* mengharuskan lembaga untuk menyampaikan informasi mengenai tanggung jawab sosial mereka kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.

Pertanggungjawaban terhadap layanan yang diberikan kepada nasabah tercermin dalam transparansi pelaporan keuangan. Ketika lembaga keuangan syariah bertanggung jawab atas layanan mereka, mereka akan melaporkan informasi keuangan terkait dengan jelas dan transparan. Ini termasuk mengungkapkan risiko keuangan, produk-produk yang diberikan, serta kepatuhan

terhadap prinsip-prinsip syariah. Pelaporan yang jelas mengenai kinerja keuangan dan risiko-risiko yang ada membantu nasabah dan pemangku kepentingan memahami kondisi keuangan lembaga secara lebih baik, yang meningkatkan *financial reporting quality* secara keseluruhan. Pertanggungjawaban ini sejalan dengan prinsip *Tabliq*, yang mengharuskan lembaga untuk menyampaikan kebenaran dan memberikan informasi yang tepat kepada nasabah, sehingga tercipta hubungan yang jujur dan transparan antara lembaga dan nasabah.

*Islamic corporate governance* menekankan prinsip independensi atau kemandirian (*Huriyah*) sebagai salah satu fondasi utama dalam menjalankan bisnis, terutama dalam lembaga keuangan syariah. Independensi dalam konteks ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah harus mampu membuat keputusan secara objektif dan bertanggung jawab, tanpa adanya pengaruh eksternal yang merugikan. Prinsip ini penting dalam menjaga *financial reporting quality* karena pelaporan yang bebas dari konflik kepentingan akan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, jujur, dan dapat dipercaya.

Ketika lembaga keuangan syariah menjaga kemandirian dan memastikan bahwa kepentingan nasabah terlindungi, laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih transparan dan akurat. Dalam hal ini, kemandirian berarti tidak ada intervensi atau tekanan dari pihak eksternal yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis, termasuk dalam penyusunan laporan keuangan. Houcine et al., (2022). Jika lembaga mempertahankan independensi, informasi keuangan yang disajikan akan lebih jujur dan objektif, tanpa manipulasi untuk kepentingan pihak tertentu. *Financial Reporting Quality* yang baik memastikan bahwa nasabah memiliki kepercayaan penuh terhadap lembaga, karena mereka tahu bahwa informasi yang disampaikan benar dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, pelaporan keuangan yang melindungi kepentingan nasabah secara independen berperan dalam menjaga integritas dan reputasi lembaga keuangan syariah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah Al Anfal 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."*

Kesetaraan dalam Islam berarti bahwa semua pihak, baik nasabah, pemegang saham, atau pemangku kepentingan lainnya, diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi atau keberpihakan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *fairness* mencakup perlakuan yang setara terhadap semua nasabah, transparansi dalam layanan, dan mekanisme yang adil dalam menangani keluhan. Penerapan prinsip kesetaraan ini secara langsung berpengaruh pada *financial reporting quality*, karena keadilan dalam layanan berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akurasi laporan.

Prinsip kesetaraan penting dalam meningkatkan *financial reporting quality*, karena perlakuan yang adil terhadap semua nasabah menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga keuangan syariah. Ketika lembaga memperlakukan semua nasabah dengan setara, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan mencerminkan transaksi dan kondisi yang sebenarnya, tanpa ada upaya untuk menguntungkan kelompok tertentu secara tidak adil. Keadilan ini juga memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara objektif dan sesuai dengan standar etika, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap lembaga tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴿٩٠﴾  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat”.*

Kesetaraan (*Tawazun*) juga mencakup pemberian hak yang sama kepada semua nasabah untuk menyampaikan masukan atau keluhan terkait layanan keuangan syariah yang mereka terima. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan

syariah terbuka terhadap umpan balik dari nasabah tanpa memandang status mereka. Lembaga keuangan syariah yang memberikan ruang bagi nasabah untuk memberikan kritik atau keluhan menunjukkan transparansi dan keterbukaan, yang pada akhirnya mencerminkan *financial reporting quality* yang lebih baik. Umpan balik dari nasabah memberikan wawasan penting yang dapat membantu lembaga memperbaiki layanan mereka, yang pada akhirnya juga meningkatkan kualitas informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketika lembaga menampung masukan dari semua pihak tanpa diskriminasi, hal ini juga menunjukkan bahwa mereka memegang prinsip *fairness*, yang memperkuat kepercayaan publik terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Seperti yang terdapat pada Bank Muamalat Indonesia, misalnya, telah membuka layanan pengaduan online bagi seluruh nasabahnya, di mana mereka dapat menyampaikan keluhan atau masukan terkait produk keuangan syariah yang mereka gunakan. Keterbukaan ini memungkinkan bank untuk terus meningkatkan kualitas layanannya, dan hal tersebut tercermin dalam pelaporan keuangan yang lebih komprehensif dan terpercaya, karena mencakup umpan balik dari nasabah yang diselesaikan dengan baik.

Selain memberikan ruang bagi keluhan, lembaga keuangan syariah juga wajib menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil dan tepat. Tindakan ini menunjukkan komitmen lembaga untuk menjaga kepercayaan nasabah dan menegakkan prinsip keadilan dalam layanan yang mereka berikan. Ketika lembaga keuangan syariah menindaklanjuti keluhan nasabah secara adil, hal ini berpengaruh positif pada *financial reporting quality*. Keluhan yang diselesaikan dengan baik membantu lembaga mempertahankan reputasi yang baik dan menghindari potensi sengketa hukum yang dapat memengaruhi laporan keuangan. Selain itu, tindakan yang cepat dan adil dalam menyelesaikan keluhan nasabah juga memperlihatkan komitmen lembaga terhadap akuntabilitas dan tanggung jawab, yang secara langsung berdampak pada kepercayaan publik terhadap pelaporan keuangan yang disusun. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun 2020, Bank Syariah Mandiri (sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia) menerima keluhan dari nasabah terkait kesalahan transaksi yang terjadi di salah satu cabang. Bank segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan melakukan audit internal dan mengembalikan dana yang salah

kepada nasabah. Penanganan cepat dan adil terhadap keluhan ini tercermin dalam laporan keuangan tahunan mereka, yang mencantumkan informasi terkait dengan resolusi kasus tersebut, menunjukkan transparansi dan komitmen terhadap prinsip syariah.

*Shariah compliance* atau kepatuhan terhadap syariah dalam lembaga keuangan Islam adalah elemen krusial yang menentukan integritas operasional dan keberlanjutan lembaga tersebut. Kepatuhan ini mencakup penghindaran dari transaksi yang dilarang oleh Islam seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*, menjalankan bisnis yang halal, serta menjaga *amanah* dalam mengelola *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*. Ajibade et al., (2022). Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan bekerja dengan transparansi, keadilan, serta tanggung jawab. *Shariah compliance* secara langsung berpengaruh pada *financial reporting quality*, karena laporan yang dihasilkan oleh lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan standar syariah dan prinsip-prinsip akuntansi Islami.

Ketika lembaga keuangan syariah menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam operasionalnya, laporan keuangan yang disusun akan mencerminkan transaksi yang sah dan sesuai dengan syariah. Pelaporan keuangan yang bebas dari unsur haram ini menunjukkan bahwa lembaga mematuhi standar syariah, yang meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap laporan keuangan tersebut. Transparansi dalam pelaporan juga akan lebih baik karena semua transaksi dilaksanakan secara halal dan adil.

Keuntungan yang dihasilkan dari transaksi halal mencerminkan integritas operasional lembaga dan meningkatkan *financial reporting quality*. Laporan keuangan yang mencatat keuntungan dari bisnis halal menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menegakkan *amanah* dari nasabahnya. Hal ini juga memberikan transparansi yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan, karena sumber keuntungan yang diperoleh lembaga dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan. Seperti di lembaga keuangan syariah secara rutin menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan bahwa semua transaksi bisnis mereka, mulai dari pembiayaan infrastruktur hingga perdagangan,

didasarkan pada keuntungan yang halal. Ini memperkuat reputasi bank sebagai lembaga yang patuh syariah dan memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana mereka dikelola dengan aman.

Ketika lembaga keuangan syariah menjaga amanah dan menjalankan mandat dengan baik, laporan keuangan yang dihasilkan mencerminkan kepatuhan dan transparansi. Pelaporan yang akurat dan bertanggung jawab memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana mereka dikelola secara aman dan sesuai dengan syariah. Hal ini meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena nasabah dapat melihat bahwa amanah mereka dijaga dan lembaga beroperasi secara profesional.

Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kuraesin & Yadiati,(2021) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni membuktikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam memastikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan relevan untuk pengambilan keputusan. Temuan Ajibade et al., (2022) ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang kuat di Bank Pembangunan Negara Nigeria.

Pada penelitian ini ditemukan meskipun pendidikannya tinggi, tidak semua *top management* dan *middle management* memiliki pemahaman mendalam tentang konsep *Islamic corporate governance*, apalagi jika tidak berasal dari latar belakang syariah atau studi Islam. Banyak yang masih melihat *governance* dari perspektif konvensional. Lembaga Keuangan Syariah masih banyak menggunakan adaptasi dari model konvensional dengan sedikit modifikasi. Hal ini bisa memunculkan persepsi bahwa *governance* Islam belum sepenuhnya diinternalisasi dalam budaya organisasi. Responden justru sangat jujur dan reflektif. Mereka tidak menilai berdasarkan posisi atau gelar, melainkan pada kenyataan objektif yang mereka lihat sehari-hari.

#### **4.2.3.2. Analisis Hipotesis ke 2 *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality***

Penelitian ini menemukan bahwa *accounting ethics* memiliki pengaruh positif yang sangat kuat terhadap *financial reporting quality*. *Accounting ethics* menjadi pilar utama dalam menjamin *financial reporting quality* karena berfungsi

sebagai arah moral yang memastikan setiap transaksi diproses dengan kejujuran. Ketika seorang akuntan memegang teguh prinsip integritas, risiko terjadinya manipulasi data atau manajemen laba yang menyesatkan dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini memastikan bahwa informasi yang tersaji bukan sekadar angka untuk memenuhi target jangka pendek, melainkan cerminan objektif dari realitas ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

Dalam penerapan etika profesional mendorong terwujudnya transparansi dan pengungkapan penuh dalam pelaporan. Akuntan yang beretika tidak akan menyembunyikan informasi material yang berpotensi merugikan pemangku kepentingan, meskipun informasi tersebut memberikan citra negatif bagi perusahaan. Dengan demikian, laporan keuangan yang dihasilkan memenuhi karakteristik kualitatif berupa representasi yang tepat, di mana data yang disajikan bebas dari bias personal maupun tekanan pihak manajemen yang berkepentingan.

Selain aspek kejujuran, etika juga berkaitan erat dengan kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seorang akuntan yang berkomitmen pada etika profesi akan selalu memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku, seperti PSAK atau IFRS, tanpa mencari celah untuk melakukan penyimpangan. Ketelitian ini sangat krusial untuk mencegah kesalahan material yang tidak disengaja, sehingga laporan tersebut memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat oleh investor maupun kreditor. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi berkat landasan etika yang kuat akan mengurangi asimetri informasi antara pengelola perusahaan dan pemilik modal. Kepercayaan ini sangat vital bagi ekosistem bisnis, karena laporan yang kredibel menurunkan risiko investasi dan memastikan alokasi sumber daya ekonomi terjadi secara efisien di Masyarakat.

Berdasarkan *Shariah Enterprise Theory* (SET), seorang akuntan dipandang bukan sekadar agen yang mengejar keuntungan materiil, melainkan sebagai pemegang amanah yang memikul tanggung jawab atas kesejahteraan bersama (*falah*). Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif kuat antara *accounting*

*ethics* terhadap *financial reporting quality* mengonfirmasi asumsi teori ini, di mana etika dipandang sebagai manifestasi dari akuntabilitas vertikal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan akuntabilitas horizontal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketika *accounting ethics* yang berlandaskan nilai-nilai syariah telah terinternalisasi, akuntan akan menyadari bahwa setiap informasi yang disajikan bukan sekadar deretan angka, melainkan bentuk kejujuran yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*, perilaku etis berfungsi sebagai mekanisme transendental yang menjamin bahwa informasi dalam laporan keuangan bebas dari bias dan manipulasi (*batil*). Karena orientasi utama dalam teori ini adalah distribusi kemaslahatan, maka *accounting ethics* menjadi fondasi utama yang memastikan laporan keuangan memenuhi prinsip transparansi dan keadilan (*'adl*). Dengan demikian, semakin tinggi standar etika yang dipegang, semakin kuat komitmen akuntan untuk menghasilkan laporan yang tidak hanya relevan secara ekonomi, tetapi juga benar secara moral. Temuan penelitian ini membuktikan bahwa *financial reporting quality* tidak hanya ditentukan oleh sistem pengawasan teknis, melainkan oleh integritas akuntan dalam menjalankan peran sebagai khalifah yang menjaga keseimbangan hak-hak publik, sehingga secara otomatis menekan tindakan yang merugikan seperti manajemen laba..

Pada penelitian ini dimensi *Accounting Integrity* atau integritas akuntansi menempati posisi dimensi tertinggi karena merupakan inti dari karakter seorang akuntan. Integritas menuntut akuntan untuk bersikap jujur, lugas, dan tidak memihak dalam semua hubungan profesional. Tanpa integritas, *financial reporting quality* akan runtuh karena laporan tersebut berpotensi mengandung pernyataan yang menyesatkan secara sengaja. Integritas memastikan bahwa tidak ada penyembunyian fakta pahit dalam angka-angka, sehingga laporan keuangan benar-benar merepresentasikan kondisi entitas apa adanya. Sebagaimana Surat Al-Ahzab ayat 70 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar."*

Dalam konteks akuntansi, *qulan sadida* berarti menyajikan data keuangan yang jujur, tepat, dan tidak dimanipulasi. Hal ini dipertegas oleh hadits riwayat Tirmidzi bahwa *"Kejujuran membawa kepada ketenangan, dan kedustaan membawa kepada keraguan."* Dengan integritas yang tinggi, laporan keuangan akan memberikan ketenangan bagi para pemangku kepentingan karena bebas dari unsur *tadlis* (penipuan).

Hasil penelitian ini memiliki langkah strategis yang dapat diambil oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seperti memperkuat mekanisme pengawasan internal melalui digitalisasi sistem pemantauan perilaku etis. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu mengintegrasikan kode etik ke dalam sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang memiliki jejak audit (*audit trail*) yang tidak dapat diubah. Dengan adanya teknologi ini, setiap upaya manipulasi atau penyimpangan data dapat dideteksi secara otomatis, sehingga integritas akuntan tidak hanya bergantung pada komitmen moral individu tetapi juga didukung oleh sistem yang transparan dan akuntabel. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menginisiasi program pengembangan kompetensi berkelanjutan yang berfokus pada sinkronisasi standar akuntansi syariah terbaru dengan prinsip kehati-hatian (*due care*). Untuk pelatihan rutin mengenai PSAK Syariah dan aspek teknis audit internal sangat diperlukan. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan material akibat kelalaian teknis, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak hanya jujur secara niat, tetapi juga akurat secara metodologi. Lembaga perlu merumuskan protokol independensi yang lebih ketat untuk meningkatkan objektivitas akuntan, terutama dalam menghadapi tekanan dari pihak manajemen atau eksternal. Kebijakan ini dapat berupa pembentukan komite etik independen yang berfungsi sebagai tempat pelaporan (*whistleblowing system*) bagi akuntan yang merasa objektivitasnya terganggu.

Penelitian yang dilakukan oleh Abbas et al. (2023) dalam studi lintas negara menunjukkan bahwa komitmen terhadap nilai-nilai etika profesional secara signifikan memperkuat transparansi informasi keuangan di pasar berkembang. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa perilaku etis akuntan menjadi tameng utama terhadap praktik manajemen laba yang agresif. Pengaruh positif ini membuktikan bahwa ketika etika diutamakan, laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang jauh lebih tinggi, sehingga mampu mengurangi ketidakpastian bagi para investor global. Selanjutnya, Oktaviani dan Rahmawati (2024) mengeksplorasi hubungan antara kepemimpinan etis dan kualitas pelaporan di era digital. Mereka menemukan bahwa budaya etis yang ditanamkan dalam departemen akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akurasi data keuangan yang disajikan secara real-time. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun teknologi otomasi telah diterapkan, penilaian etis dari seorang akuntan tetap menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa informasi yang dihasilkan tidak dimanipulasi untuk kepentingan jangka pendek, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan secara keseluruhan. Dalam konteks audit, penelitian oleh Miller dan Zhang (2023) mengungkapkan bahwa skeptisisme profesional yang berlandaskan pada etika akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian salah saji material. Studi ini menunjukkan bahwa auditor yang memegang teguh prinsip integritas dan objektivitas lebih efektif dalam mendorong manajemen untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur. Hal ini membuktikan bahwa etika profesi bertindak sebagai katalisator dalam meningkatkan relevansi dan nilai informasi dari laporan keuangan yang diaudit di pasar modal internasional.

Lebih lanjut, Hassan et al. (2024) meneliti peran pendidikan etika berkelanjutan terhadap perilaku penyusun laporan keuangan di perusahaan publik. Temuan mereka menunjukkan bahwa pembaruan rutin mengenai dilema etika akuntansi berdampak positif terhadap penurunan asimetri informasi. Pengaruh signifikan ini terlihat pada perusahaan yang menerapkan standar etika yang ketat, di mana laporan keuangan mereka menunjukkan tingkat komparabilitas yang lebih baik. Ini mengonfirmasi bahwa kepatuhan etis bukan hanya kewajiban moral, tetapi

juga strategi kunci untuk mempertahankan kualitas pelaporan yang tinggi di tengah kompleksitas transaksi modern. Bahkan, studi komprehensif oleh Roberts dan Smith (2025) menyimpulkan bahwa integrasi antara prinsip etika tradisional dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memberikan dampak yang luar biasa terhadap integritas pelaporan keuangan. Penelitian ini mendapati bahwa perusahaan yang mengutamakan perilaku etis cenderung menghindari menyembunyikan kerugian dan lebih transparan dalam mengungkapkan risiko bisnis. Pengaruh positif dan signifikan ini memastikan bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi fundamental perusahaan tanpa adanya distorsi, sehingga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan di seluruh dunia.

#### **4.2.3.3. Analisis Hipotesis ke 3 Internal Control Effectiveness terhadap Financial Reporting Quality**

Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar -0,013 dengan tingkat signifikansi (p-value) sebesar 0,813. Mengingat nilai signifikansi ini jauh melampaui ambang batas toleransi 0,05, maka hipotesis yang menyatakan bahwa *internal control effectiveness* berpengaruh positif terhadap *financial reporting quality* secara empiris ditolak. Temuan ini mengindikasikan sebuah anomali dalam studi akuntansi, di mana keberadaan sistem kontrol yang secara teoretis berfungsi memitigasi risiko salah saji, ternyata tidak memberikan dampak linier terhadap peningkatan kualitas informasi keuangan pada lembaga yang diteliti.

Fenomena tidak berpengaruhnya pengendalian internal ini dapat dijelaskan melalui kacamata *Shariah Enterprise Theory* (SET). Dalam kerangka SET, *amanah* dan akuntabilitas tidak hanya bersifat horizontal kepada pemilik modal, tetapi juga vertikal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan sosial kepada masyarakat luas (Meutia, 2017). Ketika pengendalian internal hanya dijalankan sebagai pemenuhan prosedur formal tanpa didasari nilai-nilai *tauhid*, terjadi kegagalan dalam mewujudkan akuntabilitas yang hakiki. Penolakan hipotesis ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol pada lembaga tersebut mungkin baru sebatas aspek

teknis-prosedural, namun belum mampu menyentuh substansi etika syariah yang menjamin kejujuran dalam pelaporan keuangan (Mizushima, 2023).

Selain faktor nilai, tekanan lingkungan institusional memaksa lembaga keuangan Islam untuk tetap kompetitif terhadap bank konvensional, yang sering kali memicu fenomena kepatuhan simbolis. Meskipun elemen efisiensi dan kepatuhan telah diterapkan secara formal, kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas bagi hasil sering kali mendorong manajemen melakukan manajemen laba guna mempertahankan citra profitabilitas di mata investor (Lassoued, 2017). Kondisi ini menyebabkan terjadinya *decoupling* atau pemisahan antara prosedur kontrol tertulis dengan praktik nyata di lapangan, sehingga sistem pengendalian gagal membatasi diskresi manajemen dalam melakukan akrual subjektif (Mizushima, 2023).

Dari sisi operasional, kompleksitas instrumen keuangan syariah kontemporer, seperti inovasi dalam *Islamic fintech* dan struktur Sukuk yang rumit, sering kali melampaui kapasitas sistem pengendalian internal yang bersifat statis. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mekanisme kontrol formal di bank Islam sering kali gagal beradaptasi dengan kecepatan inovasi produk, yang berujung pada penurunan kualitas informasi keuangan (Khan & Ali, 2024). Ketika sistem tidak diperbarui secara dinamis, tercipta celah informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyajikan laporan yang bias, meskipun secara administratif prosedur pengendalian dianggap telah terpenuhi.

Faktor sumber daya manusia juga menjadi determinan penting mengapa efektivitas pengendalian internal tidak berkontribusi pada kualitas laporan. Adanya kesenjangan kompetensi, di mana departemen audit internal tidak memiliki keahlian teknis yang memadai untuk mengimbangi model bisnis yang berevolusi secara dinamis, menyebabkan kontrol hanya menjadi pelengkap administratif semata (Hussain et al., 2023). Tanpa didukung oleh kapabilitas SDM yang mampu mengelola kerumitan transaksi modern, infrastruktur pengendalian internal yang canggih sekalipun tetap menjadi aset statis yang tidak mampu mendeteksi manipulasi akuntansi atau risiko kepatuhan syariah yang kompleks (Nawaz & Khan, 2025).

Secara teoretis, tidak berpengaruhnya pengendalian internal ini menegaskan bahwa dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*, *financial reporting quality* tidak bisa hanya disandarkan pada infrastruktur formal jika ruh akuntabilitas ketuhanan diabaikan. SET memandang bahwa laporan keuangan adalah sarana distribusi keadilan dan kebenaran; jika pengendalian internal hanya dianggap sebagai beban regulasi (*compliance-driven*) dan bukan sebagai perwujudan *amanah*, maka sistem tersebut akan terisolasi dari proses pengambilan keputusan yang jujur (Meutia, 2017). Akibatnya, meskipun secara administratif sistem terlihat efektif, ia gagal memitigasi distorsi informasi karena kalah oleh motif kepentingan jangka pendek yang tidak selaras dengan prinsip kemaslahatan umat dalam ekonomi Islam (Mizushima, 2023).

#### **4.2.3.4. Analisis Hipotesis ke 4 *Fraud Prevention* terhadap *Financial Reporting Quality***

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa variabel *Fraud Prevention* (FP) memiliki koefisien jalur sebesar 0,107 dengan nilai signifikansi p-value sebesar 0,148. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun arah pengaruhnya positif, namun tidak mencapai ambang batas signifikansi statistik yang dipersyaratkan ( $p < 0,05$ ). Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa *Fraud Prevention* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ) pada lembaga keuangan syariah di Indonesia secara resmi ditolak.

Ketidaksignifikanan ini mengindikasikan bahwa upaya *fraud prevention* yang dilakukan secara mandiri belum mampu menjadi katalisator utama dalam meningkatkan *financial reporting quality*. Secara teoretis, hal ini dapat dijelaskan secara mendalam melalui *Shariah Enterprise Theory* (SET). Dalam kerangka SET, organisasi syariah memiliki tanggung jawab yang luas, mencakup akuntabilitas vertikal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta akuntabilitas horizontal kepada manusia dan alam. Temuan ini menyiratkan bahwa mekanisme *fraud prevention* di LKS saat ini mungkin masih terjebak pada dimensi formalitas administratif, sehingga gagal menyentuh esensi *amanah* yang dibutuhkan untuk menjamin integritas pelaporan secara menyeluruh (Meutia, 2017). Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*, setiap aktivitas operasional harus berlandaskan nilai *tauhid*.

Namun, hasil penelitian ini menyiratkan bahwa sekadar membangun sistem pencegahan mekanistik tanpa diiringi internalisasi nilai-nilai spiritual tidak akan berdampak besar pada kualitas informasi. Di lembaga keuangan syariah, tekanan untuk menjaga performa profitabilitas sering kali tetap tinggi, yang pada akhirnya melampaui efektivitas sistem pencegahan formal yang ada karena sistem tersebut belum mampu membendung dorongan kepentingan jangka pendek yang mengabaikan kemaslahatan umat (Lassoued, 2017).

Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem pencegahan sering kali mengalami *decoupling* atau pemisahan antara kebijakan tertulis dengan praktik nyata. Penelitian oleh Smith (2021) menunjukkan bahwa di organisasi dengan budaya kepatuhan yang rendah, alat *fraud prevention* hanya menjadi "pajangan" regulasi. Hal ini mengonfirmasi mengapa koefisien 0,107 yang didapatkan tergolong lemah; terdapat upaya formal untuk mencegah kecurangan, namun sistem tersebut belum cukup kuat secara substansi spiritual untuk benar-benar mengangkat standar kualitas pelaporan ke level yang lebih tinggi.

Ketidaksignifikanan pengaruh Fraud Prevention dalam penelitian ini memperkuat temuan Amara et al. (2019) yang menyatakan bahwa mekanisme pencegahan sering kali gagal memberikan dampak jika tidak dibarengi dengan penegakan nilai yang kuat. Dalam sudut pandang *Shariah Enterprise Theory*, penegakan ini seharusnya bersumber dari kesadaran *Muraqabah* (merasa selalu diawasi oleh Allah). Meskipun instrumen pencegahan tersedia, ketiadaan sanksi yang tegas atau lemahnya pengawasan berbasis syariah membuat prosedur tersebut baru sebatas pemenuhan standar legalitas tanpa adanya daya tekan moral yang nyata bagi para pengelolanya (Mizushima, 2023).

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Kuntari et al. (2017) yang menemukan bahwa *fraud prevention* tidak berpengaruh signifikan karena adanya dominasi budaya organisasi yang kurang transparan. Dalam lingkungan yang cenderung melindungi citra institusi, sistem pencegahan sering kali diabaikan demi menyajikan laporan finansial yang tampak stabil. Temuan koefisien 0,107 mencerminkan kondisi di mana sistem ada sebagai struktur formal, namun gagal

memenuhi mandat SET untuk mendistribusikan informasi yang jujur kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas sosial (Meutia, 2017).

Lebih lanjut, hasil ini didukung oleh studi Faradiza (2019) yang menyoroti bahwa efektivitas pencegahan sangat bergantung pada integritas peran audit internal. Jika audit internal hanya berfungsi sebagai pelengkap administratif dan tidak menginternalisasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap prosedurnya, maka upaya pencegahan tidak akan mampu meningkatkan kualitas pelaporan secara substansial. Hal ini menjelaskan mengapa nilai signifikansi dalam penelitian ini (0,148) berada di atas ambang batas, karena sistem formal yang ada belum mampu menjamin kualitas informasi di mata para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sebaliknya, ketidaksignifikanan ini memberikan kontras terhadap penelitian Nasir et al. (2020) yang menyatakan bahwa pencegahan seharusnya menjadi prediktor utama kualitas. Perbedaan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kompleksitas transaksi syariah yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam sistem pencegahan yang ada saat ini. Melalui kaca mata SET, hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meredesain instrumen pencegahan agar tidak sekadar mengadopsi sistem konvensional, melainkan mensinkronisasikannya dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu keadilan dan kebenaran informasi (Nawaz & Khan, 2025).

Penelitian oleh Zulaikha et al. (2021) juga memberikan sudut pandang serupa mengenai dominasi tekanan eksternal pasar yang sering kali melumpuhkan sistem pencegahan kecurangan. Ketika tekanan untuk menjaga stabilitas bagi hasil meningkat, efektivitas sistem pencegahan menurun secara drastis. Hal ini menjelaskan mengapa dalam konteks penelitian ini, *fraud prevention* secara mandiri tidak memiliki kekuatan statistik yang cukup, karena orientasi manajemen mungkin masih tertuju pada kepentingan jangka pendek daripada tanggung jawab amanah sebagaimana yang ditekankan dalam SET.

Terakhir, temuan ini memperkuat argumen Rudyanto dan Siregar (2018) bahwa kualitas laporan lebih dipengaruhi oleh tata kelola secara makro daripada sekadar prosedur teknis. Tanpa adanya komitmen dari manajemen tingkat atas untuk menegakkan etika pelaporan yang berlandaskan amanah ketuhanan, prosedur

pengecehan kecurangan hanya akan menjadi instrumen yang tumpul. Oleh karena itu, rendahnya signifikansi dalam penelitian ini mengonfirmasi bahwa pengecehan membutuhkan dukungan struktur tata kelola syariah (*Shariah Governance*) yang lebih holistik (Mizushima, 2023).

Faktor regulasi juga memegang peranan penting, meskipun OJK telah mengeluarkan kebijakan terkait strategi anti-*fraud*, implementasinya mungkin masih dalam tahap adaptasi legalitas. *Shariah Enterprise Theory* menekankan bahwa kepatuhan seharusnya tidak hanya untuk mendapatkan legitimasi regulator, tetapi untuk mencapai kebenaran materiil. Ketidaksignifikanan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga mungkin masih berfokus pada pemenuhan aspek legalitas formal daripada esensi dari amanah pelaporan itu sendiri.

Selain itu, karakteristik unik LKS yang menekankan pada nilai etika Islam seharusnya menjadi benteng tambahan yang kuat. Namun, temuan ini menunjukkan adanya celah antara nilai moralitas individu dengan sistem formal organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengecehan kecurangan yang ada saat ini mungkin belum selaras dengan prinsip akuntabilitas sosial dalam SET, sehingga kekuatannya dalam menjamin kualitas laporan yang kredibel menjadi pudar (Hussain et al., 2023).

Penyebab lain dari tidak signifikannya pengaruh ini terletak pada kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif SET, manusia adalah pelaku utama amanah. Pencegehan memerlukan keahlian audit investigatif sekaligus pemahaman nilai syariah yang mendalam. Jika personil tidak memiliki kompetensi yang cukup, maka sistem pengecehan tidak akan mampu mendeteksi manipulasi halus, yang pada akhirnya membuat kualitas informasi tetap rendah. Kompetensi SDM adalah kunci dalam menjalankan amanah informasi bagi stakeholders (Nawaz & Khan, 2025).

Selain itu, terdapat kemungkinan adanya fenomena "*Management Override*" di mana kontrol pengecehan dapat dilewati oleh otoritas tinggi. Dalam SET, otoritas yang besar menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar pula kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Jika budaya organisasi masih mengabaikan transparansi, maka sistem tersebut tidak akan berkontribusi nyata pada peningkatan

*Financial Reporting Quality*. Keengganan melaporkan anomali meskipun sistem tersedia membuat pencegahan menjadi tidak efektif.

Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi juga memengaruhi hasil ini. Ketika pasar tidak menentu, tekanan untuk menyajikan laporan keuangan yang sehat menjadi sangat masif. Dalam kondisi seperti ini, program pencegahan kecurangan sering kali kalah prioritas dibandingkan upaya menjaga citra institusi melalui praktik *window dressing*. Hal ini secara langsung menurunkan kualitas laporan keuangan namun dianggap perlu demi stabilitas, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam SET (Lassoued, 2017).

Kurangnya integrasi teknologi digital terkini dalam sistem pencegahan juga ditengarai menjadi penyebab lemahnya pengaruh tersebut. Di era digital, pencegahan manual sudah tidak memadai untuk mendeteksi skema kecurangan yang kompleks. Dalam kerangka SET, pemanfaatan teknologi seperti *Artificial Intelligence* seharusnya menjadi alat untuk memperkuat transparansi informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, sehingga akuntabilitas kepada masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal (Khan & Ali, 2024).

Dalam perspektif syariah, ketidaksignifikanan pengaruh ini secara statistik tidak menegaskan urgensi pencegahan, melainkan memberikan kritik terhadap cara penerapannya. Hal ini berkaitan dengan konsep *Amanah* dan *Siddiq* yang merupakan pilar utama SET. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menegaskan pentingnya transparansi dalam QS. Al-Baqarah: 282, di mana pencatatan akurat adalah perintah untuk menghindari keraguan.

Temuan pengaruh yang lemah (0,107) mengindikasikan bahwa sistem formal belum terinternalisasi sebagai bentuk ibadah oleh para pengelolanya (Meutia, 2017). Fenomena kecurangan yang tetap terjadi menunjukkan bahwa "benteng" pencegahan formal masih memiliki celah moralitas yang besar. Pencegahan secara administratif terbukti tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kekuatan Ihsan kesadaran bahwa Allah Maha Melihat terhadap setiap angka yang disajikan. Sebagaimana prinsip SET, sistem pencegahan seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keadilan distribusi informasi bagi semua pihak (Mizushima, 2023).

Terakhir, ketidaksignifikanan ini memberikan sinyal bahwa LKS perlu kembali pada tata kelola berbasis *Maqasid Syariah*, khususnya aspek *Hifz al-Mal* (perlindungan harta). Upaya pencegahan kecurangan tidak boleh hanya dipandang sebagai beban regulasi, tetapi sebagai implementasi dari perintah menyampaikan amanah kepada yang berhak (QS. An-Nisa: 58). Solusi ke depan bukan sekadar memperketat prosedur teknis, melainkan mengintegrasikan audit spiritual ke dalam sistem pengawasan internal agar kualitas informasi keuangan yang dihasilkan benar-benar kredibel dan barakah (Nawaz & Khan, 2025).

#### **4.2.3.5. Analisis Hipotesis ke 5 *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Reporting Quality* dengan *Fraud Prevention* sebagai Moderasi**

Dalam lembaga keuangan syariah, *Islamic corporate governance* (ICG) bertujuan untuk memastikan operasional dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hubungan antara *Islamic corporate governance* dan *Financial Reporting Quality* diperkuat melalui *fraud prevention*, yang mengintegrasikan langkah-langkah strategis untuk meminimalkan potensi penyimpangan yang dapat merusak kepercayaan dan integritas laporan keuangan.

*Shariah Enterprise Theory* (SET) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban perusahaan tidak hanya terbatas pada pemilik modal (*prinsipal*), tetapi meluas kepada Allah SWT sebagai pemilik mutlak segala sumber daya, serta kepada manusia dan alam. Dalam perspektif ini, manajemen memegang peran sebagai pemegang amanah yang wajib menyajikan informasi secara transparan dan jujur untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan materiil dan spiritual. Penerapan prinsip ini bertujuan memastikan bahwa seluruh aktivitas entitas dijalankan sesuai koridor syariah guna mencapai kemaslahatan bersama dan keberkahan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Namun, penerapan *Islamic corporate governance* saja tidak cukup tanpa dukungan mekanisme *fraud prevention*. Dengan menerapkan *Establishment of Anti-Fraud Policy* dan *Control Techniques*, lembaga keuangan syariah dapat mengurangi asimetri informasi, memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan dimensi *financial reporting quality* seperti *Faithful Representation* dan *Comparability*.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *Islamic corporate governance* mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan perusahaan untuk memastikan keadilan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Namun, potensi penyimpangan seperti kecurangan dapat menghambat penerapan *Islamic corporate governance* secara efektif, sehingga diperlukan mekanisme *fraud prevention*. Mekanisme ini memperkuat hubungan antara *Islamic corporate governance* dan *financial reporting quality* dengan memastikan bahwa setiap aktivitas bisnis, termasuk financial reporting, berjalan sesuai prinsip syariah.

Kecurangan, dalam bentuk manipulasi laporan keuangan, penggelapan, atau penyimpangan lainnya, bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar *Islamic corporate governance*. Al-Qur'an dengan tegas melarang segala bentuk kecurangan

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Ayat ini menekankan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam aktivitas ekonomi. Ketika *fraud prevention* diterapkan melalui dimensi seperti *Sensitivity to Fraud* (kepekaan terhadap tanda-tanda kecurangan) dan *Control Techniques* (teknik pengendalian), maka mekanisme ini mencegah terjadinya penyimpangan yang melanggar nilai syariah. Dengan begitu, pelaksanaan prinsip ICG seperti transparansi (*Shiddiq*) dan *Fairness (Tawazun)* dapat berjalan optimal, yang pada akhirnya meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Prinsip transparansi (*Shiddiq*) dalam ICG mengacu pada pengungkapan informasi yang jujur dan terbuka, sementara akuntabilitas (*Amanah*) menekankan tanggung jawab kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, pemangku kepentingan, dan masyarakat. *Fraud Prevention* memastikan bahwa prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi nilai moral, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalil Al-Qur'an yang mendukung prinsip kejujuran yakni

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (QS. Al-An'am: 152).

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam pelaporan keuangan adalah amanah yang harus dijaga. *Fraud Prevention* melalui kebijakan seperti *Establishment of Anti-Fraud Policy* memastikan bahwa laporan keuangan dihasilkan secara transparan, sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab syariah.

Dimensi *Shariah Compliance* dalam ICG menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah. Basiruddin & Ahmed, (2020). Ketika kecurangan terjadi, seperti memanipulasi angka untuk menutupi ketidakpatuhan terhadap syariah, ini merusak integritas lembaga keuangan. *Fraud prevention* memastikan kepatuhan terhadap syariah tetap terjaga dengan meminimalkan potensi penyimpangan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

"...dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini melarang penggunaan cara yang batil, termasuk manipulasi dalam *financial reporting*. Dengan penerapan dimensi seperti *Control Techniques* dan *Standard Prevention Procedures*, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya relevan dan dapat dipercaya, tetapi juga mematuhi syariat Islam.

*Financial reporting quality* ditentukan oleh dimensi seperti *Faithful Representation* dan *Relevance*, yang hanya dapat dicapai jika pelaporan dilakukan secara jujur dan sesuai fakta. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan dalam segala aspek kehidupan

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa: 58)

*Fraud prevention* mencerminkan upaya nyata untuk menjaga *amanah* khususnya melalui *Sensitivity to Fraud*, yang bertujuan mendeteksi potensi kecurangan sedini mungkin, sehingga laporan keuangan dapat memenuhi standar syariah. Dengan demikian, hubungan ICG dan FRQ diperkuat melalui kepercayaan yang ditanamkan dalam setiap proses pelaporan.

*Fraud prevention* memperkuat hubungan antara *Islamic corporate governance* dan *financial reporting quality* karena mekanisme ini melindungi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah, seperti transparansi, keadilan, dan amanah, dari potensi penyimpangan. Mewujudkan perintah Al-Qur'an untuk menjaga kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Allah. Menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dengan menciptakan laporan keuangan yang relevan, akurat, dan sesuai syariat.

Dengan berlandaskan dalil-dalil Al-Qur'an, *fraud prevention* menjadi bentuk nyata penerapan nilai-nilai Islam pada lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa ICG tidak hanya menjadi konsep, tetapi juga memberikan dampak nyata pada *financial reporting quality* yang memenuhi standar syariah dan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini mendukung teori Sharma et al, (1981) bahwa asumsi *fraud prevention* bertindak sebagai *pure moderator* yaitu ketika variabel moderasi (*fraud prevention*) yang memiliki 4 (empat) dimensi yaitu penetapan kebijakan anti-*fraud*, prosedur pencegahan standar, teknik pengendalian dan sensitivitas terhadap *fraud* dapat berpengaruh terhadap variabel *financial reporting quality*, hanya ketika berinteraksi dengan variabel *Islamic corporate governance* yang meliputi 6 (enam)

dimensi yaitu transparansi/ keterbukaan (*Shiddiq*), akuntabilitas (*Amanah*), *responsibility*/ pertanggungjawaban (*Tabliq*), indenpendensi/ kemandirian (*Huriyah*), *fairness*/kesetaraan (*Tawazun*), *shariah compliance* (prinsip-prinsip syariah).

#### **4.2.3.6. Analisis Hipotesis ke 6 *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality* dengan *Fraud Prevention* sebagai Moderasi**

Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa variabel *Fraud Prevention* (FP) terbukti memoderasi hubungan antara *Accounting Ethics* terhadap *Financial Reporting Quality* (FRQ). Hal ini ditunjukkan oleh koefisien interaksi yang bernilai positif sebesar 0,138 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,029 ( $p < 0,05$ ). Temuan ini mengonfirmasi bahwa keberadaan sistem pencegahan kecurangan yang kuat mampu memperkuat pengaruh positif etika profesi dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Analisis statistik lebih lanjut menunjukkan bahwa *Fraud Prevention* bertindak sebagai *Pure Moderator* (Moderator Murni). Hal ini berarti variabel *fraud prevention* tidak berpengaruh secara langsung terhadap *financial reporting quality*, namun ia memainkan peran krusial dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh etika. Tanpa adanya sistem pencegahan yang memadai, *accounting ethics* yang dimiliki individu mungkin tidak akan teraktualisasi secara maksimal dalam pelaporan keuangan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan dukungan kuat bagi penerapan *Shariah Enterprise Theory* (SET) dalam memperjelas bagaimana *financial reporting quality* dibentuk. Dalam perspektif SET, *accounting ethics* bukan sekadar kode etik profesi, melainkan manifestasi dari nilai-nilai tauhid yang mendasari akuntabilitas vertikal seorang akuntan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Di sini, *Fraud Prevention* berfungsi sebagai bentuk kontrol lingkungan yang memperkuat kapabilitas individu dalam menjalankan amanah tersebut. Ketika sistem pencegahan berjalan efektif, ia menciptakan ekosistem yang mendukung akuntan beretika untuk tetap konsisten pada prinsip kebenaran materiil, sehingga integritas moral individu dapat terkonversi secara sistematis menjadi laporan keuangan yang berkualitas dan jauh dari unsur kebatilan.

Dalam kerangka *Shariah Enterprise Theory*, peran moderasi ini sangat esensial karena mengakui bahwa manusia memerlukan infrastruktur yang selaras dengan nilai-nilai ketuhanan untuk mencapai kesejahteraan bersama (*falah*). *Accounting Ethics* bertindak sebagai kompas internal yang mengarahkan akuntan pada nilai kejujuran (*Siddiq*), sementara *Fraud Prevention* bertindak sebagai pagar eksternal yang menjaga agar operasional tetap berada dalam koridor syariah.

Sinergi antara kompas internal yang bersumber dari etika spiritual dan pagar eksternal yang kokoh melalui sistem pencegahan memastikan bahwa akuntan tidak hanya memiliki kesadaran untuk berbuat benar, tetapi juga berada dalam lingkungan yang "mengkondisikan" mereka untuk tetap jujur. Hal ini meminimalkan risiko distorsi informasi yang dapat merugikan pemangku kepentingan luas, sehingga tujuan akhir dari SET yaitu pendistribusian kemaslahatan dan informasi yang adil bagi seluruh umat dapat tercapai secara maksimal.

Jika dikaitkan dengan aspek teologis, moderasi ini mencerminkan konsep *Taqwa* dan *Muraqabah*. *Accounting Ethics* adalah manifestasi dari integritas individu, namun manusia tetap membutuhkan pengingat sistemik agar terhindar dari kelalaian. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Ma'idah: 2: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Sistem pencegahan kecurangan dalam organisasi adalah bentuk "tolong-menolong dalam kebajikan" yang memperkuat komitmen etis akuntan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Sari et al. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas kode etik akuntan meningkat secara signifikan ketika didukung oleh lingkungan pengendalian internal yang preventif. Tanpa pencegahan, etika sering kali kalah oleh tekanan situasional. Namun, dengan adanya pencegahan, akuntan memiliki alasan struktural untuk menolak praktik manipulasi, yang pada akhirnya memperkuat integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian Prabowo (2020) juga mendukung hasil ini, di mana ditemukan bahwa moderasi *fraud prevention* berfungsi sebagai *filter* yang menyaring potensi

penyimpangan sejak dini. Keberadaan sistem seperti pemisahan tugas, otorisasi ganda, dan audit rutin memastikan bahwa akuntan yang menjunjung tinggi etika tidak terjebak dalam sistem kerja yang koruptif. Hal inilah yang menjelaskan mengapa koefisien interaksi 0,138 dalam penelitian ini memiliki arah positif dan signifikan.

Dari sisi regulasi, hasil ini sangat relevan dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. Regulasi ini mewajibkan lembaga keuangan memiliki empat pilar anti-fraud, di mana pencegahan menjadi pilar pertama. Signifikansi hasil penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan OJK tersebut sudah berada pada jalur yang tepat; regulasi pencegahan memang diperlukan untuk memperkuat landasan etis para praktisi akuntansi di lapangan.

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis prinsip juga membutuhkan interpretasi etis yang kuat. Tanpa *fraud prevention*, interpretasi ini bisa disalahgunakan untuk *earning management*. Namun, dengan adanya moderasi *fraud prevention*, ruang gerak untuk melakukan interpretasi yang menyesatkan menjadi tertutup. Hal ini memastikan bahwa substansi ekonomi dari setiap transaksi tercermin secara jujur dalam laporan keuangan, sesuai dengan semangat regulasi akuntansi terbaru.

Sistem *fraud prevention* sering kali mencakup pelatihan etika berkelanjutan. Hal ini menyebabkan variabel pencegahan tidak berdiri sendiri, melainkan secara konsisten merefresh pemahaman akuntan mengenai standar perilaku yang benar. Sinergi antara sistem yang mengingatkan dan nurani yang jujur inilah yang menciptakan daya dorong besar terhadap *Financial Reporting Quality*, sebagaimana terlihat dari nilai signifikansi 0,029. Lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki karakteristik unik di mana kepercayaan publik adalah aset utama. Peran *Pure Moderator* dari *fraud prevention* di sini sangat vital. Lembaga keuangan syariah (LKS) yang menerapkan *fraud prevention* dengan baik memberikan sinyal kepada publik bahwa mereka tidak hanya memiliki nilai syariah secara simbolis, tetapi juga secara praktis menjaga amanah dana umat melalui sistem yang

akuntabel, yang memperkuat pengaruh moralitas individu terhadap kualitas laporan.

Kemungkinan lain dari keberhasilan moderasi ini adalah integrasi teknologi digital dalam pencegahan. Penggunaan *automated controls* dalam sistem akuntansi mempersempit ruang diskresi manual yang bias. Akuntan yang beretika akan merasa terbantu dengan teknologi pencegahan ini karena meminimalkan risiko kesalahan manusia dan manipulasi pihak lain, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan objektif.

Melihat fakta bahwa variabel ini adalah *Pure Moderator*, ke depan, lembaga harus berfokus pada sinkronisasi sistem. Pencegahan tidak boleh dianggap sebagai departemen yang terpisah, melainkan harus menyatu dalam setiap proses bisnis. Solusi praktisnya adalah memperkuat sistem *Whistleblowing* yang terintegrasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga aspek etika dan pencegahan berjalan beriringan dalam pengawasan yang holistik.

**4.2.3.7. Analisis Hipotesis ke 7 *Internal Control Effectiveness* terhadap *Financial Reporting Quality* dengan *Fraud Prevention* sebagai Moderasi *Internal Control Effectiveness*** secara mandiri tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap *Financial Reporting Quality*. Namun, ketika variabel *Fraud Prevention* dimasukkan sebagai variabel moderasi, interaksi keduanya menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,018 ( $p < 0,05$ ). Temuan ini menegaskan bahwa *Fraud Prevention* bertindak sebagai *Pure Moderator*, yang artinya ia tidak memiliki pengaruh langsung tetapi berfungsi penuh sebagai katalisator yang memperkuat hubungan antara *internal control* dan *financial reporting*.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memberikan validasi empiris yang kuat terhadap penerapan *Shariah Enterprise Theory* (SET) dalam memperkokoh akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Dalam perspektif SET, pengendalian internal bukan sekadar instrumen teknis untuk mencapai efisiensi operasional, melainkan sarana untuk menjalankan amanah dalam menjaga harta (*Hifz al-Mal*) dan memastikan keadilan distribusi informasi. Temuan ini menegaskan bahwa

efektivitas pengendalian internal tidak dapat berdiri sendiri, ia memerlukan faktor pendukung lainnya agar nilai-nilai syariah tetap terjaga. Dalam konteks ini, *Fraud Prevention* bertindak sebagai lingkungan yang memastikan seluruh prosedur pengendalian internal berjalan di atas prinsip kejujuran (*Siddiq*) tanpa adanya upaya sabotase atau bypass yang dapat merusak kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam kerangka *Shariah Enterprise Theory*, peran *Pure Moderator* ini menjelaskan bahwa tanggung jawab vertikal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan horizontal kepada publik hanya dapat diwujudkan jika mekanisme kontrol (Pengendalian Internal) diaktivasi oleh sistem deteksi dan pencegahan dini (*Fraud Prevention*). Tanpa adanya pencegahan yang aktif, risiko munculnya perilaku yang merugikan kepentingan umat (*mudharat*) tetap terbuka meskipun prosedur formal telah terpenuhi.

Signifikansi 0,018 menunjukkan bahwa ketika strategi pencegahan diperketat sebagai bentuk *Sadd ad-Dzarai'* (menutup jalan menuju kemudaran), maka ruang bagi terjadinya distorsi informasi menjadi tertutup. Sinergi ini memastikan bahwa pengendalian internal tidak hanya menjadi simbol kepatuhan regulasi, tetapi benar-benar bertransformasi menjadi alat yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi, transparan, dan mampu memberikan kemaslahatan (*falah*) bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tujuan utama ekonomi Islam..

Secara regulasi, temuan ini sangat relevan dengan POJK Nomor 12 Tahun 2024 dan implementasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Regulasi tersebut menekankan bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian tidak akan efektif tanpa adanya budaya anti-fraud yang terstruktur. Hasil penelitian ini membuktikan secara statistik bahwa pemenuhan regulasi pencegahan kecurangan adalah variabel pembeda yang menentukan apakah pengendalian internal suatu lembaga keuangan syariah benar-benar berkontribusi pada transparansi informasi atau tidak.

Mengaitkan hal ini dengan dalil *naqli*, peran *Fraud Prevention* sebagai moderator sejalan dengan konsep *Hisbah* dalam Islam. Institusi *Hisbah* berfungsi

untuk memastikan bahwa nilai-nilai kejujuran ditegakkan di pasar dan organisasi. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali 'Imran: 104:

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."*

Dalam konteks penelitian ini, pengendalian internal adalah upaya *ma'ruf* (kebaikan sistem), sementara *Fraud Prevention* adalah mencegah yang *munkar*. *Financial Reporting Quality* yang hakiki hanya akan tercapai jika sistem yang baik didukung oleh keberanian untuk mencegah kemunkaran (kecurangan). Hasil signifikan pada interaksi kedua variabel ini membuktikan bahwa sinergi antara pembangunan sistem dan pencegahan maksiat adalah kunci keberuntungan (kesuksesan) organisasi.

Penyebab kemungkinan mengapa pengendalian internal tidak signifikan secara langsung namun menjadi signifikan saat dimoderasi adalah adanya fenomena *Compliance Fatigue*. Banyak lembaga keuangan syariah yang hanya menjalankan prosedur pengendalian sebagai rutinitas administratif demi menggugurkan kewajiban audit. Tanpa adanya fokus pada *fraud prevention* (seperti *whistleblowing system* atau audit forensik), prosedur tersebut kehilangan esensinya.

Penelitian terdahulu oleh Rudyanto (2018) juga menyiratkan hal serupa, di mana pengendalian internal sering kali gagal mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas (*management override*). Namun, dengan adanya moderasi dari *Fraud Prevention* yang kuat, celah untuk melewati kontrol tersebut menjadi tertutup. Interaksi inilah yang menjelaskan mengapa koefisien interaksi dalam penelitian ini sangat bermakna; pencegahan berfungsi sebagai sistem pengamanan berlapis yang mengunci efektivitas kontrol.

Analisis lebih dalam menunjukkan bahwa *Pure Moderator* mengindikasikan *Fraud Prevention* tidak berinteraksi secara redundan dengan pengendalian internal. Ia berdiri sebagai entitas berbeda yang "membangun" potensi pengendalian internal. Tanpa adanya *Fraud Prevention*, pengendalian internal di lembaga keuangan syariah mungkin hanya dianggap sebagai biaya

tambahan (*cost*), namun dengan adanya moderasi, ia berubah menjadi investasi strategis yang menjamin kepercayaan investor dan nasabah.

Hal ini juga berkaitan dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), khususnya pada SA Seksi 316 yang mewajibkan auditor untuk mempertimbangkan risiko kecurangan. Hasil signifikan 0,018 ini memberikan pesan kuat kepada para praktisi di LKS bahwa auditor internal tidak boleh hanya mengecek kepatuhan prosedur (pengendalian internal), tetapi harus fokus pada efektivitas *fraud prevention*. Jika pencegahan lemah, maka hasil audit atas pengendalian internal tidak akan menjamin *financial reporting quality* yang sesungguhnya.

Penyebab lain dari peran moderator ini adalah faktor Budaya Organisasi. Di lembaga yang menjunjung tinggi etika syariah, *Fraud Prevention* terintegrasi dalam budaya kerja. Ketika budaya pencegahan ini kuat, setiap elemen dalam pengendalian internal seperti pemisahan tugas dan otorisasi berjalan secara otomatis dengan integritas tinggi. Sebaliknya, tanpa budaya pencegahan, pemisahan tugas hanya menjadi hambatan birokrasi yang justru memicu kolusi.

Penelitian Agyei-Mensah (2019) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa kualitas pelaporan di lembaga keuangan sangat bergantung pada integritas lingkungan pengendalian. Dalam penelitian ini, *Fraud Prevention* bertindak sebagai penentu integritas lingkungan tersebut. Solusi ke depan bagi lembaga keuangan syariah, berdasarkan temuan ini, adalah dengan menerapkan *Integrated Anti-Fraud Management System*. Lembaga tidak boleh lagi memisahkan antara unit kepatuhan, unit audit internal, dan unit manajemen risiko. Ketiganya harus bekerja dalam satu payung *Fraud Prevention* untuk mengaktifkan mekanisme pengendalian internal yang selama ini mungkin masih berjalan sendiri-sendiri secara parsial.

Secara manajerial, pimpinan di Lembaga Keuangan Syariah harus memberikan perhatian lebih pada anggaran *anti-fraud*. Temuan ini membuktikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk *fraud prevention* tidak akan sia-sia, karena ia memberikan *multiplier effect* bagi efektivitas seluruh sistem pengendalian yang telah dibangun dengan biaya mahal. Pencegahan adalah katalisator efisiensi dan efektivitas organisasi.

Dalam konteks makro, hasil ini mendorong perlunya penguatan regulasi dari Bank Indonesia dan OJK untuk lebih spesifik dalam mengatur standar *fraud prevention* di sektor syariah. Regulasi yang lebih detail mengenai pencegahan akan membantu lembaga-lembaga syariah yang saat ini memiliki pengendalian internal yang lemah untuk tetap bisa menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi melalui pintu masuk pencegahan *fraud*.



## BAB V PENUTUP

### 5.1. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi determinan yang memengaruhi *financial reporting quality* dengan meninjau aspek tata kelola, etika, dan sistem kendali internal. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Islamic Corporate Governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial reporting quality*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *Islamic corporate Governance*, maka akan semakin meningkatkan *financial reporting quality*.
2. *Accounting Ethics* berpengaruh positif signifikan terhadap *financial reporting quality*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik *accounting ethics*, maka akan semakin meningkatkan *financial reporting quality*.
3. *Internal Control Effectiveness* tidak signifikan mempengaruhi *financial reporting quality*. Hal ini menunjukkan bahwa *Internal Control* tidak memiliki dampak signifikan terhadap *Financial Reporting Quality*.
4. *Fraud prevention* tidak signifikan mempengaruhi *financial reporting quality*. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud prevention* tidak memiliki dampak signifikan terhadap *Financial Reporting Quality*.
5. *Fraud Prevention* dapat memoderasi pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap *Financial reporting quality*. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud prevention* mampu memperkuat pengaruh *Islamic corporate governance* terhadap *financial reporting quality*.
6. *Fraud Prevention* dapat memoderasi pengaruh *Accounting Ethics* terhadap *Financial reporting quality*. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud prevention* dapat memperkuat pengaruh *accounting ethics* terhadap *Financial reporting quality*.
7. *Fraud Prevention* dapat memoderasi pengaruh *internal control effectiveness* terhadap *Financial reporting quality*. Hal ini menunjukkan

bahwa *fraud prevention* dapat memperkuat pengaruh *internal control effectiveness* terhadap *Financial reporting quality*.

## 5.2. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis yang signifikan terhadap pengembangan literatur akuntansi syariah, khususnya dalam memperkokoh kerangka *Shariah Enterprise Theory* (SET) sebagai landasan utama akuntabilitas. Temuan bahwa *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Accounting Ethics* berpengaruh positif signifikan terhadap *Financial Reporting Quality* memberikan validasi empiris bahwa kualitas informasi dalam lembaga syariah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan teknis, tetapi oleh kedalaman akuntabilitas vertikal kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan akuntabilitas horizontal kepada pemangku kepentingan. Secara teoretis, hal ini memperkuat relevansi penerapan PP No. 43 Tahun 2025 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Nasional, di mana regulasi tersebut menuntut validitas data sejak dari sumbernya. Dalam kacamata SET, kepatuhan terhadap PP ini bukan sekadar pemenuhan legalitas, melainkan bentuk internalisasi nilai *Siddiq* (kejujuran) yang mentransformasi laporan keuangan menjadi instrumen distribusi kebenaran informasi yang adil bagi umat.

Di sisi lain, hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Internal control effectiveness* secara langsung tidak berpengaruh signifikan memberikan diskursus baru mengenai risiko formalisme dalam sistem kendali. Dalam perspektif *Shariah Enterprise Theory*, temuan ini menyiratkan bahwa sistem kontrol yang bersifat mekanistik-administratif akan kehilangan daya gunanya jika dipisahkan dari ruh akuntabilitas ketuhanan, sehingga infrastruktur kontrol yang canggih sekalipun dapat mengalami *decoupling* atau sekadar menjadi formalitas di atas kertas. Hal ini memberikan pelajaran teoretis bahwa tanpa didasari oleh integritas individu sebagai pemegang amanah, prosedur formal tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menjamin kualitas laporan keuangan yang hakiki, meskipun perusahaan telah berupaya menyelaraskan diri dengan standar pelaporan nasional yang baru.

Kontribusi teoretis yang paling krusial dalam penelitian ini terletak pada peran *Fraud Prevention* sebagai *Pure Moderator* yang secara konsisten

memperkuat pengaruh ICG, AE, dan INC terhadap FRQ. Dalam kerangka SET, *Fraud Prevention* bertindak sebagai instrumen *Sadd ad-Dzarai'* atau upaya menutup jalan menuju kemudharatan yang memastikan niat baik dan sistem nilai terkonversi menjadi kualitas informasi yang nyata. Secara teoretis, fenomena di mana pengendalian internal yang awalnya tidak signifikan menjadi berpengaruh kuat ketika dimoderasi oleh *fraud prevention* membuktikan bahwa sistem yang statis memerlukan "aktivasi" melalui lingkungan yang aktif menjaga amanah. Hal ini memperkuat argumen teoretis bahwa sinergi antara kesadaran spiritual internal dan sistem pencegahan eksternal sebagaimana yang diamanatkan dalam pilar-pilar strategi anti-*fraud* adalah syarat mutlak bagi tercapainya *falah* (kesejahteraan) dalam pelaporan keuangan di era modern.

Terakhir, integrasi *Fraud Prevention* sebagai penguat seluruh jalur hubungan dalam model ini memberikan implikasi teoretis mengenai adaptasi SET terhadap kemajuan teknologi digital di tahun 2026. Sejalan dengan semangat PP No. 43 Tahun 2025 yang menekankan transparansi data di era keterbukaan, penggunaan teknologi deteksi anomali kini bukan lagi sekadar alat efisiensi, melainkan sarana untuk memperkuat prinsip transparansi (*Al-Bayan*) yang diamanatkan syariah. Secara teoretis, penelitian ini berhasil mengintegrasikan kapabilitas sistem pencegahan ke dalam pilar akuntabilitas sosial SET, guna memastikan bahwa di tengah kerumitan transaksi keuangan modern, laporan keuangan tetap mampu mempertahankan objektivitas dan reliabilitasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban yang jujur dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

### **5.3. Implikasi Kebijakan**

Kebijakan lembaga keuangan syariah tidak boleh lagi menempatkan *Fraud prevention* hanya sebagai fungsi pendukung, melainkan harus menjadikannya sebagai instrumen strategis yang wajib menyatu dalam *Manual Strategi Anti-Fraud* yang komprehensif. Hal ini merupakan implikasi krusial dari temuan bahwa *internal control effectiveness* (INC) dan *fraud prevention* (FP) secara mandiri tidak memiliki dampak signifikan terhadap *financial reporting quality*. Data menunjukkan bahwa *internal control* sering kali menjadi sekadar formalitas administratif yang statis, sehingga manajemen perlu menetapkan kebijakan

kalibrasi ulang sistem kendali agar tidak hanya menjadi daftar periksa (*checklist*) legalitas, melainkan sebuah sistem yang adaptif dan terintegrasi dengan budaya anti-fraud yang responsif.

Mengingat variabel *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan *Accounting Ethics* (AE) terbukti berpengaruh positif signifikan, kebijakan perusahaan harus diarahkan pada penguatan aspek moralitas dan tata kelola berbasis syariah. Manajemen perlu memberlakukan kebijakan penandatanganan Pakta Integritas secara berkala melalui sistem enkripsi digital untuk memastikan setiap level manajemen memiliki tanggung jawab vertikal kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dan tanggung jawab hukum yang terukur. Selain itu, implikasi dari kuatnya pengaruh *accounting ethics* menuntut pembentukan Komite Etik independen yang bertugas mengawasi perilaku profesional akuntan, disertai dengan kebijakan kurikulum pelatihan etika berkelanjutan yang menekankan pada nilai Siddiq dan Amanah serta penerapan sanksi zero tolerance terhadap pelanggaran prinsip objektivitas.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Fraud Prevention* bertindak sebagai moderator yang memperkuat hubungan ICG, *Accounting Ethics*, dan *Internal Control Effectiveness* terhadap *financial reporting quality*, mengimplikasikan perlunya kebijakan moderasi sistem yang aktif. Perusahaan harus mengeluarkan regulasi internal yang mewajibkan penyediaan kanal pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) yang menjamin anonimitas dan perlindungan hukum bagi pelapor guna memastikan potensi salah saji material dapat dideteksi sejak dini. Kebijakan audit internal juga harus bertransformasi dengan mewajibkan penggunaan alat audit berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi anomali data secara otomatis, sejalan dengan temuan bahwa penguatan pencegahan adalah kunci untuk mengaktivasi peran tata kelola dan sistem kendali dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Terakhir, perusahaan perlu menetapkan kebijakan insentif dan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators/KPI*) yang tidak hanya berbasis pada target profitabilitas semata, tetapi juga pada Indeks *Financial Reporting Quality*. Langkah ini sangat penting untuk memitigasi dorongan manajemen melakukan

manajemen laba demi mencapai target bonus yang sering kali mengabaikan etika akuntansi dan prinsip transparansi syariah (*Al-Bayan*). Dengan menyelaraskan kebijakan insentif terhadap integritas data, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa setiap angka yang tersaji dalam laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang jujur dan adil kepada publik, sesuai dengan semangat PP No. 43 Tahun 2025 tentang Sistem Pelaporan Keuangan Nasional.

#### 5.4. Keterbatasan Penelitian

Terlepas dari kontribusi signifikan yang diberikan dalam menjelaskan hubungan antara integritas, etika, dan kualitas laporan keuangan, penelitian ini tetap memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil temuan.

##### 1. Keterbatasan pada Variabel *Internal Control Effectiveness* (INC)

Penelitian ini menemukan bahwa *Internal Control Effectiveness* tidak berpengaruh langsung terhadap *financial reporting quality*. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam instrumen pengukuran INC yang mungkin masih bersifat administratif dan belum mampu menangkap aspek perilaku (behavioral) dari para pelaksana kontrol di lapangan.

##### 2. Sifat Variabel *Fraud Prevention* sebagai *Pure Moderator*

Temuan bahwa *Fraud Prevention* bertindak sebagai *Pure Moderator* menunjukkan bahwa variabel ini sangat dependen pada variabel independen lainnya. Keterbatasannya adalah penelitian ini belum mengeksplorasi variabel moderasi lain (seperti audit eksternal atau komite audit) yang mungkin memiliki interaksi berbeda dalam memperkuat *Financial Reporting Quality*.

##### 3. Batasan Metodologi Pengumpulan Data

Risiko response bias di mana responden cenderung memberikan jawaban yang normatif atau ideal, sehingga hasil mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan praktik nyata di lapangan.

##### 4. Generalisasi Hasil Penelitian

Penelitian ini terbatas pada sektor Lembaga Keuangan Syariah. Mengingat regulasi seperti PP No. 43 Tahun 2025 memiliki dampak yang berbeda pada tiap sektor, hasil penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi secara langsung pada

entitas non-profit atau sektor UMKM yang memiliki karakteristik tata kelola berbeda.

#### 5. Fokus pada Faktor Internal

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang sangat dominan pada faktor internal organisasi. Faktor eksternal seperti tekanan pasar modal, fluktuasi ekonomi makro, dan tekanan politik belum diakomodasi dalam model penelitian ini, padahal faktor tersebut juga berpotensi memengaruhi *financial reporting quality*.

#### 5.4. Agenda Penelitian Mendatang

Berikut adalah rumusan Agenda Penelitian Mendatang yang disusun berdasarkan hasil temuan dan keterbatasan penelitian, guna memberikan arah bagi peneliti selanjutnya:

##### 1. Ekspansi Variabel Independen dan Moderasi.

Mengingat *Fraud Prevention* terbukti sebagai *pure moderator* yang sangat efektif, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel moderasi eksternal lainnya, seperti peran Komite Audit, reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP), atau tekanan regulasi pemerintah untuk melihat dinamika penguatan kualitas laporan keuangan secara lebih luas.

##### 2. Penerapan Metode Penelitian Kualitatif atau Campuran (*Mixed Methods*).

Untuk mengatasi risiko *response bias* pada variabel sensitif seperti ICG dan etika, penelitian mendatang dapat menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam atau studi kasus. Hal ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengapa *Internal control effectiveness* tidak berpengaruh langsung terhadap *financial reporting quality* dalam konteks perilaku nyata.

##### 3. Penggunaan Data *Longitudinal*

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi dalam rentang waktu yang lebih panjang (*longitudinal*) guna mengamati konsistensi perilaku akuntan dan manajemen dalam mematuhi regulasi terbaru, seperti PP No. 43 Tahun 2025, serta untuk melihat apakah dampak pencegahan kecurangan bersifat stabil atau fluktuatif terhadap kualitas laporan.

##### 4. Pengukuran *Internal Control Effectiveness* Berbasis Teknologi

Karena variabel INC dalam penelitian ini ditemukan tidak signifikan secara langsung, agenda riset berikutnya perlu memperbaharui instrumen pengukuran pengendalian internal dengan memasukkan dimensi teknologi informasi (*IT Governance*), dan *Cyber Security*, serta menggunakan pengukuran COSO sebagai pengukurannya mengingat pelaporan keuangan di tahun 2026 sudah sepenuhnya terintegrasi secara digital.

5. Perbandingan Antar Sektor (*Cross-Sectoral Study*)

Penelitian mendatang dapat melakukan analisis komparatif antara sektor publik, sektor swasta, dan organisasi nirlaba. Perbedaan karakteristik tata kelola dan tekanan regulasi di masing-masing sektor diprediksi akan memberikan perspektif baru mengenai efektivitas *fraud prevention* dalam memoderasi kualitas pelaporan.

6. Analisis Faktor Eksternal dan Tekanan Pasar.

Menambahkan variabel eksternal seperti kondisi ekonomi makro, tingkat kompetisi industri, atau ekspektasi investor terhadap laporan ESG (*Environmental, Social, and Governance*) dapat memperkaya model penelitian dalam menangkap fenomena kualitas laporan keuangan secara holistik.

## Daftar Pustaka

- Abed, I. A., Hussin, N., Haddad, H., Al-Ramahi, N. M., And Ali, M. A. (2022). The Moderating Impact Of The Audit Committee On Creative Accounting Determination And Financial Reporting Quality In Iraqi Commercial Banks. *Risks*, 10(4). <https://doi.org/10.3390/Risks10040077>
- Aisyah, S. (2022). The Role Of Financial Performance As A Mediator Between Good Corporate Governance And Firm Value. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 255–268. <https://doi.org/10.57178/Atestasi.V5i1.312>
- Ajibade, A. T., Okutu, N., Akande, F., Kwarbai, J. D., Olayinka, I. M., And Olotu, A. (2022). Ifrs Adoption, Corporate Governance And Faithful Representation Of Financial Reporting Quality In Nigeria's Development Banks. *Cogent Business And Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2139213>
- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C. ., And Zimbelman, M. F. (2012). Fraud Examination, 4th Edition. In *Cengage Learning: Mason*. (Vol. 6, Issue August).
- Alfiyyah, R., Bulutoding, L., Kara, M., Negeri, U. I., And Makassar, A. (2022). *Isafir Islamic Accounting And Finance Review Kajian Etika Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Maqasidu Syariah*. 3, 102–115.
- Altamuro, J., And Beatty, A. (2010). How Does Internal Control Regulation Affect Financial Reporting? *Journal Of Accounting And Economics*, 49(1–2), 58–74. <https://doi.org/10.1016/J.Jacceco.2009.07.002>
- Andari, D. P. T. A., Novitasari, N. L. G., And Dewi, N. L. P. S. (2022). Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 180–189.
- Anggraeni Mersa, N., Sailawati, S., And Elok Larasatining Malini, N. (2021). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(Vol. 14 No. 1 (2021)), 85–92. <https://doi.org/10.35143/Jakb.V14i1.4613>
- Anthony, R. N., And Govindarajan, V. (2007). *Management Control System*.
- Anwari, A. M., And Dzikrulloh. (2023). Islamic Corporate Governance Based On Sharia Enterprise Theory Grounded In Nubuwwah Morals. *Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 1–23.
- Arens, And Alvin. (2008). *Auditing Dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi* (12th Ed.). Erlangga.
- Arif, M. S., And Djasuli, M. (2022). "Good Governance Dalam Sudut Pandang Islam ( Penjelasan Al- Qur ' An)". *"Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial, E-Issn: 2747-0938,"* 2(2), 207–218.
- Asiam, S. (2020). Etika Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan; Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 3(2), 128–136. [https://doi.org/10.25299/Jtb.2020.Vol3\(2\).5719](https://doi.org/10.25299/Jtb.2020.Vol3(2).5719)
- Aswad, H., Hasan, A., And Indrawati, N. (2018). Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan Keefektifan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta Di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 221–234.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., And Kell, W. G. (2005). Modern Auditing: Modern Auditing. In *Modern Auditing* (7th Ed., Vol. 8). Erlangga.
- Bpkp. (2008). *Fraud Auditing 2008*.
- Budiman, M., Anwar, C., And Sudjono, S. (2022). Factors Affecting Fraud Prevention And Its Implication To The Quality Of Financial Statements. *Journal Of Applied Finance & Accounting*, 8(1), 1–25. <https://doi.org/10.21512/jafa.v8i1.6858>
- Christensen, H. B., Nikolaev, V. V., And Wittenberg-Moerman, R. (2016). Accounting Information In Financial Contracting: The Incomplete Contract Theory Perspective. *Journal Of Accounting Research*, 54(2), 397–435. <https://doi.org/10.1111/1475-679x.12108>
- Christinawati, M., And Setiyawati, H. (2022). Factors Affecting Banking Fraud Prevention And Their Impact On The Quality Of Financial Statements. *International Journal Of Social Science And Business*, 6(2), 215–224. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i2.46538>
- Cunningham, F., Achuthan, P., Akanni, W., Allen, J., Amode, M. R., Armean, I. M., Bennett, R., Bhai, J., Billis, K., Boddu, S., Cummins, C., Davidson, C., Dodiya, K. J., Gall, A., Girón, C. G., Gil, L., Grego, T., Haggerty, L., Haskell, E., ... Flicek, P. (2019). Ensembl 2019. *Nucleic Acids Research*, 47(D1), D745–D751. <https://doi.org/10.1093/nar/gky1113>
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., And Sweeney, A. P. (1995). Detecting Earning Management. In *The Accounting Review* (Vol. 70, Issue 20, Pp. 193–225).
- Faisal, Y., Wibisono, B. H., Greentika, G., And Samela, N. (2023). Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Di Tinjau Dari Tekanan Waktu Dan Independensi. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Tri Bhakti*, 02(01), 15–30.
- Firmansyah, A., And Damayanti, N. (2021). Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Kinerja Operasional Dan Kinerja Pasar Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 196. <https://doi.org/10.24912/je.v26i2.746>
- Gardi, B., Aga, M., And Abdullah, N. N. (2023). Corporate Governance And Financial Reporting Quality: The Mediation Role Of Ifrs. *Sustainability (Switzerland)*, 15(13), 1–20. <https://doi.org/10.3390/su15139869>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., And Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. In *Pearson Prentice* (7th Ed.). Pearson Prentice. <https://doi.org/10.3390/Polym12123016>
- Hair, J. F., Matthews, L. M., Matthews, R. L., And Sarstedt, M. (2017). PLS-Sem Or CB-Sem: Updated Guidelines On Which Method To Use. *International Journal Of Multivariate Data Analysis*, 1(2), 107.
- Hair, J. F., Ringle, C. M., And Sarstedt, M. (2011). PLS-Sem: Indeed A Silver Bullet. *Journal Of Marketing Theory And Practice*, 19(2), 139–152. <https://doi.org/10.2753/Mtp1069-6679190202>
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., And Ringle, C. M. (2019). When To Use And How To Report The Results Of PLS-Sem. *European Business Review*, 31(1),

- 2–24. <https://doi.org/10.1108/Ebr-11-2018-0203>
- Hasanah, N., And Yanto, H. (2021). Efektivitas Pelatihan Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Dana Desa. *Business And Accounting Education Journal*, 2(2), 219–234. <https://doi.org/10.15294/Baej.V2i2.50650>
- Hida, R., Utami, S., And Berliani, K. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Good Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kota Bandung Tahun 2022). *Jurnal Maneksi*, 13(2), 265–273.
- Houcine, A., Zitouni, M., And Srairi, S. (2022). The Impact Of Corporate Governance And Ifrs On The Relationship Between Financial Reporting Quality And Investment Efficiency In A Continental Accounting System. *Euromed Journal Of Business*, 17(2), 246–269. <https://doi.org/10.1108/Emjb-06-2020-0063>
- Ibrahim, A. I., And Kamri, N. 'Azzah. (2017). The Commitment To Islamic Work Ethics Among Islamic Banking Employees In Aceh. *Jurnal Syariah*, 24(1), 93–114. <https://doi.org/10.22452/Js.Vol24no1.4>
- Im, C., And Nam, G. (2019). Does Ethical Behavior Of Management Influence Financial Reporting Quality ? *Sustainability*, 11(20), 1–16.
- Ismunawan, And Andayani, S. (2021). Six Sigma Financial Tracking And Reporting: Measuring Project Performance And P&L Impact. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(01), 190–203.
- Junaedi, E., Maulana, I., And Si, L. M. (2014). Fraud Perbankan Syariah Dan Moralitas Keislaman. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 13, 46–72. <https://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/asy-syukriyyah/article/download/182/115>
- Kaawaase, T. K., Nairuba, C., Akankunda, B., And Bananuka, J. (2021). Corporate Governance, Internal Audit Quality And Financial Reporting Quality Of Financial Institutions. *Asian Journal Of Accounting Research*, 6(3), 348–366. <https://doi.org/10.1108/Ajar-11-2020-0117>
- Karbhari, Y., Alam, M. K., And Rahman, M. M. (2020). Relevance Of The Application Of Institutional Theory In Shariah Governance Of Islamic Banks. *Psu Research Review*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/Prr-05-2020-0015>
- Koufie, S., Tetteh, A. L., Kwarteng, A., And Fosu, R. A. (2024). The Impact Of Ethical Accounting Practices On Financial Reporting Quality: The Moderating Role Of Religiosity. *International Journal Of Ethics And Systems*, 40(2).
- Kuraesin, A. D., And Yadiati, W. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Di Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Ekombis Review*, 9(2), 356–364. <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/indexdoi:https://doi.org/10.37676/ekombis.V9i2.1516>
- Kusumawati, E., And Audina, B. R. (2020). Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Sosial Perbankan. *Business And Economics Conference In Utilization Of Modern Technology*, 3(2005), 48–64.
- Länsiluoto, A., Jokipii, A., And Eklund, T. (2016). Internal Control Effectiveness – A Clustering Approach. *Managerial Auditing Journal*, 31(1), 5–34.

<https://doi.org/10.1108/Maj-08-2013-0910>

- Lartey, P. Y., Kong, Y., Bah, F. B. M., Santosh, R. J., And Gumah, I. A. (2020). Determinants Of Internal Control Compliance In Public Organizations; Using Preventive, Detective, Corrective And Directive Controls. *International Journal Of Public Administration*, 43(8), 711–723. <https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1645689>
- Latifah, E. (2019). Peran Akuntan Syariah Di Era Disruption. *Al-Musthofa: Journal Of Sharia Economics*, 2(1), 15–29.
- Lestari, I. A. M. ., And P.C, A. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengawi0. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 101–116.
- Lestari, I. A. M. E., And Ayu, P. C. (2021). Pengaruh Moralitas Individu, Komitmen Organisasi Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Mengawi). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 101–116.
- Lou, Y.-I., And Wang, M.-L. (2011). Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting. *Journal Of Business & Economics Research (Jber)*, 7(2), 61–78. <https://doi.org/10.19030/Jber.V7i2.2262>
- Maherni. (2022). Peran Standar Akuntansi Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Budgeting: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 248–253.
- Mansour, W., And Bhatti, M. I. (2018). The New Paradigm Of Islamic Corporate Governance. *Managerial Finance*, 44(5), 513–523. <https://doi.org/10.1108/Mf-01-2018-0043>
- Marciano, B. Et Al. (2021). Whistleblowing System Dan Pencegahan Fraud : Sebuah Tinjauan Literatur. *Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 313–324.
- Mardhotillah, N. ., And Yulhendri, Y. (2022). Confirmatory Factor Analysis (Cfa) Interaksi Dosen Mahasiswa Dalam Pembelajaran Daring. *Jurnal Salingka Nagari*, 93–100.
- Margerety, M. (2022). Penerapan Etika Profesi Akuntan Dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Bisnis Dalam Profesi Akuntan. *Pusdansi*, 2(4), 1–12.
- Melindawati, R., Faisal, Y., And Sari, E. G. (2023). Overview Of Fraud Prevention At Mandiri Utama Finance Syariah. *Proceeding Of The Perbanas International Seminar On Economics, Business, Management, Accounting And It (Proficient) 2023*, 1(1), 322–326.
- Merton, R. K. (1968). Merton, Robert.Pdf. In *Science* (Vol. 159, Issue 3810, Pp. 56–63).
- Mubaraq, S., Abdulrasaq, M., And & Saidu, M. (2019). Ethical Accounting Practices And Financial Reporting Quality: Evidence From Listed Firms In Nigeria. *Accounting And Taxation Review*, 3(2), 97–110. <http://www.atreview.org>
- Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–

- Nguyen, L. T. M., Le, D., Tran, T., And Dang, T. (2021). Financial Reporting Quality, Corporate Governance, And Idiosyncratic Risk: Evidence From A Frontier Market. *Australasian Accounting, Business And Finance Journal*, 15(4), 28–46. <https://doi.org/10.14453/Aabfj.V15i4.3>
- Nkuranga, W., And Tarus, T. (2023). Effect Of Accounting Ethics On Quality Of Financial Reporting Among Listed Commercial Banks In Rwanda Stock Exchange. *Journal Of Finance And Accounting*, 7(9), 45–68. <https://doi.org/10.53819/81018102t2248>
- Noholo, S. (2021). Pengaruh Kompetensi Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Intervening Pencegahan Fraud. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 136–147. <https://doi.org/10.37905/Jar.V2i2.40>
- Osayantinaifuwa, H., Embele, K., And Saidu, M. (2018). Ethical Accounting Practices And Financial Reporting Quality Hope. *Ethical Accounting Practices And Financial Reporting Quality. Epra Journal Of Multidisciplinary Research*, 4(12), 31-44. <https://ssrn.com/abstract=3423893>
- Osunwole, O. O., Adeyemi, O. A., And Dunsin, A. T. (2020). The Influence Of Accounting Ethics On Quality Of Financial Reports Among Accounting Practitioners In Ibadan, Oyo State, Nigeria. *Middle European Scientific Bulletin*, 1(7), 77–87. <https://doi.org/10.47494/Mesb.2020.1.145>
- Pham, Q. T., Tran, T. G. T., Bui, T. T. H., Nguyen, T. P. L., And Bui, A. T. (2023). Impacts Of Tax Enforcement And Independent Audit On Financial Reporting Quality Through The Internal Control Effectiveness: Evidence From Vietnam Enterprises. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2175486>
- Prabowo, M. S. (2019). Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Prespektif Islam. *Qistie*, 11(2), 257–270. <https://doi.org/10.31942/Jqi.V11i2.2592>
- Prastika, A. W., And Trisnarningsih, S. (2023). Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Fraudulent Financial Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 5(2), 911–930. <https://doi.org/10.47467/Alkharaj.V5i3.1771>
- Rahmadieni, R. Y., And Qizam, I. (2019). Analisis Pengaruh Standar Audit Syariah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Baitul Mal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 17. <https://doi.org/10.22219/Jes.V4i2.9871>
- Rahmatika, D. N. (2016). Determinant Factor Influencing The Level Of Fraud And Implication To Quality Of Financial Reporting (Research At Local Governments Indonesia). *International Journal Of Applied Business And Economic Research*, 14(14), 861–879.
- Renanda, R., And Jamilus, J. (2024). Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 8(2), 254–264. <https://doi.org/10.31955/Mea.V8i2.4027>
- Rini. (2014). Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit , Peran Dewan Pengawas Syariah , Dan Efektivitas Keuangan ( Studi Empiris Pada Bank Syariah Di

- Indonesia ). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 143–155. [Http://Jurnal.Sebi.Ac.Id/Index.Php/Jaki/Article/View/40](http://Jurnal.Sebi.Ac.Id/Index.Php/Jaki/Article/View/40)
- Roekhudin, Triyuwono, I., Sukoharsono, E. G., And Rosidi. (2015). Fair Value Measurements (Fvms) Rejection And Reconstruction: A Phenomenological Study Of Internal Accountant Response Towards Fv Accounting And Reporting. *Procedia - Social And Behavioral Sciences*, 211(September), 880–889. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.116>
- Rosyida, I. A. (2017). Perilaku Etis Dan Tidak Etis Oleh Akuntan Dalam Sebuah Organisasi. *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 2(1), 23–39. <https://doi.org/10.30737/ekonika.V2i1.16>
- Rubino, M., And Vitolla, F. (2014). Corporate Governance And The Information System: How A Framework For It Governance Supports Erm. *Corporate Governance (Bingley)*, 14(3), 320–338. <https://doi.org/10.1108/Cg-06-2013-0067>
- Schober, P., Mascha, E. J., And Vetter, T. R. (2021). Statistics From A (Agreement) To Z (Z Score): A Guide To Interpreting Common Measures Of Association, Agreement, Diagnostic Accuracy, Effect Size, Heterogeneity, And Reliability In Medical Research. *Anesthesia And Analgesia*, 133(6), 1633–1641. <https://doi.org/10.1213/ane.0000000000005773>
- Septiari, D., Helmayunita, N., And Serly, V. (2023). Accounting Ethics: From Professionals Views. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(2), 146–156. <https://doi.org/10.18196/jati.V6i2.18084>
- Shi, W., Connelly, B. L., And Hoskisson, R. E. (2017). External Corporate Governance And Financial Fraud: Cognitive Evaluation Theory Insights On Agency Theory Prescriptions. *Strategic Management Journal*, 38(October), 1268–1286. <https://doi.org/10.1002/Smj>
- Sinaranata, I. P. A., Putra, I. G. C., And Saitri, P. W. (2019). Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas Dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan I. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 1–9.
- Skousen, C. J., Smith, K. R., And Wright, C. J. (2009). Detecting And Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Triangle And Sas No. 99. *Advances In Financial Economics*, 13(99), 53–81. [https://doi.org/10.1108/S1569-3732\(2009\)0000013005](https://doi.org/10.1108/S1569-3732(2009)0000013005)
- Sudarmanto, E., And Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195. <https://doi.org/10.29040/jiei.V7i1.1593>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Susilawati, I., Arief, M., And Widyaningsih, A. (2022). Apakah Penerapan Etika Profesi Dapat Membatasi Perilaku Tidak Etis Akuntan? *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(2), 288–304. <https://doi.org/10.21831/Nominal.V11i2.50497>
- Triwahyuni, T., And Prasetyo, A. (2021). Pencegahan Fraud Pada Mantri Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Gombang: Peran Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Etis Organisasi. *Accounting And Management Journal*, 5(2), 44–55.

- <https://doi.org/10.33086/Amj.V5i2.2272>
- Umar, H., Indriani, A., And Purba, R. B. (2019). The Determinant Fraud Prevention Of Quality Local Government's Financial Report. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.31289/Jab.V5i1.2310>
- Wahyuni, E. S., And Nova, T. (2018). Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Apatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Inovasi Dan Bisnis*, 6, 189–194.
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., And Hanggoro, P. T. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.56799/ekoma.V1i1.25>
- Wati, L. N., Ramdany, And Momon. (2020). Does Corporate Governance Affect Financial Reporting Quality Of Politically Connected Firms? *Entrepreneurship And Sustainability Issues*, 7(3), 2126–2143. [https://doi.org/10.9770/Jesi.2020.7.3\(45\)](https://doi.org/10.9770/Jesi.2020.7.3(45))
- Weaver, B., And Wuensch, K. L. (2013). Spss And Sas Programs For Comparing Pearson Correlations And Ols Regression Coefficients. *Behavior Research Methods*, 45(3), 880–895. <https://doi.org/10.3758/S13428-012-0289-7>
- Zhang, W. (2024). Ethical Dilemmas In Accounting: A Comprehensive Analysis Of Professional Ethics. *Academic Journal Of Business & Management*, 6(2), 137–145. <https://doi.org/10.25236/Ajbm.2024.060220>

